

**BAB III**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| MISI                                                                         | SASARAN                                                                                      | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                         | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | TARGET DI AKHIR PERIODE (2026) | RASIO CAPAIAN |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak | Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja                                 | Persentase Tenaga Kerja yang dilatih                                                                                                                      | 85%         | 87.86%         | 95%                            | 103%          |
|                                                                              |                                                                                              | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                                                                                                  | 41%         | 67,50%         | 43%                            | 156%          |
|                                                                              | Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial                                                   | Persentase Perusahaan yang menerapkan teta Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 90%         | 84.93%         | 100%                           | 94.36%        |
|                                                                              |                                                                                              | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan                                                                                                    | 100%        | 100%           | 100%                           | 100%          |
|                                                                              | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                | 86.50       | 81.88          | 87.50                          | 94.65%        |
|                                                                              |                                                                                              | Nilai SAKIP Disnaker                                                                                                                                      | 72          | 80.49          | 78                             | 111%          |

1. Uraian tentang bagaimana Capaian terhadap Target :
  - a. Indikator Sasaran Persentase Tenaga Kerja yang dilatih, jumlah yang dilatih sebanyak 152 orang yang mendaftar sebanyak 173 orang (per 31 Desember 2024);
  - b. Indikator Sasaran Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 orang bekerja di Sektor Formal (25 Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha) dan Jumlah Tenaga Kerja yang mendaftar sebanyak 1.357 orang (per 31 Desember 2024); 345 orang yang berwirausaha sebagai berikut:
    1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK
    2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop
    3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membuat di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membuat di desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat).
    4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta anggota kelompok tani hidroponik)
  - c. Indikator Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), sebagai berikut:
    1. Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan = 83,81%
    2. Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama = 100%;
    3. Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit = 75%
    4. Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah = 67,70%
    5. Persentase Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan = 98,14%
  - d. Indikator Sasaran Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan, ada 9 (sembilan) kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat (per 31 Desember 2024). Dan semua kasus perselisihan Hubungan Industrial tersebut dapat diselesaikan;
  - e. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2024, Disnaker Tahun 2024 adalah 81,88 yang dilakukan evaluasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - f. Indikator Sasaran Nilai SAKIP Disnaker Tahun 2024 adalah 80,49 yang dilakukan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Surat dari Kepala Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : LHE-007.121/188/M/ISP/2024 Tanggal 29 Juni 2024 Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disnaker Kab. Tanjab Barat Tahun 2024.
2. Faktor Pendorong/Faktor Penghambat
  - a. Faktor Pendorong :
    1. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan BPJS dapat ditingkatkan.
    2. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di perusahaan- perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.

3. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
  4. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
  5. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
- b. Faktor Penghambat :
1. Kurangnya sosialisasi terkait struktur skala upah sehingga belum banyak perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

|  |  |  |                                                              |               |               |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 69 unit       | 69 unit       |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5 unit        | 5 unit        |  |  |  |
|  |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 16 unit kerja | 16 unit kerja |  |  |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN</b>                     | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                  |             |             |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  |  | <b>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                                                 |             |             |  |  |  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |  | Pengembangan Puskesmas                                                                                                           | 1 unit      | 1 unit      |  |  |  |
|  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                          | 6 unit      | 6 unit      |  |  |  |
|  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                        | 3 unit      | 3 unit      |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                      | 9 unit      | 9 unit      |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                 | 1620 unit   | 1620 unit   |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                  | 4 paket     | 4 paket     |  |  |  |
|  |  |  | Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitass kesehatan | 192 paket   | 192 paket   |  |  |  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |             |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan ). -</li> <li>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung</li> </ul> | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 6.290 orang | 6.188 Orang | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan sasaran belum berdasar data riil, tetapi masih menggunakan estimasi pusdatin.</li> <li>- Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua SPM dapat terpenuhi sesuai standar .</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puskesmas melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun</li> <li>- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</li> <li>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</li> </ul> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                      |                                              |             |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Barat Tahun 2024                                                                                                                                     |                                              |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengetahuan SDM terhadap pentingnya SPM</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi SPM kepada tenaga kesehatan dan melakukan KIE ( komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang SPM kepada masyarakat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</li> </ul> |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan )</li> </ul> | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 6.070 orang | 6.013 Orang | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil, tetapi masih menggunakan estimasi pusdatin.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puskesmas melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024</p> |  |  | <p>- Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua SPM dapat terpenuhi sesuai standar .</p> <p>- Kurangnya pengetahuan SDM terhadap pentingnya SPM</p> | <p>- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM</p> <p>- Melakukan sosialisasi SPM kepada tenaga kesehatan dan melakukan KIE ( komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang SPM kepada masyarakat.</p> | <p>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</p> <p>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |             |             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan )</p> <p>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun</p> | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 5.718 orang | 5.605 Orang | <p>- Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil, tetapi masih menggunakan estimasi pusdatin.</p> <p>- Kurangnya pengetahuan SDM terhadap pentingnya SPM</p> | <p>- Puskesmas melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun</p> <p>- Melakukan sosialisasi SPM kepada tenaga kesehatan dan melakukan KIE ( komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang SPM kepada masyarakat.</p> | <p>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</p> <p>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                |                                        |              |              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 2024                                                                                           |                                        |              |              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 23.998 orang | 23.624 Orang | <div>- Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil, tetapi masih menggunakan estimasi pusdatin.</div> <div>- Kurangnya pengetahuan SDM terhadap pentingnya</div> | <div>- Puskesmas melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun</div> <div>- Melakukan sosialisasi SPM kepada tenaga kesehatan dan melakukan KIE ( komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang SPM kepada masyarakat.</div> | <div>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal) terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025</div> <div>- Melaksanakan pemantauan serta monitoring dan evaluasi secara bertahap/per triwulan tentang realisasi capaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal)</div> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |              |              |                                                                                                                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | SPM          |              | terintegrasi dan terpadu bersama program terkait dan lintas sektor baik secara luring mau pun daring tahun 2025 |
|  |  | - Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan )<br>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 37.065 orang | 50.894 orang |                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2024                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|  |  | <p>- Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan )</p> <p>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian</p> | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 216.604 orang | 172.405 orang | <p>1.Kurangnya kerjasama dengan Lintas Sektor, Lintas Program, dan Jejaring diwilayah kerja Puskesmas</p> <p>2.Belum maksimalnya skrining kesemua wilayah kerja, Posbin du jauh</p> | <p>1.Melakukan advokasi ulang ke lintas sektor terkait, lintas program, dan jejaring diwilayah kerja puskesmas</p> <p>2.Memaksimalkan kegiatan posbindu PTM dengan mendatangkan suatu perkumpulan masyarakat (pengajian, sebelum/sesudah sholat Jum'at),</p> | Dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan skrinning kesehatan pada usia produktif |

|  |  |                                                                                      |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024 |  |  | dari jangkauan masyarakat, masih perlu menambahkan Posbindu PTM, sehingga masyarakat melakukan skrining di puskesmas saat sakit saja |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |                                                                                      |  |  | 3.Kurangnya minat masyarakat untuk datang ke posbindu PTM,                                                                           | 3.Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat penyuluhan, melaksanakan posbindu mobile ke rt-rt, membuat inovasi Skrining PTM ditempat keramaian (pasar tradisional), serta memaksimalkan skrining PTM ke instansi pemerintah diwilayah |

|  |  |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | salah satu alasan nya karena takut mengetahui hasil pemeriksaan.   | kerja,                                                                                                                         |
|  |  |  |  |  | 4.Saat kegiatan skrining dilaksanakan peserta tidak membawa KTP/KK | 4.Kegiatan dilakukan dan terintegrasi dengan kegiatan program lain, serta dengan jejaring dan jaringan wilayah kerja puskesmas |
|  |  |  |  |  | 5.Peserta banyak tidak hadir pada saat kegiatan skrining           | 5.Menambah posbindu PTM, sehingga setiap desa memiliki 1 atau 2 posbindu sesuai dengan keadaan wilayah dan jumlah penduduk,    |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |              |                                                                                          |                                                                           |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |              | 7.Data diaplika si asik berbed a dengan manual (tidak semua data manual diinput di ASIK) | 7.Memaksimalkan penginputan data PTM di ASIK dengan membuat tim penginput |  |
|  |  | - Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan )<br>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.098 orang | 27.292 orang |                                                                                          |                                                                           |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |              |              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |              |              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
|  |  | -Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan ) ' - SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 80.113 orang | 42.504 orang | - Kurang nya Kerjasa ma dengan Lintas sektor dan lintas progra m, serta jejaring diwilay ah kerja puskes mas | - Melakukan Peningkatan kapasitas petugas, terus berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas program jejaring dan jaringan wilayah Kerja Puskesmas                                                                            | Dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyakit hipertensi |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |              |              | - Kurang nya pemah aman masyar akat terhada                                                                  | - Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, meningkatkan penyuluhan tentang hipertensi baik secara langsung ataupun dimedia sosial yang dimiliki puskesmas agar Pasien dapat melakukan kontrol rutin akan |                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | <table><tr><td>p<br/>penyaki<br/>t<br/>hiperte<br/>nsi</td><td>tekanan darah meskipun tidak<br/>ada keluhan</td></tr><tr><td>- Masih<br/>Banyak<br/>masyar<br/>akat<br/>yang<br/>takut<br/>untuk<br/>melaku<br/>kan<br/>pemer<br/>ksaan<br/>tekana<br/>n darah<br/>karena<br/>takut<br/>dengan<br/>hasil<br/>pemer<br/>ksaan<br/>serta<br/>tidak<br/>rutin<br/>kontrol<br/>dan<br/>makan<br/>obat</td><td>- Memaksimalkan SDM, sarana<br/>dan prasarana penunjang<br/>pemeriksaan setiap poli layanan<br/>yang ada di puskesmas, pada<br/>kader kesehatan, serta pada<br/>jejaring diwilayah kerja<br/>puskesmas.</td></tr></table> | p<br>penyaki<br>t<br>hiperte<br>nsi | tekanan darah meskipun tidak<br>ada keluhan | - Masih<br>Banyak<br>masyar<br>akat<br>yang<br>takut<br>untuk<br>melaku<br>kan<br>pemer<br>ksaan<br>tekana<br>n darah<br>karena<br>takut<br>dengan<br>hasil<br>pemer<br>ksaan<br>serta<br>tidak<br>rutin<br>kontrol<br>dan<br>makan<br>obat | - Memaksimalkan SDM, sarana<br>dan prasarana penunjang<br>pemeriksaan setiap poli layanan<br>yang ada di puskesmas, pada<br>kader kesehatan, serta pada<br>jejaring diwilayah kerja<br>puskesmas. |  |
| p<br>penyaki<br>t<br>hiperte<br>nsi                                                                                                                                                                                                         | tekanan darah meskipun tidak<br>ada keluhan                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |  |
| - Masih<br>Banyak<br>masyar<br>akat<br>yang<br>takut<br>untuk<br>melaku<br>kan<br>pemer<br>ksaan<br>tekana<br>n darah<br>karena<br>takut<br>dengan<br>hasil<br>pemer<br>ksaan<br>serta<br>tidak<br>rutin<br>kontrol<br>dan<br>makan<br>obat | - Memaksimalkan SDM, sarana<br>dan prasarana penunjang<br>pemeriksaan setiap poli layanan<br>yang ada di puskesmas, pada<br>kader kesehatan, serta pada<br>jejaring diwilayah kerja<br>puskesmas. |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |  |                                                                                                   |                                                            |             |             |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                   |                                                            |             |             | - Masih belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan di ASIK Karena SDM masih kurang.                    |                                                                                                           |                                                                                                           |
|  |  | -Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan ) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 4.976 orang | 3.130 orang | - Kurangnya Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program, dan jejaring di wilayah kerja puskesmas | - Melakukan Peningkatan kapasitas petugas, lintas program, jejaring dan jaringan wilayah kerja puskesmas, | Dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyakit Diabetes Mellitus |
|  |  | - SK Kepala Dinas Kesehatan                                                                       |                                                            |             |             | - Kurangnya                                                                                            | - Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi                                                          |                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Kabupaten<br>tanjung Jabung<br>Barat No 4<br>Tahun 2024<br>Tentang Tim<br>Percepatan<br>Penerapan dan<br>Pencapaian<br>Standar<br>Pelayanan<br>Minimal Bidang<br>kesehatan<br>Kabupaten<br>tanjung Jabung<br>Barat Tahun<br>2024 |  |  |  | <div> <p>pemah<br/>aman<br/>masyar<br/>akat<br/>terhada<br/>p<br/>penyaki<br/>t<br/>Diabete<br/>s<br/>melitus</p> </div> <div> <p>- Masih<br/>banyak<br/>masyar<br/>akat<br/>yang<br/>takut<br/>untuk<br/>melaku<br/>kan<br/>pemer<br/>ksaan<br/>gula<br/>darah<br/>karena<br/>takut<br/>dengan<br/>hasil<br/>pemer<br/>ksaann<br/>ya dan<br/>masih<br/>banyak<br/>masyar<br/>akat</p> </div> <div> <p>- Meningkatkan penyuluhan<br/>tentang DM baik secara<br/>langsung ataupun dimedia<br/>sosial yang dimiliki puskesmas<br/>sehingga pasien dapat<br/>melakukan kontrol rutin<br/>walaupun tidak ada keluhan</p> </div> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                      |                                                                  |           |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                                                                                      |                                                                  |           |           | yang tidak rutin kontrol dan makan obat                                            |                                                                                                                                                                               |  |
|  |  |                                                                                                                                      |                                                                  |           |           | - Masih belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan di ASIK karena SDM masih Kurang | - Memaksimalkan SDM, sarana dan Prasarana penunjang pemeriksaan setiap poli layanan yang ada dipuskesmas, pada kader Kesehatan, serta pada jejaring diwilayah kerja puskesmas |  |
|  |  | -Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan )<br><br>- SK Kepala Dinas Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 413 orang | 741 orang |                                                                                    |                                                                                                                                                                               |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                |             |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--|--|--|
|  |  | Kabupaten<br>tanjung Jabung<br>Barat No 4<br>Tahun 2024<br>Tentang Tim<br>Percepatan<br>Penerapan dan<br>Pencapaian<br>Standar<br>Pelayanan<br>Minimal Bidang<br>kesehatan<br>Kabupaten<br>tanjung Jabung<br>Barat Tahun<br>2024 |                                                                  |                |             |  |  |  |
|  |  | - Permenkes 67<br>Tahun 2018<br>tentang<br>Pengendalian<br>TBC<br>-Permenkes No.<br>06 Tahun 2024<br>tentang Standar<br>Pelayanan<br>Minimal Bidang<br>Kesehatan ( SPM Kesehatan<br>)                                            | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang Terduga<br>Tuberkulosis | 1.855<br>orang | 4.840 orang |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |             |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  | - SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024 |                                                                    |             |             |  |  |  |
|  |  | -Permenkes No. 21 Tahun 2022 Tentang Penganggulang an HIV, PIMS dan AIDS<br>-Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan )                                   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 4.486 orang | 5.258 orang |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                  |                  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|  |  | <p>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024</p> |                                                                                             |                  |                  |  |  |  |
|  |  | <p>- UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tahun 2010</p>                                | <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> | <p>3 dokumen</p> | <p>3 dokumen</p> |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                 |           |           |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  | tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan                                                                                                          |                                                 |           |           |  |  |  |
|  |  | Perpres no 72 Tahun 2021, Perbub no 12 tahun 2020                                                                                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 4 dokumen | 4 dokumen |  |  |  |
|  |  | PP no 66 tahun 2014                                                                                                                                                                                    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan      | 2 dokumen | 2 dokumen |  |  |  |
|  |  | PMK No. 8 tahun 2019                                                                                                                                                                                   | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan         | 5 dokumen | 5 dokumen |  |  |  |
|  |  | 1. PMK no. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi<br>2. PMK No. 15 tahun 2016 tentang istitoah Kesehatan Jamaah Haji<br>3. PMK No. 45 tahun 2014 tentang Penyelenggara n Surveilans Kesehatan | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                | 6 dokumen | 6 dokumen |  |  |  |

|  |  |  |                                                                            |           |           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 413 orang | 413 orang |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                             | 200 orang | 135 orang | <p>1. Kurangnya pengetahuan &amp; pemahaman masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa &amp; NAPZA</p> <p>2. Belum terbentuknya tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat kabupaten</p> <p>3.</p> | <p>1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa dan Napza di semua tingkat lapisan masyarakat</p> <p>2. Membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat Kabupaten</p> | <p>1. Akan melaksanakan kegiatan sosialisasi keswa napza di masyarakat</p> <p>2. Akan membentuk TPKJM kab.Tanjung jabung barat</p> |

|  |                                                                                                                       |                                                        |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                                                                       |                                                        |           | Terbatasnya sumber dana |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|  | Permenkes No. 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia                                                                | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2 dokumen | 2 dokumen               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|  | 1. Perpres 82 Th 2018 dan Perpres no 64 Th 2020 Tentang Jaminan Kesehatan<br>2. Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Barat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat               | 1 dokumen | 1 dokumen               | - Data Peserta PBPU dan BP Pemda yang tersedia belum memenuhi kuota. Data peserta bersifat fluktuatif setiap bulannya.<br><br>- Memenuhi data peserta PBPU dan BP Pemda berdasarkan kuota yang ada melalui mutasi tambah kurang peserta | - koordinasi dengan lintas sektor terkait |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>- Terdapat kompensasi tagihan iuran BPJS Kesehatan (kelebihan tagihan oleh BPJS sehingga pengembalian dana Pemda)</p> <p>, berdasarkan BA Perhitungan dan Perlakuan Kompensasi Atas kelebihan</p> | <p>- Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan</p> | <p>- Melakukan koordinasi dengan BPJS</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Pemba<br>yaran<br>Bantua<br>n luran<br>PBPU<br>dan BP<br>Mandiri<br>kelas III<br>Tahun<br>2021<br>dan<br>2024<br>BPJS<br>kesehat<br>an<br>dengan<br>Pemer<br>intah<br>Kabupa<br>ten<br>Tanjun<br>g<br>Jabung<br>Barat<br>Nomor<br>7376/B<br>A/II-07,<br>Nomor<br>400.7.3<br>.6/4057<br>/Dinkes<br>/2024<br>terdapa<br>t<br>kelebih |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |                                                            |                                 |            |            |                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |                                                            |                                 |            |            | an tagihan Bantuan luran sebesar Rp 364.039.200,- yang kemudian diperuntukan untuk membayar tagihan tagihan berikutnya pada tahun anggaran 2024 |  |  |
|  |  | Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat | Operasional Pelayanan Puskesmas | 16 dokumen | 16 dokumen |                                                                                                                                                 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |           |           |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  | UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 230 paket | 230 paket |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                           | 1 dokumen | 1 dokumen |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |           |           |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  | Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           | 16 unit   | 16 unit   |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 laporan | 1 laporan |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |           |           |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  | UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, Permenkes Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1 dokumen | 1 dokumen |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |        |        |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|  |  | 1. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 802)<br>2. UU RS No 44 Tahun 2009<br>3. PP No 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit<br>4. Permenkes No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit<br>5. Permenkes No 12 tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit<br>6. Permenkes Nomor 01 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 2 unit | 2 unit |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Tahun 2012<br>Tentang Sistem<br>Rujukan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>7. Kep.Dirjen<br>Pelayanan<br>Kesehatan No.<br>HK.02.02/D/113<br>1/2023 tentang<br>Petunjuk Teknis<br>Penggunaan<br>aplikasi Sistem<br>Informasi<br>Rujukan<br>Terintegrasi<br>8. Permenkes<br>No 91 Tahun<br>2015 Tentang<br>Standar<br>Pelayanan<br>Transfusi Darah<br>9. Permenkes<br>No 21 Tahun<br>2020 Tentang<br>Strategi<br>Kemenkes<br>10. Peraturan<br>Menteri<br>Kesehatan<br>Nomor 90<br>Tahun 2015<br>tentang<br>Penyelenggaraa<br>n Pelayanan |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                     |                                          |           |           |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  | Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil                                                                                                 |                                          |           |           |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                     | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  | 100 orang | 450 orang |  |  |  |
|  |  | - Permenkes No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( SPM Kesehatan ). -<br>- SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2024 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1 dokumen | 1 dokumen |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                |               |               |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  |  | Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2024                                                      |                                                                |               |               |  |  |  |
|  |  | Permenkes Nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraa n satu data Bidang kesehatan melalui sistem informasi kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 2 aplikasi    | 2 aplikasi    |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                           | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                         | 2 dokumen     | 2 dokumen     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                |               |               |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN    | 75%<br>87,50% | 75%<br>87,50% |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                |               |               |  |  |  |

|  |  |                                                                                                              |                                                                                                                          |                    |                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|--|
|  |  |                                                                                                              | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | <b>100%</b>        | <b>100%</b>          |  |  |
|  |  |                                                                                                              | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                | 2 dokumen          | 2 dokumen            |  |  |
|  |  |                                                                                                              | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                         | 148 orang          | 148 orang            |  |  |
|  |  |                                                                                                              | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                   | 12 dokumen         | 12 dokumen           |  |  |
|  |  |                                                                                                              | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>511 orang</b>   | <b>511 orang</b>     |  |  |
|  |  | PMK 37 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          | 511 orang          | 511 orang            |  |  |
|  |  |                                                                                                              |                                                                                                                          |                    |                      |  |  |
|  |  |                                                                                                              | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>                                                       | <b>35%<br/>35%</b> | <b>100%<br/>100%</b> |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|  |  |  | <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>                                                                                    | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      |  |  |  |
|  |  |  | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                    | 5 dokumen        | 5 dokumen        |  |  |  |
|  |  |  | <b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>                        | <b>36 sampel</b> | <b>36 sampel</b> |  |  |  |
|  |  |  | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                 | 1 dokumen        | 1 dokumen        |  |  |  |
|  |  |  | <b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b> | <b>80 IRTP</b>   | <b>80 IRTP</b>   |  |  |  |

|  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  |  | Permenkes Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit       | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 dokumen      | 1 dokumen      |  |  |  |
|  |  |                                                                                                 | <b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>                                                                                                         | <b>90 IRTP</b> | <b>90 IRTP</b> |  |  |  |
|  |  | Permenkes Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit       | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                     | 92 unit        | 92 Unit        |  |  |  |
|  |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |  |  |  |
|  |  | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                                                                                                   | <b>80%</b>     | <b>80%</b>     |  |  |  |

|  |  |                                                                                           |                                                                                                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Permenkes Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>205 Posyandu</b> | <b>205 Posyandu</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|  |  | Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu                                          | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       | 1 dokumen           | 1 dokumen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kurang optimal nya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan /menda tangi Posyan du ,</li> <li>- kurang nya penget ahuan dan ketera mpilan kader dalam pelaksa naan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan edukasi, komunikasi, dan informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik dan penyuluhan keliling</li> <li>- Melakukan pelatihan kecakapan kader posyandu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pencetakan media KIE</li> <li>- Pelaksanaan pelatihan kecakapan kader Posyandu</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                |                                                                           |                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | posyan<br>du                                                   |                                                                           |                                        |
|  |  |  |  |  |  |  | -<br>terbata<br>snya<br>sumber<br>daya<br>yang<br>tersedi<br>a | - Melakukan monitoring dan<br>evaluasi melalui pemberdayaan<br>masyarakat | - Dilakukan<br>monev secara<br>berkala |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

1. Urusan Kesehatan; Rumah Sakit Suryah Khairuddin

Tabel 3.3  
Rumah Sakit Rumah Sakit Suryah Khairuddin Kabupaten  
Tanjung Jabung BaratTahun Anggaran 2024

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

| No | URUSAN PEMERINTAHAN                  | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA     | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                           | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                         | 4         | 5                                                                | 6         | 7         | 8            | 9                            | 10                            |
| 1  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN |           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             | 100%      | 100%      |              |                              |                               |
|    |                                      |                                           |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 100%      | 100%      |              |                              |                               |
|    |                                      |                                           |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%      | 100%      |              |                              |                               |
|    |                                      |                                           |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada    |                              |                               |

|  |  |  |  |                                                                                 |                |                |           |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>100%</b>    | <b>100.0%</b>  |           |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN                                               | 32 Orang/bulan | 32 Orang/Bulan | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 Laporan      | 1 Laporan      | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |           |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | 1 Paket        | 1 Paket        | Tidak Ada |  |  |

|  |  |  |  |                                                                    |             |             |           |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 2 Paket     | 2 Paket     | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 2 Paket     | 2 Paket     | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 1 Paket     | 1 Paket     | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 1 Laporan   | 1 Laporan   | Tidak Ada |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                      |             |             |           |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintah<br/>Daerah</b>      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                | 9 Unit      | 9 Unit      | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                      | 33 Unit     | 33 Unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                           | 1 Laporan   | 1 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                             | 1 Laporan   | 1 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                  |              |              |           |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 16 Unit      | 16 Unit      | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 185 Unit     | 185 Unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                                                | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  |           |  |  |
|  |  |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                           | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                               | <b>100%</b>  | <b>99.8%</b> |           |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>               | <b>100%</b>  | <b>99%</b>   |           |  |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         | 3 Unit       | 3 Unit       | Tidak Ada |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                 |             |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       | 8 Unit      | 8 Unit       | Tidak Ada                                                                                                             |                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | 77 Unit     | 77 Unit      | Tidak Ada                                                                                                             |                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                | 105 Paket   | 105 Paket    | Tidak Ada                                                                                                             |                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 5 Paket     | 4,75 Paket   | Pemakaian oksigen untuk pasien rawat inap kurang dari target yang di buat                                             | menghitung kembali jumlah kebutuhan pemakaian oksigen pada pasien rawat inap untuk tahun selanjutnya                                |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>100%</b> | <b>93.2%</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |  | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               | 1 Dokumen   | 1 Dokumen    | Jumlah Kunjungan dokter Spesialis Paruh Waktu tidak tercapai di akibatkan pemutusan kontrak beberapa dokter kunjungan | mencari pengganti dokter spesialis yang putus kontrak serta menghitung dengan seksama jumlah kunjungan dokter spesialis paruh waktu |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                         |             |             |                                                     |   |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                                                                                                                         |             |             | paruh waktu dan beberapa dokter yang melakukan cuti |   |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                     |   |  |
|  |  |  |  | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                     |   |  |
|  |  |  |  | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                        | 97 Orang    | 97 Orang    | Tidak Ada                                           |   |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                         |             |             | -                                                   | - |  |

Sumber : Rsud Suryah Khaidruddin Kab. Tanjung Jabung Barat

4. Urusan Kesehatan; Rumah Sakit KH. Daud Arif

Tabel 3.4  
Rumah Sakit KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
RSUD KH. DAUD ARIF KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA             | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | TARGET        | REALISASI     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
|-----|---------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                         | 4         | 5                                                                      | 6             | 7             | 8            | 9                            | 10                              |
| 1   | Bidang Kesehatan    | RSUD KH. Daud Arif        |           | 01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 100%          | 98.33%        |              |                              |                                 |
|     |                     | Kab. Tanjung Jabung Barat |           | 2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%          | 100%          |              |                              |                                 |
|     |                     |                           |           | 0001. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     |              |                              |                                 |
|     |                     |                           |           | 2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100%          | 100%          |              |                              |                                 |
|     |                     |                           |           | 0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 155 Orang/Bln | 155 Orang/Bln |              |                              |                                 |
|     |                     |                           |           | 0002. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     |              |                              |                                 |
|     |                     |                           |           | 2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat                               | 100%          | 100%          |              |                              |                                 |

|  |  |  |  |                                                                               |             |                |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Daerah</b>                                                                 |             |                |  |  |  |
|  |  |  |  | 0002. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | 3 Paket     | 3 Paket        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b>    |  |  |  |
|  |  |  |  | 0001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor      | 2 Paket     | 2 Paket        |  |  |  |
|  |  |  |  | 0002. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 2 Paket     | 2 Paket        |  |  |  |
|  |  |  |  | 0003. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | 1 Paket     | 1 Paket        |  |  |  |
|  |  |  |  | 0004. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 1 Paket     | 1 Paket        |  |  |  |
|  |  |  |  | 0005. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 1 Paket     | 1 Paket        |  |  |  |
|  |  |  |  | 0006. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan               | 1 Dokumen   | 1 Dokumen      |  |  |  |
|  |  |  |  | 0009. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                    | 1 Laporan   | 1 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>75%</b>  | <b>100%</b>    |  |  |  |
|  |  |  |  | 0006. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 12 Unit     | 12 Unit        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>100%</b> | <b>100.00%</b> |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                          |             |               |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
|  |  |  |  | 0001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1 Laporan   | 1 Laporan     |  |  |  |
|  |  |  |  | 0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1 Laporan   | 1 Laporan     |  |  |  |
|  |  |  |  | 0004. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2 Laporan   | 2 Laporan     |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>100%</b> | <b>94.65%</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | 0001. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit      | 1 Unit        |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 0002. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 17 Unit | 12 Unit | semula di rencanakan Pemeliharaan 17 Unit Kendaraan, namun Kendaraan yang dipelihara sebanyak 8 unit yang akan dilakukan pemeliharaan beberapa kali, sebagai berikut :<br>> Pemeliharaan Ambulance 3 Unit X 2 kali pemeliharaan<br>> mobil Jenazah 2 Unit X 3 Kali Pemeliharaan<br>> Mobil UTD 1 Unit X 1 Kali Pemeliharaan<br>> Mobil Operasional 2 Unit X 2 Kali Pemeliharaan<br>Dari rencana 17 kali pemeliharaan terealisasi hanya 12 kali yang terdiri dari :<br>> Pemeliharaan Ambulance 3 Unit X 1 kali pemeliharaan<br>> mobil Jenazah 2 Unit X 3 Kali Pemeliharaan<br>> Mobil UTD 1 Unit X 1 Kali Pemeliharaan<br>> Mobil Operasional 2 Unit X 1 Kali | Pengadaan Mobil Ambulance pada tahun berikutnya |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                              |            |                |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |                                                                                                              |            |                | Pemeliharaan<br>Beberapa kendaraan<br>yang dipelihara kondisi<br>nya kurang baik<br>Pemeliharaan<br>terkendala karena<br>Intensitas penggunaan<br>kendaraan yang cukup<br>tinggi |  |  |
|  |  |  |  | 0006. Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                            | 2 Unit     | 2 Unit         |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|  |  |  |  | 0009. Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                    | 8 Unit     | 8 Unit         |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|  |  |  |  | 0011. Pemeliharaan/ Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | 6 Unit     | 6 Unit         |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|  |  |  |  | <b>2.10. Peningkatan Pelayanan<br/>BLUD</b>                                                                  | <b>85%</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                       |              |              |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|  |  |  |  | 0001. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                | <b>1 RS</b>  | <b>1 RS</b>  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>              | <b>1 RS</b>  | <b>1 RS</b>  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0014. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | 30 Unit      | 30 Unit      |  |  |  |
|  |  |  |  | 0015. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                       | 6 Unit       | 6 Unit       |  |  |  |
|  |  |  |  | 0020. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                | 85 Unit      | 85 Unit      |  |  |  |
|  |  |  |  | 0022. Pengembangan Rumah Sakit                                                                                        | 2 Unit       | 2 Unit       |  |  |  |
|  |  |  |  | 0023. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 2 Paket      | 2 Paket      |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>1 RS</b>  | <b>1 RS</b>  |  |  |  |

|  |  |  |  |                                   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :<br>1. Sulit mencari dokter spesialis<br>2. rencana 3 dokter spesialis yang akan kontrak kunjungan ( Sp.Anak 1 orang, Sp.Radiologi 1 orang, dan dokter Sp.P.Dalam 1 Orang) tidak terealisasi | > Usulan Kebutuhan Dokter Spesialis dan SubSpesialis<br>> Tubel dokter Umum untuk pendidikan Spesialis. |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber : Rsud KH. Daud Arif Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Urusan Pekerjaan Umum; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.5.

Dinas Pekerjaan Umum.

dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN               | OPD PELAKSANA                           | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | TARGET | REALISASI |    |         | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|---------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                                   |                                         |           |                                                                                       |        |           |    |         |              |                              |                                |
|    | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 12     | bulan     | 12 | bulan   | 100.00 %     |                              |                                |
|    |                                   |                                         |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 12     | bulan     | 12 | bulan   | 100.00 %     |                              |                                |
|    |                                   |                                         |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 8      | Dokumen   | 8  | Dokumen | 100.00 %     |                              |                                |
|    |                                   |                                         |           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 5      | Dokumen   | 5  | Dokumen | 100.00 %     |                              |                                |
|    |                                   |                                         |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12     | Laporan   | 12 | Laporan | 100.00 %     |                              |                                |

|  |  |  |  |                                                                                 |    |         |    |         |          |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|----------|--|--|--|
|  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | 5  | Laporan | 5  | Laporan | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |                                                                                 |    |         |    |         |          |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | 12 | bulan   | 12 | bulan   | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 53 | Orang   | 55 | Orang   | 103.77 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 16 | Laporan | 16 | Laporan | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |                                                                                 |    |         |    |         |          |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 2  | Laporan | 2  | Laporan | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |                                                                                 |    |         |    |         |          |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                      | 1  | Laporan | 1  | Laporan | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                          | 1  | Laporan | 1  | Laporan | 100.00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |                                                                                 |    |         |    |         |          |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100.00 % |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                  |     |          |     |         |          |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | 274 | Stel     | 120 | Stel    | 43.80 %  | Pakaian dinas di anggarkan 2 stel/pegawai. Ternyata yang di setuju untuk di anggarkan hanya 1 stel | akan berusaha menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebutuhan | Agar diisi permasalahan |
|  |  |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | 1   | Doku men | 1   | Dokumen | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12  | Bulan    | 12  | Bulan   | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60  | Set      | 60  | Set     | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 12  | Bulan    | 12  | Bulan   | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 12  | Bulan    | 12  | Bulan   | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 12  | Bulan    | 12  | Bulan   | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 5   | Doku men | 5   | Dokumen | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 12  | Lapor an | 12  | Laporan | 100.00 % |                                                                                                    |                                                                  |                         |

|  |  |  |  |                                                                       |    |             |    |         |             |                                                                                 |                                                                           |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 12 | Doku<br>men | 12 | Dokumen | 100.00<br>% |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                       |    |             |    |         |             |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 21 | Unit        | 35 | Unit    | 166.67<br>% | Pengadaan /pembelian baru pada peralatan kantor diperuntukkan untuk kantor PKK. | akan mendata ulang peralatan kantor yang sudah dihibahkan ke kantor lain. |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 10 | Unit        | 35 | Unit    | 350.00<br>% |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                       |    |             |    |         |             |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 | Bulan       | 12 | Bulan   | 100.00<br>% |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 20 | Lapor<br>an | 20 | Laporan | 100.00<br>% |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 12 | Lapor<br>an | 12 | Laporan | 100.00<br>% |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 12 | Lapor<br>an | 12 | Laporan | 100.00<br>% |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                       |    |             |    |         |             |                                                                                 |                                                                           |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 69 | Unit        | 69 | Unit    | 100.00<br>% |                                                                                 |                                                                           |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                     |       |      |    |      |          |                                                                                              |                                |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5     | Unit | 5  | Unit | 100.00 % |                                                                                              |                                |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                           | 5     | Unit | 5  | Unit | 100.00 % |                                                                                              |                                |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 57    | Unit | 57 | Unit | 100.00 % |                                                                                              |                                |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 2     | Unit | 1  | Unit | 50.00 %  | rencana awal pemeliharaan gedung akan dilakukan bertahap, pada APBD murni dan APBD perubahan | perencanaan lebih detail lagi. |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                     |       |      |    |      |          |                                                                                              |                                |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                    | 60    | %    | 65 | %    | 108.33 % |                                                                                              |                                |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 70    | %    | 70 | %    | 100.00 % |                                                                                              |                                |  |
|  |  |  |  | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                        | 22.82 | Km   | ## | Km   | 112.36 % | dibantu dengan peralatan amfibi                                                              | pekerjaan lebih mudah          |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                       |       |             |    |         |          |                                 |                       |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|
|  |  |  |  | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                           | 22.82 | Km          | ## | Km      | 138.71 % | dibantu dengan paralatan amfibi | pekerjaan lebih mudah |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                       |       |             |    |         |          |                                 |                       |  |
|  |  |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 80    | %           | 85 | %       | 106.25 % |                                 |                       |  |
|  |  |  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                    | 10    | Km          | 24 | Km      | 235.00 % | dibantu dengan paralatan amfibi | pekerjaan lebih mudah |  |
|  |  |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                        | 20    | Km          | 31 | Km      | 157.00 % | dibantu dengan paralatan amfibi | pekerjaan lebih mudah |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                       |       |             |    |         |          |                                 |                       |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                                                               | 85    | %           | 88 | %       | 103.15 % |                                 |                       |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                              | 2050  | SR          | 0  |         | 66.67 %  | dana anggaran tidak mencukupi   | penambahan anggaran   |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                 | 3     | Doku<br>men | 2  | Dokumen | 66.67 %  | dana anggaran tidak mencukupi   | penambahan anggaran   |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                       |      |             |    |         |          |                                                                                                                           |                                                          |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Pembangunan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                     | 2050 | SR          | 0  | SR      | 0.00%    | belum teranggarkan untuk pembangunan SPAM Jaringan perpipaan. Dana yang tersedia hanya untuk penggantian pipa distribusi. | Diajukan kembali untuk di anggarkan di tahun berikut nya |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                       |      |             |    |         |          |                                                                                                                           |                                                          |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                               |      | 100 %       |    | 100 %   |          | 100.00%                                                                                                                   |                                                          |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 20   | Unit        | 48 | Unit    | 240.00 % |                                                                                                                           |                                                          |  |
|  |  |  |  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                              | 15   | Doku<br>men | 16 | Dokumen | 106.67 % | banyak bangunan yang harus diperbarui                                                                                     | pendataan bangunan gedung yang akan diperbarui           |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |     |         |             |                                                                                                                                                                    |                                                     |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 120 | Doku<br>men | 558 | Dokumen | 465.00<br>% | meningkatnya kesadaran masyarakat dan di dukung kemudahan dalam pengurusan izin IMB melalui OSS sehingga meningkatnya permintaan rekomendasi IMB yang di keluarkan | pendataan berkala untuk persetujuan bangunan gedung |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |     |         |             |                                                                                                                                                                    |                                                     |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>JALAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 49  | %           | 47  | %       | 95.65<br>%  |                                                                                                                                                                    |                                                     |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  | Km          | 79  | Km      | 158.00<br>% |                                                                                                                                                                    |                                                     |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                             | 5   | Doku<br>men | 14  | Dokumen | 280.00<br>% |                                                                                                                                                                    |                                                     |  |

|  |  |  |  |                                 |    |             |     |         |          |                                                                                                 |                                                 |  |
|--|--|--|--|---------------------------------|----|-------------|-----|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Rehabilitasi Jembatan           | 10 | Unit        | 4   | Unit    | 40.00 %  | kurangnya anggaran untuk penanganan rehabilitasi jembatan                                       | perlu di rehabilitasi, terbatas dengan anggaran |  |
|  |  |  |  | Rekonstruksi Jalan              | 30 | Km          | 73  | Km      | 242.33 % |                                                                                                 |                                                 |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Berkala Jalan      | 10 | Km          | 6.2 | Km      | 62.00 %  | dana anggaran tidak mencukupi                                                                   | penambahan anggaran                             |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin Jembatan     | 10 | Unit        | 12  | Unit    | 120.00 % |                                                                                                 |                                                 |  |
|  |  |  |  | Pembangunan Jembatan            | 7  | Unit        | 1   | Unit    | 14.29 %  | dana yang dibutuhkan untuk pembangunan 1 unit jembatan sangat besar                             | penambahan anggaran                             |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin Jalan        | 10 | Km          | 39  | Km      | 390.00 % | Pelaksanaan dilaksanakan secara swakelola, sehingga lebih banyak panjang jalan yang terpelihara | anggaran tersedia                               |  |
|  |  |  |  | Survey Kondisi Jalan / Jembatan | 1  | Doku<br>men | 1   | Dokumen | 100.00 % |                                                                                                 |                                                 |  |
|  |  |  |  |                                 |    |             |     |         |          |                                                                                                 |                                                 |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN            |    | 18          | %   | 26      | %        | 108.02%                                                                                         |                                                 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                |       |          |     |         |          |                                                       |                           |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|---------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>JASA KONSTRUKSI</b>                                                                         |       |          |     |         |          |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                           | 20.63 | %        | 26  | %       | 126.03 % |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis            | 200   | Org      | 180 | Org     | 90.00 %  |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                |       |          |     |         |          |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                  | 5     | Doku men | 3   | Dokumen | 60.00 %  |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 4     | Doku men | 3   | Dokumen | 75.00 %  |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                    | 3     | Doku men | 1   | Dokumen | 33.33 %  | Kurangnya permintaan izin rekom ruang oleh masyarakat |                           |  |
|  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang                     | 2     | Doku men | 2   | Dokumen | 100.00 % |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                |       |          |     |         |          |                                                       |                           |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | 45    | doku men | 6   | dokumen | 13.33 %  | Kurangnya permintaan izin rekom ruang oleh masyarakat | Sosialisasi ke masyarakat |  |

|  |  |  |  |                                                   |    |         |           |         |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------|--|--|--|
|  |  |  |  | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 45 | dokumen | 6 dokumen | 13.33 % |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------|--|--|--|

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Barat

6. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.6.  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024  
Capaian Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

| No | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA  | KEBIJAKAN                                                                                                                                                           | URAIAN PROG/KEG                                                        | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD | KET |
|----|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----|
| 1  |                     | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>           |                |                |              |                              |                         |     |
|    |                     |                                        |                                                                                                                                                                     | <b>Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | 100%           | 100%           |              |                              |                         |     |
|    |                     |                                        |                                                                                                                                                                     | Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | 7 Laporan      | 7 Laporan      |              |                              |                         |     |
|    |                     |                                        |                                                                                                                                                                     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | 100%           | 100%           |              |                              |                         |     |
|    |                     |                                        |                                                                                                                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan |              |                              |                         |     |

|  |  |  |                                                                                                                   |                                                                  |             |             |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Tata kelola pemerintahan daerah yang baik mempunyai peranan penting untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 25 Dokumen  | 25 Dokumen  |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut                          | 130 Paket   | 130 Paket   |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | 16 Orang    | 16 Orang    |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Paket    | 12 Paket    |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 12 Paket    | 12 Paket    |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 12 Paket    | 12 Paket    |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 12 Paket    | 12 Paket    |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan       | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |                                                                                                                                                                               |                                                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 360 Laporan | 300 Laporan | Dalam Penganggaran di SIPD, Kegiatan Ini dilakukan secara terperinci berdasarkan Eselon dan per Hari, Sehingga ini sedikit menyulitkan Pembagian dari Dana dari setiap Eselon | Dinas Perkim Akan Lebih Teliti dan Mengaggarkan sesuai dengan Kebutuhan. |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                 |             |             |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>                                                           | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 33 unit     | 33 unit     |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 500 Laporan | 500 Laporan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik                                                              | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan                              | 6 unit      | 6 unit      |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15 unit     | 15 unit     |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 33 unit     | 33 unit     |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan LAinnya                                                    | 1 unit      | 1 unit      |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                           |             |             |  |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                        |                     |                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota            | 2 Dokumen           | 2 Dokumen           |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                   | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>          | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                         | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana                                                                  | 2 unit rumah tangga | 2 unit rumah tangga |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                      |                     |                     |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                    | 6 Dokumen           | 6 Dokumen           |  |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                           |                       |                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Pembentukan/Pembinaan Kelompok swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                     | 6 kelompok masyarakat | 6 kelompok masyarakat |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b> | <b>100%</b>           | <b>97.50%</b>         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                   | 80 unit rumah         | 78 unit rumah         | Terdapat 2 Penerima Bantuan tidak terealisasi dikarenakan penerima bantuan telah mendapatkan bantuan kegiatan Bedah Rumah Lainnya berupa Kegiatan DUMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2024 | Dinas Perkim akan melakukan koordinasi kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait Penerima Bantuan Kegiatan Dumisake agar tidak terjadi double pencatatan |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Pemerajaan Permukiman Kumuh                             | 1 Ha                  | 3,98 Ha               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>                                     |                       |                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>       | <b>100%</b>           | <b>97.85%</b>         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 140 unit rumah | 137 unit rumah | Terdapat 3 Penerima Bantuan tidak terealisasi dikarenakan penerima bantuan telah mendapatkan bantuan kegiatan Bedah Rumah Lainnya berupa Kegiatan DUMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2024 | Dinas Perkim akan melakukan koordinasi kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait Penerima Bantuan Kegiatan Dumisake agar tidak terjadi double pencatatan |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARAN ,SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                                                                                                | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                       | 21 Dokumen     | 21 Dokumen     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian                                                                                 | 892 Lokasi     | 892 Lokasi     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | Verifikasi dan Penyerahana PSU Permukiman dari Pengembang                                                                                                                  | 1 Laporan      | 1 Laporan      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |  |  |

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat

7. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Badan Penanggulangan Bencana

Tabel 3.7.  
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung  
Jabung BaratTahun Anggaran 2024  
Capaian Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

| URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                         | OPD PELAKSANA                                                      | KEBIJAKAN                                                | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                            | Target       | REALISASI    | PERMASALAHAN      | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                                                                  | 3                                                        | 4                                                                 | 5            | 6            | 7                 | 8                            | 9                              |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR 'MEWUJUDKAN KONDISI SOSIAL YANG TENTRAM , TERTIB DAN HARMONIS' | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | Terwujudnya Masyarakat Yang Tentram, Tertib dan Harmonis | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |              |              |                   |                              |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |              |                   |                              |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                   | 40 Dokumen   | 40 Dokumen   | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |              |              |                   |                              |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 21 Orang PNS | 21 Orang PNS | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen   | 12 Dokumen   | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |              |              |                   |                              |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | 100 Paket    | 100 Paket    | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |              |              |                   |                              |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 Paket     | 12 Paket     | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 12 Paket     | 12 Paket     | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 12 Paket     | 12 Paket     | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | 12 Paket     | 12 Paket     | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah            |                                |

|                                                                                                                    |            |            |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |            |            |                   |                   |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.                                                           | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |            |            |                   |                   |  |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 25 Unit    | 25 Unit    | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan  | 25 Unit    | 25 Unit    | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | 7 Unit     | 7 Unit     | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                              |            |            |                   |                   |  |
| <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</b>                                                           |            |            |                   |                   |  |
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana )           | 120 Orang  | 120 Orang  | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota                                                                       | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                 | 3 Laporan  | 3 Laporan  | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |
| Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota                                                         | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Tidak ada Masalah | Tidak ada Masalah |  |

Sumber : BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat

8. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 3.8.  
Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKabupaten Tanjung  
Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| NO   | URUSAN PEMERINTAHAN                                           | OPD PELAKSANA                                                           | Kebijakan | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |                                                                  | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN                                                                                         | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat |           | 01                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA        |            |            |                                                                                                      |                                |                                |
|      |                                                               |                                                                         |           | 2.01                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |            |                                                                                                      |                                |                                |
|      |                                                               |                                                                         |           | 00001                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 100%       | 100%       | Memaksimalkan anggaran yang ada                                                                      | Diperlukan penambahan anggaran |                                |
|      |                                                               |                                                                         |           |                                          |                                                                  | 10 Dokumen | 10 Dokumen |                                                                                                      |                                |                                |
|      |                                                               |                                                                         |           | 2.02                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |            |            |                                                                                                      |                                |                                |
|      |                                                               |                                                                         |           | 0001                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 100%       | 100%       | Realisasi jumlah anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menyesuaikan dengan jumlah ASN yang ada. | Menyesuaikan jumlah ASN        |                                |
|      |                                                               |                                                                         |           |                                          |                                                                  | 32 orang   | 24 Orang   |                                                                                                      |                                |                                |
| 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan                           | 100%                                                                    | 100%      | Memaksimalkan                            | Diperlukan                                                       |            |            |                                                                                                      |                                |                                |

|  |  |  |  |      |                                                                    |               |               |                                                                                                                                        |                                |  |
|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |  |  |  |      | Tugas ASN                                                          | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | anggaran yang<br>ada                                                                                                                   | penambahan<br>anggaran         |  |
|  |  |  |  | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          |               |               |                                                                                                                                        |                                |  |
|  |  |  |  | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | 100%          | 100%          | Memaksimalkan anggaran yang ada                                                                                                        | -                              |  |
|  |  |  |  |      |                                                                    | 5 Paket       | 5 Paket       |                                                                                                                                        |                                |  |
|  |  |  |  | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |               |               |                                                                                                                                        |                                |  |
|  |  |  |  | 0001 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 100%          | 100%          | Memaksimalkan anggaran yang ada                                                                                                        | -                              |  |
|  |  |  |  |      |                                                                    | 12 Paket      | 12 Paket      |                                                                                                                                        |                                |  |
|  |  |  |  | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 100%          | 100%          | Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran namun, masih dibutuhkan anggaran agar dapat berjalan dengan maksimal | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |      |                                                                    | 12 Paket      | 12 Paket      |                                                                                                                                        |                                |  |
|  |  |  |  | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 100%          | 100%          | Memaksimalkan anggaran yang ada                                                                                                        | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |      |                                                                    | 12 Paket      | 12 Paket      |                                                                                                                                        |                                |  |
|  |  |  |  | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | 100%          | 100%          | Memaksimalkan anggaran yang ada                                                                                                        | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |      |                                                                    | 12 Paket      | 12 Paket      |                                                                                                                                        |                                |  |
|  |  |  |  | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                               | 100%          | 100%          | Pada Sub                                                                                                                               | Diupayakan                     |  |

|       |                                                                    |               |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|       | Konsultasi SKPD                                                    | 12<br>Laporan | 12 Laporan | Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diharapkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan, untuk itu sangat diperlukan adanya penambahan anggaran di tahun yang akan datang. | penambahan anggaran            |   |
| 2.07  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |               |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                |   |
| 0006  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 100%          | 100%       | Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran                                                                                                                                                           | Diupayakan penambahan anggaran |   |
|       |                                                                    | 5 Unit        | 5 Unit     |                                                                                                                                                                                                                             |                                |   |
| 00010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100%          | 100%       | Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran                                                                                                                                                           | Diupayakan penambahan anggaran |   |
|       |                                                                    | 2 Unit        | 2 Unit     |                                                                                                                                                                                                                             |                                |   |
| 2.08  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |               |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                |   |
| 0001  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 100%          | 100%       | Jumlah anggaran                                                                                                                                                                                                             | Diupayakan                     | - |

|  |  |  |  |      |                                                                                                                          |               |            |                                                                                                                                                                                          |                                                   |   |
|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
|  |  |  |  |      |                                                                                                                          | 12<br>Laporan | 12 Laporan | yang ditargetkan<br>sesuai dengan<br>realisasi anggaran                                                                                                                                  | penambahan<br>anggaran                            |   |
|  |  |  |  | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                               | 100%          | 100%       | Memaksimalkan<br>anggaran yang<br>ada sesuai dengan<br>jumlah<br>penggunaan                                                                                                              | Diupayakan<br>penambahan<br>anggaran              | - |
|  |  |  |  |      | 12<br>Laporan                                                                                                            | 12 Laporan    |            |                                                                                                                                                                                          |                                                   |   |
|  |  |  |  | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | 100%          | 100%       | Jumlah anggaran<br>yang ditargetkan<br>sesuai dengan<br>realisasi anggaran                                                                                                               | Diupayakan<br>penambahan<br>anggaran              | - |
|  |  |  |  |      | 12<br>Laporan                                                                                                            | 12 Laporan    |            |                                                                                                                                                                                          |                                                   |   |
|  |  |  |  | 2.09 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                     |               |            |                                                                                                                                                                                          |                                                   |   |
|  |  |  |  | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan | 100%          | 100%       | Diperlukan<br>peningkatan<br>anggaran agar<br>mampu<br>menunjang<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Anggaran<br>pemeliharaan<br>perlu<br>ditingkatkan | - |
|  |  |  |  |      | 27 Unit                                                                                                                  | 27 Unit       |            |                                                                                                                                                                                          |                                                   |   |
|  |  |  |  | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                         | 100%          | 100%       | Diperlukan                                                                                                                                                                               | Anggaran                                          |   |

|  |  |  |      |                                                                                                                                              |            |            |                                                                                                         |                                          |   |
|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
|  |  |  |      | Lainnya                                                                                                                                      | 15 Unit    | 15 Unit    | peningkatan anggaran agar mampu menunjang Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya                     | pemeliharaan perlu ditingkatkan          |   |
|  |  |  | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 | 100%       | 100%       | Belum maksimal dalam pemeliharaan gedung kantor                                                         | Anggaran pemeliharaan perlu ditingkatkan | - |
|  |  |  | 04   | <b>PROGRAM PENCEGAHAN ,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMTAN NON KEBAKARAN</b>                                               |            |            |                                                                                                         |                                          |   |
|  |  |  | 2.01 | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota</b> |            |            |                                                                                                         |                                          |   |
|  |  |  | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | 100%       | 100%       | Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Operasional di Lapangan lebih maksimal. | Diupayakan penambahan anggaran           |   |
|  |  |  | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 100%       | 100%       | Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Operasional di                          | Diupayakan penambahan anggaran           |   |
|  |  |  |      |                                                                                                                                              | 12 Dokumen | 12 Dokumen |                                                                                                         |                                          |   |
|  |  |  |      |                                                                                                                                              | 12 Laporan | 12 Laporan |                                                                                                         |                                          |   |

|  |  |  |  |      |                                                                                                |            |      |                                                                                                                                     |                                |  |
|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |  |  |  |      |                                                                                                |            |      | Lapangan lebih maksimal.                                                                                                            |                                |  |
|  |  |  |  | 0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                   | 100%       | 100% | Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Operasional di Lapangan lebih maksimal.                             | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |      | 12 Dokumen                                                                                     | 12 Dokumen |      |                                                                                                                                     |                                |  |
|  |  |  |  | 0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 100%       | 100% | Masih diperlukan standarisasi Sarana Prasarana di 6 Pos Damkar sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk tahun yang akan datang | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |      | 12 Dokumen                                                                                     | 12 Dokumen |      |                                                                                                                                     |                                |  |
|  |  |  |  | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                           | 100%       | 100% | Masih banyak Aparatur Pemadam Kebakaran yang belum tersertifikasi sehingga diperlukan adanya pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |      | 100 orang                                                                                      | 100 orang  |      |                                                                                                                                     |                                |  |

|       |                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                   |                                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 00017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | 100%       | 100%       | Masih membutuhkan Sarana Prasarana pendukung di 6 Pos Damkar sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk tahun yang akan datang | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|       |                                                                                                                                                                                        | 10 unit    | 10 unit    |                                                                                                                                   |                                |  |
| 00018 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 100%       | 100%       | Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran                                                                 | -                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |                                                                                                                                   |                                |  |
| 2.02  | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                                   |                                |  |
| 0001  | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                          | 100%       | 100%       | Diperlukan adanya penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan Pendataan terhadap Sapras di Lapangan lebih maksimal              | Diupayakan penambahan anggaran |  |
|       |                                                                                                                                                                                        | 12 Dokumen | 12 Dokumen |                                                                                                                                   |                                |  |
| 0002  | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                          | 100%       | 100%       | Diperlukan adanya penambahan                                                                                                      |                                |  |

|  |  |  |  |      |                                                                                                                  |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |  |
|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|  |  |  |  |      |                                                                                                                  | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | anggaran agar pelaksanaan kegiatan Penilaian terhadap Sapras Operasional di Lapangan lebih maksimal                                                                                                                                                            |                            |  |
|  |  |  |  | 2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |  |
|  |  |  |  | 0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    | 100%          | 100%          | Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran                                                                                                                                                                                              | -                          |  |
|  |  |  |  |      |                                                                                                                  | 1<br>Dokumen  | 1<br>Dokumen  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |  |
|  |  |  |  | 2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |  |
|  |  |  |  | 0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 100%          | 100%          | Jumlah anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi anggaran, namun pelaksanaan masih belum maksimal, masih terdapat Desa yang belum diadakan sosialisasi. Pada Tahun 2024 sudah dilakukan Sosialisasi di 2 Kelurahan yaitu Patunas dan Kelurahan Tungkal | Adanya penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |      |                                                                                                                  | 100 orang     | 100 orang     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |  |

|  |  |  |  |                          |                                                     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |  |
|--|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|  |  |  |  |                          |                                                     |                   |                   | V. Sehingga pelaksanaan masih belum merata ke seluruh Kelurahan/Desa.                                                                                                                                                                                                                       |                            |  |
|  |  |  |  | 0002                     | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 100%              | 100%              | Relawan Kebakaran yang telah dikukuhkan berjumlah 400 orang. Total seluruh relawan kebakaran berjumlah 1.546 orang dan yang telah terdata di Aplikasi SiPadam berjumlah 210 orang. Namun, untuk pelaksanaan Pembinaan belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran. | Adanya penambahan anggaran |  |
|  |  |  |  |                          |                                                     | 4 Desa/ Kelurahan | 4 Desa/ Kelurahan |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |  |
|  |  |  |  | JUMLAH TOTAL 12 KEGIATAN |                                                     | 100%              | 100%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |  |

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat

9. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.9.  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun Anggaran 2024

| CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN<br>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                                                                 |                            |                                                                                                               |                                                                                       |            |            |                        |                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| NO                                                                                                              | URUSAN PEMERINTAHAN                                             | OPD PELAKSANA              | KEBIJAKAN                                                                                                     | URAIAN PROGRAM                                                                        | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN           | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | PENJELASAN CAPAIAN PROGRAM |
| 1                                                                                                               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Tatanan kehidupan bermasyarakat at yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                          |            |            |                        |                              |                            |
|                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                                                                                               | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |            |            |                        |                              |                            |
|                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                                                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada permasalahan |                              | Tidak ada permasalahan     |
|                                                                                                                 |                                                                 |                            |                                                                                                               | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat                                              |            |            |                        |                              |                            |

|  |  |  |                                                                   |                |                |                        |  |  |                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>Daerah</b>                                                     |                |                |                        |  |  |                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 30 Orang/Bulan | 26 Orang/Bulan |                        |  |  | Terdapat sisa karna adanya PNS yang pensiun                                                                                                         |
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen     | 12 Dokumen     |                        |  |  | Terdapat Honor Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak bisa dibayarkan karena menerima Honor PPTK                                                       |
|  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>         |                |                |                        |  |  |                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | 2 Paket        | 2 Paket        | Tidak ada permasalahan |  |  | terdapat sisa pada belanja barang karena ada PNS yang pensiun                                                                                       |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | 35 Orang       | 35 Orang       | Tidak ada permasalahan |  |  | Sesuai Dengan Perpres nomor 33 Tahun 2020 bahwa jasa pelatih yang berasal dari dalam OPD di bayarkan 50% dari honor yang tetera di DPA sub kegiatan |
|  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                |                |                |                        |  |  |                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 11 Paket       | 11 Paket       | Tidak ada permasalahan |  |  | Tidak ada permasalahan                                                                                                                              |

|  |  |  |                                                                                    |            |            |                        |  |                                                                                                   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 77 Paket   | 77 Paket   | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                            |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 3 Paket    | 3 Paket    |                        |  | makan minum rapat tidak terealisasi seluruhnya sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020                 |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            | 10 Paket   | 10 Paket   |                        |  | Belanja Barang Cetak digunakan sesuai Kebutuhan                                                   |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                           | 12 Dokumen | 12 Dokumen |                        |  | Belanja pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan | 12 Laporan |                        |  | belanja perjalanan dinas Luar daerah di laksanakan sesuai dengan kebutuhan                        |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |            |            |                        |  |                                                                                                   |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                    | 17 Unit    | 17 Unit    | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                            |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | 8 Unit     | 8 Unit     | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                            |

|  |  |  |                                                                                                                    |            |            |                        |  |                                                                                        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Kegiatan<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                       |            |            |                        |  |                                                                                        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada permasalahan |  | Sedikitnya penggunaan jasa pengiriman surat menyurat melalui Pos                       |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                 |
|  |  |  | Kegiatan<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                |            |            |                        |  |                                                                                        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9 Unit     | 9 Unit     |                        |  | terdapat sisa pada penggantian pelumas kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan dinas. |

|  |  |  |  |                                                                                                                 |         |         |                        |  |                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 Unit  | 5 Unit  |                        |  | pembayaran tidak dilaksanakan atas 2 unit kendaraan roda empat yang dimasukkan dalam usulan penjualan kendaraan dinas |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 15 Unit | 15 Unit | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                                                |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | 1 Unit  | 1 Unit  | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                                                |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                      |         |         |                        |  |                                                                                                                       |
|  |  |  |  | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota              |         |         |                        |  |                                                                                                                       |

|  |  |  |                                                                                                                                                           |           |           |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota                                          | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Tidak ada permasalahan |  | Tidak ada permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                         | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                        |  | a. Penggunaan ATK dan Bahan Cetak sesuai kebutuhan<br>b. Pembayaran Honorarium Narasumber yang disesuaikan dengan Perpres No. 33 Tahun 2020<br>c. Pembayaran Uang Saku Peserta yang disesuaikan dengan jumlah kehadiran peserta                                                       |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 30 Orang  | 30 Orang  |                        |  | Sesuai dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, untuk narasumber dan pelatih berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan honor sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium yang tercantum dalam DPA Satpol PP Tahun 2024. |
|  |  |  | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan                                                                              | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                        |  | Tidak ada permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                              |            |            |                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | gangguan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                                                     |            |            |                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |                        |  |  | a. Penggunaan ATK dan Bahan Cetak sesuai Kebutuhan<br>b. Makan/Minum Rapat tidak di klaim sesuai dengan Perpres No. 33 tahun 2020                                                                                                                                |
|  |  |  | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 12 Laporan | 12 Laporan |                        |  |  | terdapat sisa penggunaan Dana pengamanan Pilkada :<br>a. Sisa Dana Hibah pengamanan Pilkada Polres Tanjab Barat<br>b. Tidak Ada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Dana PSU)<br>c. Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan Pilkada oleh Satpol PP sesuai dengan Tahapan |
|  |  |  | Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa       | 12 Laporan | 12 Laporan |                        |  |  | a. Penggunaan ATK sesuai dengan kebutuhan dan Pemakaian<br>b. Makan/Minum yang digunakan sesuai dengan jumlah petugas pengamanan dan jumlah unjuk rasa yang dilakukan pengamanan                                                                                 |
|  |  |  | Penyediaan Layanan dalam                                                                                                                                     | 1 Laporan  | 1 Laporan  | Tidak ada permasalahan |  |  | Tidak ada warga yang terkena dampak akibat kegiatan penegakan perda dan                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |                                                                                          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada                                               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | perkada                                                                                                                                                                 |
|  |  |  |  | Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum          | 17 Unit   | 17 Unit   | Tidak ada permasalahan                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Tidak ada permasalahan                                                                                                                                                  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b> |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota                    | 1 Laporan | 1 Laporan | Harga Belanja ATK, Biaya Cetak dan Benda Pos dari penyedia lebih rendah dari anggaran yang tersedia. Untuk Belanja Jasa Tenaga Pengajar yang berasal dari internal OPD, Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 hanya boleh di bayarkan sebesar 50% | Akan di lakukan penyesuaian harga serta penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Tidak terealisasinya Belanja ATK, Belanja Cetak, Benda Pos/Materai. Kemudian tidak pada Belanja Jasa Tenaga Pengajar hanya Terealisasi Sebesar 50% (Lima Puluh Persen). |

|  |  |  |  |                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota         | 1 Laporan | 1 Laporan | Kelalaian Staf tidak melakukan Klaim atas sebagian Belanja BBM, Jumlah penyandang PMKS tidak dapat dipastikan dan Belanja Makan/Minum serta Jasa Petugas Penanganan pada 1 (satu) kali kegiatan, jumlah personil tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia | melakukan komunikasi yang lebih instens lagi dengan dinas terkait seperti Dinas sosial, dinas kesehatan, Kecamatan, Kelurahan / Desa hingga ke RT dan akan dilakukan penyesuaian jumlah personil dengan biaya Makan/Minum dan Jasa Petugas Penanganan. | Tidak terealisasinya Belanja BBM, Belanja Makan/Minum penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Belanja Makan/Minum Petugas dan Belanja Jasa Petugas Penanganan. |
|  |  |  |  | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati / Walikota | 1 Laporan | 1 Laporan | Adanya ketidaksesuaian Belanja BBM, Belanja Benda Pos, Belanja Makan/Minum dan Belanja Jasa Petugas pada 2 (dua) kali Kegiatan Pengawasan                                                                                                                   | Akan di lakukan penyesuaian antara Jumlah Personil Petugas Pengawasan dengan Anggaran yang tersedia                                                                                                                                                    | Tidak terealisasinya Belanja BBM, Belanja Benda Pos, Belanja Makan/Minum dan Belanja Jasa Petugas Pengawasan                                                           |

Sumber : Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

b. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar  
1. Urusan Sosial; Dinas Sosial

Tabel 3.10.  
Dinas Sosial  
Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN                                             | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                         | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | DINAS SOSIAL  |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |           |           |              |                              |                                |
|    |                                                                 |               |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                           | 7 Laporan | 7 Laporan |              |                              |                                |
|    |                                                                 |               |           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               | 4 Laporan | 4 Laporan |              |                              |                                |
|    |                                                                 |               |           | Administrasi                                                                                                                    |           |           |              |                              |                                |
|    | URUSAN                                                          |               |           |                                                                                                                                 |           |           |              |                              |                                |

|  |                               |  |  |                                                                              |            |            |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--|--|
|  | PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL |  |  | <b>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                         |            |            |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | 20 Orang   | 17 orang   | ASN Memasuki masa purna tugas |  |  |
|  |                               |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan |                               |  |  |
|  |                               |  |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                     |            |            |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya                                   | 279 Paket  | 279 Paket  |                               |  |  |
|  |                               |  |  | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</b>                                |            |            |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi                                                | 6 Paket    | 6 Paket    |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 12 Paket   | 12 Paket   |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | 4 Paket    | 4 Paket    |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 17 Paket   | 17 Paket   |                               |  |  |
|  |                               |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                                        | 12 Dokumen | 12 Dokumen |                               |  |  |

|  |  |  |                                                                         |             |             |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  |  | Perundang-undangan                                                      |             |             |  |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 432 Laporan | 432 Laporan |  |  |  |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |             |             |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | 2 Unit      | 2 Unit      |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                         | 31 Unit     | 31 Unit     |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                   | 22 Unit     | 22 Unit     |  |  |  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |             |             |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 laporan  | 12 laporan  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | 24 laporan  | 24 laporan  |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | 8 laporan   | 8 laporan   |  |  |  |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>                       |             |             |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                  |           |           |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                |           |           |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20 Unit   | 20 Unit   |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 36 Unit   | 36 Unit   |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 2 unit    | 2 Unit    |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                               |           |           |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota</b>                                          |           |           |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota             | 1 Lembaga | 1 Lembaga |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM REHABILITASI</b>                                                                                      |           |           |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                           |           |           |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  | <b>SOSIAL</b>                                                                                                                                             |           |           |  |  |  |
|  |  | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> |           |           |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                     | 750 ORANG | 750 ORANG |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Sandang                                                                                                                                        | 200 Orang | 200 Orang |  |  |  |
|  |  | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                    |           |           |  |  |  |
|  |  | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                 | 142 Orang | 156 Orang |  |  |  |
|  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                                                                            |           |           |  |  |  |
|  |  | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                        |           |           |  |  |  |

|  |  |                                                                                          |                    |                    |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
|  |  | Pendataan fakir<br>Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                      | 5.000 orang        | 60,293             |  |  |  |
|  |  | Pengelolaan Data<br>Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                     | 10.550<br>Keluarga | 13.142<br>keluarga |  |  |  |
|  |  | <b>PROGRAM<br/>PENANGANAN<br/>BENCANA</b>                                                |                    |                    |  |  |  |
|  |  | <b>Perlindungan<br/>Sosial Korban<br/>Bencana Alam dan<br/>Sosial<br/>Kabupaten/Kota</b> |                    |                    |  |  |  |
|  |  | Penyediaan<br>Makanan                                                                    | 550 orang          | 1.245 Orang        |  |  |  |
|  |  | Penyediaan sandang                                                                       | 550 orang          | 1.245 Orang        |  |  |  |
|  |  | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>TAMAN MAKAM<br/>PAHLAWAN</b>                              |                    |                    |  |  |  |
|  |  | <b>Pemeliharaan<br/>Taman Makam<br/>Pahlawan Nasional<br/>Kabupaten/Kota</b>             |                    |                    |  |  |  |
|  |  | Pemeliharaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan                                                  | 43 Makam           | 43 Makam           |  |  |  |
|  |  | Pengamanan Taman<br>Makam Pahlawan<br>Nasional Kab/Kota                                  | 1 laporan          | 1 laporan          |  |  |  |
|  |  |                                                                                          |                    |                    |  |  |  |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Tenaga Kerja; Dinas Tenaga Kerja

Tabel 3.11.  
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

| CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN<br>DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                      |                       |           |                                                                                                |                |                   |              |                                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| NO                                                                                                      | URUSAN<br>PEMERINTAH | OPD<br>PELAKSANA      | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>2024 | REALISASI<br>2024 | PERMASALAHAN | UPAYA<br>MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT<br>REKOMENDASI<br>DPRD |
| 1.                                                                                                      | Ketenagakerjaan      | Dinas<br>Tenaga Kerja |           | Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                              | 100%           | 100%              | Tidak Ada    |                                    |                                      |
|                                                                                                         |                      |                       |           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,<br>dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | 100%           | 100%              | Tidak Ada    |                                    |                                      |
|                                                                                                         |                      |                       |           | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 4 Dokumen      | 4 Dokumen         | Tidak Ada    |                                    |                                      |
|                                                                                                         |                      |                       |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja<br>SKPD | 4 Laporan      | 4 Laporan         | Tidak Ada    |                                    |                                      |
|                                                                                                         |                      |                       |           | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                             | 100%           | 100%              | Tidak Ada    |                                    |                                      |
|                                                                                                         |                      |                       |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 21 orang       | 21 orang          | Tidak Ada    |                                    |                                      |
|                                                                                                         |                      |                       |           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                               | 12<br>Dokumen  | 12 Dokumen        | Tidak Ada    |                                    |                                      |
|                                                                                                         |                      |                       |           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                      | 100%           | 100%              | Tidak Ada    |                                    |                                      |

|  |  |  |  |                                                                                  |             |             |           |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | 12 Laporan  | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           | 56 paket    | 56 paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b> | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Komponen Instalasi                                                      | 12 Paket    | 12 Paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                               |             |             |           |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 12 Paket    | 12 Paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Bahan Logistik Kantor                                                   | 1086 paket  | 1086 paket  | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Barang cetakan dan penggandaan                                          | 12 Paket    | 12 Paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                           | 960 Dokumen | 960 Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan  | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 485 Laporan | 485 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | Tidak Ada |  |  |

|  |  |  |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Unit AC 1 ½ PK</li> <li>- 2 Unit AC 1 PK</li> <li>- 2 Unit Kipas Angin Blower</li> <li>- 2 Unit Dispenser</li> <li>- 3 Unit Laptop</li> <li>- 5 Unit Tablet</li> <li>- 1 Unit Laptop</li> <li>- 1 Unit Printer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Unit AC 1 ½ PK</li> <li>- 2 Unit AC 1 PK</li> <li>- 2 Unit Kipas Angin Blower</li> <li>- 2 Unit Dispenser</li> <li>- 3 Unit Laptop</li> <li>- 5 Unit Tablet</li> <li>- 1 Unit Laptop</li> <li>- 1 Unit Printer</li> </ul> | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Unit kursi baca</li> <li>- 1 Unit meja baca</li> <li>- 1 unit kursi tunggu</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Unit kursi baca</li> <li>- 1 Unit meja baca</li> <li>- 1 unit kursi tunggu</li> <li>layanan AK.I-V</li> <li>- 1 unit meja ½ Biro</li> </ul>                                                                               | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  |                                              | layanan AK.I-V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit meja ½ Biro</li> <li>- 1 unit meja 1 Biro</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit meja 1 Biro</li> <li>- 3 Kursi Kerja</li> </ul>                                                                                                                                                                      |           |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                    |                 |             |           |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  |                                                                                                                    | - 3 Kursi Kerja |             |           |  |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>100%</b>     | <b>100%</b> | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | 100 Laporan     | 100 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik                                                             | 12 Laporan      | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 12 Laporan      | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                              | <b>100%</b>     | <b>100%</b> | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Unit         | 12 Unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 1 Unit          | 1 Unit      | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                           | 18 unit         | 18 unit     | Tidak Ada |  |  |

|  |  |  |  |                                                                  |                  |                  |           |                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | 1 unit           | 1 unit           | Tidak Ada |                                                                                                               |  |
|  |  |  |  | <b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>                          | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | Tidak Ada |                                                                                                               |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>            | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | Tidak Ada |                                                                                                               |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                            | 1 Dokumen        | 1 Dokumen        | Tidak Ada |                                                                                                               |  |
|  |  |  |  | <b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>    | <b>85%</b>       | <b>87.86%</b>    | Tidak Ada | Target Program Pelatihan Kerja dapat dicapai dengan kegiatan pelatihan yang bersumber dari APBN, selain APBD. |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdsarkan Unit Kompetensi</b> | 80 orang         | 152 orang        |           |                                                                                                               |  |

|  |  |  |  |                                                                                                            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 80 orang | 152 orang | Kegiatan pelatihan tahun 2024 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 Orang pelatihan menjahit (APBN)</li> <li>- 16 Orang pelatihan Komputer (APBN)</li> <li>- 16 Orang pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (APBN)</li> <li>- 16 Orang pelatihan Las Pipe SMAW 1G/PA (APBN)</li> <li>- 16 Orang pelatihan Komputer Operator Asistant (APBN)</li> <li>- 16 Orang pelatihan Las Pipe SMAW 1G/PA (APBD)</li> <li>- 12 orang pelatihan Hidroponik (APBD)</li> <li>- 10 orang pelatihan operator MIGAS (APBD)</li> <li>- 20 orang pelatihan</li> </ul> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                |                                                               |                      |                      |           |                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                |                                                               |                      |                      |           | BARBERSHOP (APBD)<br>- 14 Orang<br>Pelatihan Program Bantuan Pelatihan Untuk Masyarakat (11 orang<br>Pelatihan Rigger dan 3 orang<br>Teknisi Sistem Utilitas) (APBN PPSDM MIGAS) |  |
|  |  |  |                                                | <b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>         | <b>10 Perusahaan</b> | <b>10 Perusahaan</b> | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  |  |                                                | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil  | 10 Perusahaan        | 10 Perusahaan        | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  |  | 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang | <b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>                        | <b>41%</b>           | <b>86.74%</b>        | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  |  |                                                | <b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>410 orang</b>     | <b>916 orang</b>     | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal</p> <p>2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.</p> <p>3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.</p> | <p>pelayanan antar kerja</p> | <p>410 orang</p> | <p>916 orang</p> | <p>Tidak Ada</p> | <p>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 bekerja di Sektor Formal (Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha). 345 orang yang berwirausaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK</li> <li>2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop</li> <li>3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membatik di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membatik di desa Sungai Landak Kecamatan</li> </ol> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                            |           |           | <p>Senyerang, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat).</p> <p>4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta anggota kelompok tani hidroponik)</p> |  |
|  |  |  |  | <p>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</p> | 100 orang | 100 orang | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  | <p>Perluasan Kesempatan Kerja</p>                          | 40 orang  | 90 orang  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>     | <b>1000 orang</b> | <b>1056 orang</b> | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online | 1.000 orang       | 1.357 orang       | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Job Fair/Bursa Kerja                                  | 75 orang          | 82 orang          | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  |  |  | 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan<br>2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan. | <b>Program Hubungan Industrial</b>                    | <b>90%</b>        | <b>84.93%</b>     | Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), sebagai berikut:<br>1) Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan = 83,81%<br>2) Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama = 100%;<br>3) Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit = 75%<br>4) Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala | Meningkatkan kegiatan pembinaan hubungan industrial untuk mendorong perusahaan membentuk LKS Bipartit di dalam perusahaan, sebagai wadah dialog sosial untuk membahas permasalahan ketenagakerjaan antara pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |                          |                          | upah = 67,70%<br>5) Persentase<br>Perusahaan<br>Peserta BPJS<br>Ketenagakerjaan<br>=98,14%                                                                        |                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pengesahan Peraturan<br/>Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian<br/>Kerja Bersama untuk Perusahaan yang<br/>hanya Beroperasi dalam 1 (satu)<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>15<br/>Perusahaan</b> | <b>18<br/>Perusahaan</b> | Tidak Ada                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  | Pengesahan Peraturan<br>Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                                       | 15<br>Perusahaan         | 18<br>Perusahaan         | Tidak Ada                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama<br>bagi Perusahaan                                                                                                                                  | 10<br>Perusahaan         | 5 Perusahaan             | Jumlah<br>perusahaan yang<br>memiliki Serikat<br>Pekerja/Buruh<br>sebanyak 19<br>perusahaan<br>dengan masa aktif<br>Perjanjian Kerja<br>Bersama 2<br>(dua) tahun. | Mendorong<br>perusahaan dan<br>pekerja/buruh<br>dalam perusahaan<br>untuk membentuk<br>serikat<br>pekerja/buruh<br>sehingga dapat<br>menambah jumlah<br>Perjanjian Kerja<br>Bersama. |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan pendataan dan<br>informasi sarana hubungan industrial dan<br>jaminan sosial tenaga kerja serta<br>pengupahan                                                             | 12<br>Laporan            | 12<br>Laporan            | Tidak Ada                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                  |                          |                          |           |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | <b>15<br/>Perusahaan</b> | <b>18<br/>Perusahaan</b> | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 16 Kasus                 | 9 Kasus                  | Tidak Ada |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | 1 Lembaga                | 1 Lembaga                | Tidak Ada |  |  |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat

| 3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana               |                           |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                            |                     |                     |              |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3.12.<br>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Tanjung Jabung Barat<br>Tahun Anggaran 2024<br>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                           |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                            |                     |                     |              |                                                                                                                        |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT                                                                                                   |                           |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                            |                     |                     |              |                                                                                                                        |
| NO                                                                                                                                                                                                                      | URUSAN PEMERINTAHAN       | OPD PELAKSANA                                                                                 | KEBIJAKAN                                                                                                        | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                              | TARGET              | REALISASI           | PERMASALAHAN | PENJELASAN CAPAIAN PROGRAM                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                         | 3                                                                                             | 4                                                                                                                | 5                                                                                          | 6                   | 7                   | 8            | 9                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | WAJIB NON PELAYANAN DASAR | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Peningkatan KKG dengan fokus pada Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2000. | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                  | 10%                 | 10%                 |              | Telah dilaksanakan kegiatan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                             |
|                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                               |                                                                                                                  | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Lembaga PUG      | 15 Lembaga PUG      |              | Telah dilaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
|                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                               |                                                                                                                  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                          | 15 Perangkat Daerah | 15 Perangkat Daerah |              | Jumlah peserta kegiatan yang ada dalam DPA kegiatan sebanyak 30 orang dari 15 OPD, agar lebih banyak Perangkat Daerah  |

|  |  |  |  |                                                                                                                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                      |                      |                      | yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                               |
|  |  |  |  | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota | 200 orang            | 200 orang            | Telah dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota                                            |
|  |  |  |  | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           | 4 Dokumen            | 4 Dokumen            | kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi Bank Sampah, Pelatihan Pemulasaran Jenazah, Pelatihan Merangkai Bunga dengan memberdayakan perempuan di Tanjung Jabung Barat                  |
|  |  |  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                       | 5 Lembaga Layanan PP | 5 Lembaga Layanan PP | Telah dilakukan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota pada lembaga PKK, PATBM, Karang Taruna, Unsur organisasi masyarakat |
|  |  |  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan                                                  | 5                    | 5                    | Terlaksananya kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga                                                                                                                          |

|   |  |  |  |                                                                                                                                               |           |           |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  | Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | Lembaga   | Lembaga   |                   | penyedia layanan PP di 2 (dua) Desa (Desa Kuala Dasal dan Desa Pinang Gading) dengan peserta dari unsur organisasi/lembaga yaitu PKK Desa Kuala Dasal dan Desa Pinang Gading, PLKB Kec. Tungkal Ulu dan Merlung dan PATBM. |
| 2 |  |  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                         | 100%      | 100%      |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|   |  |  |  | <i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten /Kota</i>                                                                | 2 Kali    | 2 Kali    |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|   |  |  |  | Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen |                   | Pelaksanaan Kegiatan adalah pertemuan KOOrdinasi dan kerjasama Pencegahan KTP, Pertemuan Satgas TPPO, Antar Perusahaan,Rakor Eva Pencegahan KTP dan TPPO, FGD Tentang Pencegahan KTP dan KTA, cetak media KIE              |
|   |  |  |  | <i>Penyediaan Layanan</i>                                                                                                                     | 5         | 2         | tidak semua kasus |                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |  |                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kasus    | Kasus    | perempuan korban kekerasan membutuhkan rujukan lanjutan ke instansi/lembaga lain karena korban sudah mendapat layanan di UPT PPA seperti layanan konsultasi/bantuan hukum, layanan bimbingan rohani serta pemeriksaan dan penanganan psikologi korban dan tidak semua korban mau dirujuk karena masih sekolah,membantu pekerjaan dirumah dan orang tua tidak ingin berpisah sama anak mereka. |                                                                                                                                                             |
|  |  |  |  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota     | 30 orang | 45 Orang |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semua perempuan korban kekerasan yang melaporkan secara langsung maupun tidak langsung (WA dan Aplikasi SINPAN) ke UPT PPA dan UPPA Polres mendapat layanan |
|  |  |  |  | Koordinasi dan sinkronisasi                                                                           | 8        | 7        | Perempuan korban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota</p> | Layanan | Layanan | <p>kekerasan yang melaporkan ke polres seharusnya mendapat berbagai layanan seperti pengaduan, Pendampingan Hukum (Bantuan Hukum), Penegakan Hukum, Layanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Pendampingan Tokoh Agama tetapi tahun 2024 hanya 7 layanan yang diberikan kecuali layanan Reintegrasi Sosial. Layanan Reintegrasi Sosial sulit dilakukan karena kurang support system dari keluarga dan masih adanya stigma negatif dari lingkungan masyarakat pada korban kekerasan seksual. Dalam memberikan pelayanan pada korban kekerasan tidak semua layanan diberikan tetapi diberikan berdasarkan kebutuhan dari korban.</p> |  |
|  |  |  | <p>Penguatan dan</p>                                                                                    | 24      | 24      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|   |  |  |  |                                                                                                                                 |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  | <i>Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota</i>                                     | unit layanan | unit layanan |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 orang     | 30 Orang     | Tidak Ada                  | Terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dr lembaga layanan antara lain Puskesmas, PATBM dan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah)                                   |
|   |  |  |  | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 5 Dokumen    | 5 Dokumen    | Tidak Ada                  | Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan PP terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Sosialisasi di Kabupaten dan Pembinaan di Kecamatan Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, Merlung, Muara Papalik dan Senyerang. |
| 3 |  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                    | 2%           | 2%           |                            | <b>Telah dilaksanakan kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>                                                                                                                                                         |
|   |  |  |  | <i>Peningkatan Kualitas</i>                                                                                                     | 200          | 180          | <i>dari rencana 200 KK</i> | <i>Perlu dilakukan sosialisasi</i>                                                                                                                                                                                                    |

|   |  |  |  |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  | Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat daerah kabupaten/Kota              | Keluarga     | Keluarga     | yang diikuti sertakan hanya 180 KK yang bersedia ikut hal ini dikarenakan tidak semua keluarga langsung bersedia mengikuti karena beberapa hal antara lain waktu mereka yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan berbarengan dengan rutinitas bekerja dan sebagian besar adalah nelayan, dan kurangnya keterbukaan menerima sosialisasi yang disampaikan petugas | dan kegiatan persiasif secara terus menerus untuk menyamakan pemahaman tentang keluarga berkualitas                                                                                                            |
|   |  |  |  | Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan kab/Kota | 4<br>Dokumen | 4<br>Dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kegiatan hanya dilaksanakan pada satu kelurahan saja untuk beberapa kali kegiatan sehingga tidak merata pada kelurahan/desa lainnya. Kedepan perlu kegiatannya dilaksanakan di beberapa kelurahan/desa lainnya |
| 4 |  |  |  | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                         | 49%          | 43%          | Penilaian KLA pada Cluster1 tentang hak sipil dan kebebasan masih kurang, (ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang masih kurang) dan Cluster 4 tentang Pendidikan,                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                 |                              |                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                                                 |                              |                              | pemanfaatna waktu luang pada Bidang Pendidikan yang masih rendah.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|  |  |  |  | <i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                                         | 65<br><br><i>Lembaga PHA</i> | 65<br><br><i>Lembaga PHA</i> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|  |  |  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 40<br><br><i>Organisasi</i>  | 40<br><br><i>Organisasi</i>  | Pada Tahun 2024 Peraturan Penilaian tentang KLA berubah yang biasanya 1 tahun sekali menjadi 2 Tahun sekali sehingga Dana kegiatan yang sudah di rencanakan berubah ada kelebihan pada Dana Kegiatan | Telah dilaksanakan kegiatan rapat Kordinasi KLA 2 kali dan Rakor Gugus Tugas KLA 1 kali dan Pelatihan KHA, Dekela dan Kelana yang melibatkan 35 organisasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                            | 5<br><br>Dokumen             | 5<br><br>Dokumen             | Tidak ada                                                                                                                                                                                            | Tersedia dokumen hasil pelaksanaan kegiatan terdiri dari<br>1.Dokumen Forum Anak Daerah<br>2. Dokumen Rencana Kerja FAD Kabupaten<br>3. Dokumen Analisa Kegiatan                             |
|  |  |  |  | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga</i>                                                                                                       | 20                           | 20                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |

|   |  |  |  |                                                                                                                             |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  | Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                         | Sekolah          | Sekolah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |  |  | Penyediaan Layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                       | 150<br><br>orang | 150<br><br>orang | Penyusunan Target Sub<br>Kegiatan pada Renstra<br>sebanyak 6000 orang,<br>dalam pelaksanaan dan<br>ketersediaan Anggaran<br>mencukupi untuk 90<br>orang, Kegiatan ini<br>sebagai salah satu<br>metode pendekatan<br>terhadap anak-anak<br>terdampak narkoba yang<br>membutuhkan waktu ,<br>tekhnik dan metode<br>pendekatan yg<br>membutuhkan anggaran<br>besar. | Pelaksanaan Kegiatan<br>Diawali dengan Skrining<br>terhadao 150 anak yang<br>terindikasi NAPZA yang<br>dilakukan oleh Tim Skring<br>terdiri dari Kesehatan,<br>Psikolog, Polres Tanjab<br>Barat, hasil skrining terjaring<br>90 orang Anak yang<br>dilakukan Pendampingan<br>Tim Psikolog, Tim IKAI<br>(Ikatan Konselor Adiksi<br>Indonesia), Sosialisasi<br>Napza oleh Polres Tanjab<br>Barat, dan Boot Camp<br>outdoor untuk pembentukan<br>karakter Anak. |
|   |  |  |  | Penguatan Jejaring antar<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | 3 Dokumen        | 3 Dokumen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Telah dilakukan penguatan<br>jejaring antar lembaga<br>penyedia layanan<br>peningkatan kualitas hidup<br>anak (SRA 3 angkatan 120<br>peserta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 |  |  |  | <b>PROGRAM<br/>PERLINDUNGAN KHUSUS<br/>ANAK</b>                                                                             | <b>25.50%</b>    | <b>25.50%</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |  |                                                                                                                     |                          |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>                  | 2<br>upaya<br>pencegahan | 2<br>upaya<br>pencegahan |           | Sosialisasi dan Advokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  |  | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA            | 10<br><br>Orang          | 10<br><br>Orang          | tidak Ada | Terlaksananya Kegiatan KTA ( Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak ) yang dilaksnakan di aula dinas P3AP2KB dibuat komitmen bersama OPD terkait Permasalahan /tindakan yang dilakukan setelah anak korban sudah selesai menghadapi kasus dan sedang dalam proses sebuah kasus.                                                       |
|  |  |  |  | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota                                                  | 15<br><br>Dokumen        | 15<br><br>Dokumen        | tidak Ada | telah terlaksananya kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi kekerasan terhadap anak dan pendampinga psikolog di 2 kelurahan yaitu kelurahan tunggal IV kota dan kelurahan Tungkal Harapan serta sosialisasi perkawinan usia anak di 4 desa yaitu desa teluk sialang,desa pembengis , Desa kepayang dan desa Bunga Tanjung |
|  |  |  |  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 30<br><br>Orang          | 30<br><br>Orang          |           | Semua anak yang memerlukan perlindungan khusus yang melaporkan secara langsung maupun tidak langsung (WA dan                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                    |                    | Aplikasi SINPAN) ke UPT PPA dan UPPA Polres mendapat layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                             | 30 Orang           | 30 Orang           | Kegiatan ini dilaksanakan setelah kegiatan BootCamp sehingga waktu yang telah di rencana 12 bulan hanya bisa dilaksanakan 6 bulan menunggu apbd murni dirubah ke abpd perubahan tidak semua anak bersedia mengikuti kegiatan ini , dan pelaksanaan screening hanya berdasarkn pemeriksaan / konsultasi psikologis tidak melalui tes narkoba, sehingga ada kesulitan menentukan anak yang benar2 terdampak dan memiliki kecanduan narkoba , dan pemahaman tentang bahaya narkoba yang masih kurang dari orangtua/pendamping anak-anak |
|  |  |  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17 Unit layanan PA | 17 Unit layanan PA | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan                                                                               | 2                  | 2                  | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                    |                    | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PATBM yaitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |  |  |  |                                                                                                                                                      |                                              |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  | perlindungan bagi AMPK tingkat kabupaten/kota daerah                                                                                                 | Kegiatan                                     | Kegiatan             |                                                  | kec. Tungkal Ulu kec. Tungkal Ilir, kec.bram Itam, Kec. Senyerang, kec. Betara ,Kec. Kuala Betara dan pengabuan Kelompok PATBM Kab.Tanjung Jabung                                                                                                                                             |
|   |  |  |  | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/                                   | 17<br>Orang                                  | 17<br>Orang          | Tidak ada                                        | Terlaksana Pelatihan Perlindungan anak untuk aktivis PATBM dilaksanakan di Hotel Aryad dengan nara sumber dari provinsi dan kabupaten untuk 4 Kelompok PATBM Kab.Tanjung Jabung Barat ( PATBM Kel.Tungkal Ilir , PATBM tungkal Ulu, PATBM Desa Mandala Jaya Betara, PATBM kel.Tebing Tinggi ) |
| 6 |  |  |  | Program Pengendalian Penduduk                                                                                                                        | 1.91                                         | 1.45                 | Tidak Ada                                        | Rata rata Laju pertumbuhan Penduduk , Sumber Data BPS Februari 2024<br>OPD Pemanfaat GDPK 100%                                                                                                                                                                                                |
|   |  |  |  |                                                                                                                                                      | 100%                                         | 100%                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |  |  |  | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 3<br><br>Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK | 2<br><br>Perbup/GDPK | Dalam Proses Pengajuan PerDa/PerBup GDPK 5 Pilar | akan dilanjutkan penyusunan perda ke dpr                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |                   |                   |           |                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS, Jalur Non Formal dan Informal | 23                | 23                |           | Satuan Pendidikan yang telah diberikan sosialisasi ; 117 Sekolah, Advokasi ; 117 Sekolah, Fasilitasi ; 6 Sekolah                                                                                      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                        | Satuan Pendidikan | Satuan Pendidikan |           |                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  |  | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | Tidak Ada | Proses Penyempurnaan                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  |  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                | 3                 | 3                 |           | Tersedia profil KKBPK dalam bentuk dokumen data dan informasi<br>1. Data TPPS ( Tim Percepatan Penurunan Stunting)<br>2.Data PK ( Pendataan Keluarga)<br>3. Data Verifikasi dan Validasi Kependudukan |
|  |  |  |  | Penyediaan dan Pengolahan                                                                                                                                              | 3                 | 3                 | Tidak Ada | Tersedia Dokumen                                                                                                                                                                                      |

|   |  |  |  |                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  | Data Kependudukan                                                                                                              | Dokumen    | Dokumen    |                                                                                                                                                                                                     | pelaporan Radalgram (Rapat Pengendalian Program) KB selama 12 bulan                                                                      |
|   |  |  |  | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                         | 13 Dokumen | 13 Dokumen | Tidak Ada                                                                                                                                                                                           | Tersedia Dokumen pelaporan Radalgram (Rapat Pengendalian Program) KB selama 12 bulan                                                     |
|   |  |  |  | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                           | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Tidak Ada                                                                                                                                                                                           | Tersedia Dokumen pelaporan Radalgram (Rapat Pengendalian Program) KB selama 12 bulan                                                     |
| 7 |  |  |  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                      | 19.62%     | 25.20%     | <i>Disebabkan oleh kegagalan, kompilkasi, ingin hamil atau ingin mempunyai anak segera, ganti cara, efek samping, biaya serta aksesibilitas, akseptor bercerai atau suami meninggal, menopause.</i> | <i>Meningkatkan KIE ( Komunikasi, Informasi dan Edukasi ) serta meningkatkan kualitas Pelayanan dan kelangsungan kesertaan Ber- KB .</i> |
|   |  |  |  | <i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i> | 21 Kali    | 21 Kali    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|   |  |  |  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |                                                                                                                                                                                                     | Operasional kegiatan di Balai penyuluhan KB terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran dan waktu yg tersedia 12 bulan  |
|   |  |  |  | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui                                                               | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                                     | Kurang Efisiensi waktu pelaksanaan dengan jumlah peserta minilok yang                                                                    |

|  |  |  |  |                                                                                                      |                      |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) | Dokumen              | Dokumen              |           | terbatas, sehingga kegiatan minilok terlaksana 90%                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  |  | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan Elektronik melalui media ruang  | 1<br>Dokumen         | 1<br>Dokumen         |           | Promosi dan KIE program Bangga telah terlaksana 100% melalui media cetak dan elektronik                                                                                                                                               |
|  |  |  |  | Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal          | 1<br><br>Dokumen     | 1<br><br>Dokumen     |           | Telah dilakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan bangga kencana oleh kades PPKBD dan SubPPKBD di 134 Desa                                                                                                                            |
|  |  |  |  | Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja               | 21<br><br>Organisasi | 21<br><br>Organisasi | Tidak Ada |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  |  | <i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</i>                             | 100%                 | 100%                 |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  |  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan                                                      | 268<br>Orang         | 268<br>orang         |           | kondisi tahun 2023 terdapat 21 Petugas Penyuluh KB Non PNS (Motivator) telah melakukan Penyuluhan di 134 desa/kelurahan , jumlah ini belum ideal dengan SDM yang seharusnya tersedia dimana 1 desa harus memiliki 1 petugas motivator |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan                                                                               | 12                   | 12                   |           | Telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |  |                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Bernecana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Laporan    | Laporan    |                                                                                                                                                 | monitoring dan evaluasi sebanyak 2 kali serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan IBANGGA oleh motivator dan penyuluh KB                                   |
|  |  |  | <i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>                            | 100%       | 100%       |                                                                                                                                                 | <i>Tersedianya laporan pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan saran penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya</i> |
|  |  |  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                      | 1 Laporan  | 1 Laporan  | Pelaksanaan Kegiatan MKJP MOW tidak dapat dilaksanakan 100%,dikarenakan tidak ada kesesuaian antara Perda Tarif RS dengan Juknis BOKB Non Fisik | Optimalisasi KIE tentang pentingnya peran serta menjadi akseptor KB                                                                                             |
|  |  |  | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                       | 12 Laporan | 12 Laporan | Belum Optimalnya Penyampaian data oleh tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Operator SIGA Kecamatan                         | Tersedianya Laporan pelaksanaan pembinaan pelayanan KB selama 12 bulan                                                                                          |
|  |  |  | <i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan</i>             | 100%       | 100%       | <i>Perlu Pembinaan dan Pendampingan Lebih Lanjut</i>                                                                                            | <i>Telah dilaksanakan pemberdayaan dan peningkatan Peran organisasi dalam pelaksanaan Pelayanan danPembinaan Kesertaan</i>                                      |

|   |  |  |  |                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  | <i>Kesertaan Ber-KB</i>                                                                                                            |                |                |                                                                                                                                                                                                     | <i>Ber-KB</i>                                                                                                                                               |
|   |  |  |  | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 50 Organisasi  | 30 Organisasi  | Belum Seluruh organisasi dan lembaga kemasyarakatan bersinergi Untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang Pembinaan dan Pelayanan Kesertaan Ber KB                                          | Perlu tindaklanjut lintas OPD untuk meningkatkan kerjasama organisasi kemasyarakatan terkait Pembinaan dan Pelayanan Kesertaan Ber KB                       |
|   |  |  |  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                            | 134 Kampung KB | 134 Kampung KB | Tidak Ada                                                                                                                                                                                           | Klasifikasi Kampung KB yang terbentuk : 36 Dasar.35 Berkembang, 26 Mandiri, 37 Berkelanjutan                                                                |
| 8 |  |  |  | <b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>                                                                | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>Tidak Ada</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan yang menunjang Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera sesuai dengan target pada tiap sub kegiatan</b> |
|   |  |  |  | <i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>                                     | 100 Orang      | 100 Orang      | Belum semua jenis kelompok kegiatan ketahanan/kesejahteraan keluarga mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga baik berupa bantuan sarana ataupun kegiatan promosi dan sosialisasi | Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan yang menunjang Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera sesuai dengan target pada tiap sub kegiatan        |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                         | 1 Laporan  | 1 Laporan  | Belum Optimalnya kesertaan Kader Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (POKTAN) dari 13 Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan Promosi dan sosialisasi, terkait Keterbatasan Anggaran. | Terlaksananya Kegiatan HARGANAS Tingkat Kabupaten dan Workshop GenReAKSI oleh Forum GenRe Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat dalam upaya percepatan penurunan Stunting melalui pendewasaan usia perkawinan, dengan peserta sebanyak 280 orang. |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                | 31 Unit    | 31 Unit    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |  |  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 134 Desa   | 134 Desa   | Tidak Ada                                                                                                                                                                                             | Terlaksana kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting oleh TPK di 134 Desa/Kelurahan                                                                                                                                                      |
|  |  |  |  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)               | 1 Kelompok | 1 Kelompok | Belum terfasilitasinya Lomba untuk Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Tingkat Kabupaten dikarenakan Keterbatasan Anggaran                                       | Terlaksananya Kegiatan Lomba Kelompok Kegiatan PIK-R dan Duta GenRe Tingkat Kabupaten, sebagai apresiasi dan stimulan kepada Kelompok Masyarakat pembangunan keluarga dan Individu berprestasi, dengan peserta                                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | sebanyak 65 peserat dari 13 Kecamatan. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|

Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat

#### 4. Urusan Pangan; Dinas Ketahanan Pangan

**Tabel 3.13.**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024**

**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET                                                                        | REALISASI                                                                 | PERMASALAHAN                              | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN              | TINDAK LANUT REKOMENDASI DPRD             |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Pangan              | Dinas Ketahanan Pangan                |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b><br><br><b>A</b> Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan :<br>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br><br><b>B</b> Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan :<br>1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br><br><b>C</b> Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan :<br>1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100%<br><br><br><br>6 dokumen<br><br><br>18 orang<br>1 dokumen<br><br>2 paket | 100%<br><br><br><br>6 Dokumen<br><br>18 orang<br>1 dokumen<br><br>2 paket | -<br><br><br><br>-<br><br>-<br>-<br><br>- | -<br><br><br><br>-<br><br>-<br>-<br><br>- | -<br><br><br><br>-<br><br>-<br>-<br><br>- |

|  |  |  |          |                                                                                       |             |             |   |   |   |
|--|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|
|  |  |  | 2        | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 1 dokumen   | 1 dokumen   | - | - | - |
|  |  |  | <b>D</b> | <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                    |             |             |   |   |   |
|  |  |  |          | Sub Kegiatan :                                                                        |             |             |   |   |   |
|  |  |  | 1        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  |  | 2        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  |  | 3        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  |  | 4        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  |  | 5        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 284 laporan | 284 laporan | - | - | - |
|  |  |  | <b>E</b> | <i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>      |             |             |   |   |   |
|  |  |  |          | Sub Kegiatan :                                                                        |             |             |   |   |   |
|  |  |  | 1        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | 1 unit      | 1 unit      | - | - | - |
|  |  |  | 2        | Pengadaan Mebel                                                                       | 27 unit     | 27 unit     | - | - | - |
|  |  |  | 3        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 9 unit      | 9 unit      | - | - | - |
|  |  |  | <b>F</b> | <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                  |             |             |   |   |   |
|  |  |  |          | Sub Kegiatan :                                                                        |             |             |   |   |   |
|  |  |  | 1        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 1 laporan   | 1 laporan   | - | - | - |
|  |  |  | 2        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 2 laporan   | 2 laporan   | - | - | - |
|  |  |  | 3        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 1 laporan   | 1 laporan   | - | - | - |
|  |  |  | <b>G</b> | <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |             |             |   |   |   |
|  |  |  |          | Sub Kegiatan :                                                                        |             |             |   |   |   |
|  |  |  | 1        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                   | 15 Unit     | 15 Unit     | - | - | - |

|   |                                                                                                                                                                                       |                         |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                          |                         |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                              | 23 unit                 | 23 unit                 | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
|   | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>                                                                                                              | 93,00 skor PPH konsumsi | 93,20 skor PPH konsumsi | - | Gerakan sosialisasi konsumsi pangan lokal non beras kepada para siswa SD/MI kelompok usia anak-anak, sehingga saat dewasa sudah terbiasa mengkonsumsi makanan non beras dan non tepung terigu. Keterlibatan pemangku kepentingan antara lain para pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan turut mendukung gerakan tersebut dengan menciptakan kreasi masakan berbahan non beras dan terigu, seperti dari talas, singkong dan jagung, sehingga nantinya akan muncul kuliner dari |   |
| A | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan<br>Sub Kegiatan : |                         |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |

|  |  |  |  |                                                                                         |           |           |   |                                                                                  |   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |  |  |                                                                                         |           |           |   | bahan jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, sorghum, serta umbi-umbian lain. |   |
|  |  |  |  | 1 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                 | 1 dokumen | 1 dokumen | - | -                                                                                | - |
|  |  |  |  | 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   | 1 laporan | 1 laporan | - | -                                                                                | - |
|  |  |  |  | 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 2 laporan | 2 laporan | - | -                                                                                | - |

|  |  |  |  |                                                                                                                    |           |           |                                                  |                                                   |   |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
|  |  |  |  | <b>B</b> Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                      |           |           |                                                  |                                                   |   |
|  |  |  |  | <i>Sub Kegiatan :</i>                                                                                              |           |           |                                                  |                                                   |   |
|  |  |  |  | 1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                              | 20 ton    | 20 ton    | -                                                | -                                                 | - |
|  |  |  |  | 2 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                           | 20 ton    | 20 ton    | -                                                | -                                                 | - |
|  |  |  |  | <b>C</b> Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |           |           |                                                  |                                                   |   |
|  |  |  |  | <i>Sub Kegiatan :</i>                                                                                              |           |           |                                                  |                                                   |   |
|  |  |  |  | 1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun                                             | 1 Dokumen | 1 Dokumen | -                                                | -                                                 | - |
|  |  |  |  | 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                        | 2 laporan | 2 laporan | -                                                | -                                                 | - |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                         | 100%      | 83%       | dari buku Neraca Bahan Makanan (NBM) yang diolah | Kekurangan 4.208 ton beras untuk kebutuhan pangan |   |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |                  |                  | <p>oleh Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan data dari instansi terkait, ketersediaan beras lokal yang siap dikonsumsi di kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 19.975 ton, hanya 83 % mencukupi terhadap kebutuhan konsumsi beras masyarakat sebesar 24.184 ton (konsumsi beras per orang sebesar 73,05 kg/kapita/tahun)</p> | <p>masyarakat Kab. Tanjab Barat dapat ditutupi dari supply beras dari daerah lain. Untuk itu masih perlu strategi dan upaya yang sangat keras dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan guna peningkatan produksi bahan pangan tersebut, sehingga produksi dan ketersediaan beras lokal di Kabupaten dapat mencukupi khususnya untuk konsumsi masyarakat Kab. Tanjabbar.</p> |   |
|  |  |  |  | <p><b>A</b> Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p> | <p>1 dokumen</p> | <p>1 dokumen</p> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
|  |  |  |  | <p><b>B</b> Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</p>         | <p>2 laporan</p> | <p>2 laporan</p> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |

|  |  |  |  |                                                                                                                                            |           |           |   |   |   |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b><br><b>A</b> Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan : | 80%       | 80%       |   |   |   |
|  |  |  |  | 1 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                 | 2 Laporan | 2 Laporan | - | - | - |
|  |  |  |  | 2 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                           | 1 dokumen | 1 dokumen | - | - | - |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Urusan Lingkungan Hidup; Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 3.14.  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung BaratTahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

| No | URUSAN PEMERINTAHAN                            | OPD PELAKSANA          | KEBIJAKAN                               | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                          | TARGET           | REALISASI        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|    | Urusan Pemerintahan<br>Bidang Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>              | <b>100%</b>      | <b>86%</b>       |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | <b>Perencanaan. penganggaran. dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>         | 7 Laporan        | 7 Laporan        |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | 8 Dokumen        | 8 Dokumen        |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                     | 4 Dokumen        | 4 Dokumen        |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>4 Laporan</b> | <b>4 Laporan</b> |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 24 Orang/Bulan   | 21 Orang/Bulan   |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 2 Dokumen        | 2 Dokumen        |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4 Laporan        | 4 Laporan        |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 2 Dokumen        | 2 Dokumen        |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> |              |                              |                                |
|    |                                                |                        |                                         | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                  | 1 Dokumen        | 1 Dokumen        |              |                              |                                |

|                                                                              |                   |                  |                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| SKPD                                                                         |                   |                  |                                                                                        |  |  |
| <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>            | <b>1 Dokumen</b>  | <b>1 Dokumen</b> |                                                                                        |  |  |
| Pengolahan Data Retribusi Daerah                                             | 12 Laporan        | 12 Laporan       |                                                                                        |  |  |
| Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                             | 13,100 Dokumen    | 8,137 Dokumen    |                                                                                        |  |  |
| <b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>100%</b>       | <b>78%</b>       |                                                                                        |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 2 Paket           | 2 Paket          |                                                                                        |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 1 Laporan         | 1 Laporan        |                                                                                        |  |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>1,100 Unit</b> | <b>115 Unit</b>  |                                                                                        |  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1,100 Unit        | 115 Unit         | Kekuatan anggaran untuk melakukan belanja sarana prasarana tidak sebesar pagu anggaran |  |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>4 Laporan</b>  | <b>4 Laporan</b> |                                                                                        |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 1 Laporan         | 1 Laporan        |                                                                                        |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                      | 1 Laporan         | 1 Laporan        |                                                                                        |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 1 Laporan         | 1 Laporan        |                                                                                        |  |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>42 Unit</b>    | <b>39 Unit</b>   |                                                                                        |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                     |                                                              |                              |                                                                                          |                                                                           |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37 Unit                                                      | 37 Unit                      |                                                                                          |                                                                           |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 5 Unit                                                       | 2 Unit                       | prioritas kerja saat ini adalah pekerjaan pemeliharaan pada 2 unit gedung kantor         |                                                                           |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                         | <b>4 Dokumen</b>                                             | <b>3 Dokumen</b>             |                                                                                          |                                                                           |  |
|  |  |  | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota</b>                                      | <b>1 Dokumen</b>                                             | <b>1 Dokumen</b>             |                                                                                          |                                                                           |  |
|  |  |  | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                       | 1 Dokumen                                                    | 1 Dokumen                    |                                                                                          |                                                                           |  |
|  |  |  | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>3 Dokumen</b>                                             | <b>2 Dokumen</b>             |                                                                                          |                                                                           |  |
|  |  |  | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                          | 1 Dokumen                                                    | 2 Dokumen                    |                                                                                          |                                                                           |  |
|  |  |  | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                   | 2 Dokumen                                                    | - Dokumen                    | Terjadi pergeseran anggaran kepada pembuatan KLHS RPJMD untuk mendukung prioritas daerah | Melakukan Tindakan pergeseran sehingga prioritas daerah dapat terakomodir |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                          | <b>66/ 94.6/ 56.5/ 78.4/ 74.8 IKA/ IKU/ IKTL/ IKAL/ IKEG</b> | <b>70.00/95.75/55.98/0/0</b> |                                                                                          |                                                                           |  |
|  |  |  | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                                    | <b>2 Laporan</b>                                             | <b>2 Laporan</b>             |                                                                                          |                                                                           |  |

|  |  |  |                                                                                                                                          |             |            |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                | <b>80%</b>  | <b>80%</b> |  |  |  |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                  | <b>80%</b>  | <b>80%</b> |  |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                    | 20 Ha       | 20 Ha      |  |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                   | 18 Unit     | 18 Unit    |  |  |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                          | <b>100%</b> | <b>88%</b> |  |  |  |
|  |  |  | <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>                                                                                                   | <b>100%</b> | <b>88%</b> |  |  |  |
|  |  |  | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                       | 1 Laporan   | 1 Laporan  |  |  |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN</b>                        | <b>100%</b> | <b>42%</b> |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                           |                                                                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>HIDUP (PPLH)</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                |                                                                                                           |                                                                                    |  |
|  |  |  |  | <b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                              | <b>100%</b>    | <b>42%</b>     |                                                                                                           |                                                                                    |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    | 25 Dokumen     | 4 Dokumen      | pada tahun 2024 hanya terdapat 4 proses persetujuan teknis dan rekomendasi yang difasilitasi oleh DLH     | berupaya maksimal pada persetujuan teknis dan rekomendasi yang dapat terfasilitasi |  |
|  |  |  |  | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 30 Badan Usaha | 10 Badan Usaha | hambatan dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menembus akses yang berat | melakukan pengawasan yang lebih kreatif dan efektif                                |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                           | 2 Orang        | 2 Orang        |                                                                                                           |                                                                                    |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>                                                                                                                | <b>90%</b>     | <b>90%</b>     |                                                                                                           |                                                                                    |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                   |             |             |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Pengakuan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>                                                                                                               | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi. Sinkronisasi. Penyediaan Data. dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN &amp; PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                | 90%         | 100%        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan &amp; Penyuluhan Lingkungan Hidup. untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>                                                                              | 6 Sekolah   | 6 Sekolah   |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                     | 6 Lembaga   | 6 Lembaga   |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                                                                              | 100%        | 100%        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                                                            | 100%        | 100%        |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan                                                                                                                                                                 | 3 Pengaduan | 3 Pengaduan |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                       |             |            |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota                                                                                                                    |             |            |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                          | 3 Perkara   | 3 Perkara  |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                                                | <b>87%</b>  | <b>78%</b> |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                                             | <b>87%</b>  | <b>78%</b> |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                                      | 12 Kelompok | 6 Kelompok | prioritas kelompok untuk dilakukan sosialisasi pada wilayah prioritas hanya mampu dilaksanakan pada 6 kelompok | Dilakukan inovasi dan efisiensi dalam sosialisasi pada target kelompok | Melakukan inovasi teknologi modern yang mampu menekan volume sampah di TPA, Serta melakukan edukasi kepada masyarakat, terkait pengelolaan sampah, seperti pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dilevel rumah tangga. |
|  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                | 1,000 Unit  | 1,125 Unit |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, | 80,000 Ton  | 40,917 Ton | permasalahan dalam kegiatan ini adalah masih belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan           | perlu peningkatan sarana dan prasarana serta efektifitas pengangkutan  |                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |  |                                                                             |  |  |             |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|
|  |  |  |  | Bank Sampah dan fasilitas lainnya<br>sesuai dengan peraturan<br>perundangan |  |  | persampahan |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat

| 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                                                                                                                                             |                                                       |                                         |           |                                                                                |           |           |                                                           |                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tabel 3.15.<br>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil<br>Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024<br>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL<br>KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT<br>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN<br>TAHUN 2024 |                                                       |                                         |           |                                                                                |           |           |                                                           |                                                                        |                                 |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                         | URUSAN PEMERINTAH                                     | OPD PELAKSANA                           | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN                                              | UPAYA MENGATASI MASALAH                                                | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                      |           |           |                                                           |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           | <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                         | 100%      | 100%      |                                                           |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 26 Orang  | 21 Orang  | 1. 1 Orang Purna Bhakti                                   | Telah mengajukan usulan kepada BKPSDM untuk mengisi kekosongan jabatan |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           |                                                                                |           |           | 2. 1 orang jabatan eselon II yang masih kosong            |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           |                                                                                |           |           | 3. 1 orang Jabatan fungsional Perencana yang masih Kosong |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan |                                                           |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           | <i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>                      | 100%      | 100%      |                                                           |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | 1 Paket   | 1 Paket   |                                                           |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           | <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                             | 100%      | 100%      |                                                           |                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan                      | 1 Paket   | 1 Paket   |                                                           |                                                                        |                                 |

|  |  |  |                                                                                                                     |             |             |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|
|  |  |  | Kantor                                                                                                              |             |             |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 1 Paket     | 1 Paket     |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 1 Paket     | 1 Paket     |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan                                                                 | 1 Unit      | 1 Unit      |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 7 Unit      | 7 Unit      |  |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20 Unit     | 20 Unit     |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 2 Unit      | 2 Unit      |  |  |

|   |  |  |                                                  |                                          |                                                  |                                                              |                                                          |  |
|---|--|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|   |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya         | 24 Unit                                  | 24 Unit                                          |                                                              |                                                          |  |
|   |  |  | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>              | <b>100% Perekaman, 100% KTP, 60% KIA</b> | <b>99,32% Perekaman, 98,72% KTP, 62,27% KIA.</b> | 1. Sarana dan Prasarana yang tersedia belum sesuai kebutuhan | 1. Penambahan Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan |  |
|   |  |  |                                                  |                                          |                                                  | 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai               | 2. Pemenuhan kebutuhan pegawai                           |  |
|   |  |  |                                                  |                                          |                                                  | 3. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi                    | 3. Pendidikan dan Pelatihan                              |  |
|   |  |  | <b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>   | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>                                      |                                                              |                                                          |  |
|   |  |  | Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk       | 1 Laporan                                | 1 Laporan                                        |                                                              |                                                          |  |
| 2 |  |  | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                  | <b>99% Akta Kelahiran 0-18 Tahun</b>     | <b>93,58% Akta Kelahiran 0-18 Tahun</b>          | 1. Sarana dan Prasarana yang tersedia belum sesuai kebutuhan | 1. Penambahan Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan |  |
|   |  |  |                                                  |                                          |                                                  | 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai               | 2. Pemenuhan kebutuhan pegawai                           |  |
|   |  |  |                                                  |                                          |                                                  | 3. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi                    | 3. Pendidikan dan Pelatihan                              |  |
|   |  |  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b> | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>                                      |                                                              |                                                          |  |
|   |  |  | Fasilitasi Pencatatan Sipil                      | 1 Laporan                                | 1 Laporan                                        |                                                              |                                                          |  |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.16.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN              | OPD PELAKSANA                          | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                               | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN                                                                              | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|    | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |           | Program penunjang urusan pemerintah daerah                                                         | 100%           | 100%           |                                                                                           |                              |                               |
|    |                                  |                                        |           | Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah                           | 6 Dokumen      | 6 Dokumen      |                                                                                           |                              |                               |
|    |                                  |                                        |           | Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 8 Laporan      | 8 Laporan      |                                                                                           |                              |                               |
|    |                                  |                                        |           | Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah                                                    | 100%           | 100%           |                                                                                           |                              |                               |
|    |                                  |                                        |           | Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | 26 Orang/Bulan | 24 Orang/Bulan | Jumlah pegawai ASN 24 orang per Desember 2024 adanya 1 orang pegawai yang meninggal dunia | -                            |                               |
|    |                                  |                                        |           | Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                         | 12 Dokumen     | 12 Dokumen     |                                                                                           |                              |                               |
|    |                                  |                                        |           | Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                 | 100%           | 100%           |                                                                                           |                              |                               |

|  |  |  |                                                                                  |                |                |                                                                                              |   |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya              | 146 Paket      | 146 Paket      |                                                                                              | - |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah</b>                               | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |                                                                                              |   |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor    | 12 Paket       | 12 Paket       |                                                                                              |   |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                        | 12 Paket       | 12 Paket       |                                                                                              |   |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor                                    | 896 Paket      | 836 Paket      | Ada rapat yang dilaksanakan setelah makan siang, sehingga untuk nasi kotak tidak terealisasi |   |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                           | 12 Paket       | 12 Paket       |                                                                                              |   |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan            | 1000 Dokumen   | 795 Dokumen    | Koran yang berlangganan Jambi independent, Jambi Ekspres, Tribun Jambi dan cakrawala         | - |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                | 650 Laporan    | 650 Laporan    |                                                                                              |   |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b> | <b>37 unit</b> | <b>37 unit</b> |                                                                                              |   |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                     | 34 unit        | 34 unit        |                                                                                              |   |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                 |             |             |                                                                                             |                                         |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                              | 3 unit      | 3 unit      |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                                       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | 12 Laporan  | 12 Laporan  |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | 12 Laporan  | 12 Laporan  |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 12 Laporan  | 12 Laporan  |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                             | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 13 Unit     | 13 Unit     |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                           | 13 Unit     | 13 Unit     |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                       | 3 Unit      | 3 Unit      |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Program Penataan Desa</b>                                                                                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>                                                                                   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                             |                                         |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa                                                   | 2 Desa      | 0 Desa      | 1. Desa Suban batas desa belum selesai<br>2. Desa Purwodadi Perbup Batas desa belum selesai | Mendorong desa menyelesaikan batas desa |  |

|  |  |  |  |                                                                                            |             |             |                               |                                       |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                              | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</b>    | 114 Desa    | 114 Desa    |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa                                        | 114 dokumen | 114 dokumen |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa                                           | 114 dokumen | 114 dokumen |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa                      | 57 orang    | 57 orang    |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa          | 1 dokumen   | 1 dokumen   |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa                                              | 1 dokumen   | 1 dokumen   |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa                                               | 1 dokumen   | 1 dokumen   |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penegasan batas desa                                  | 10 Desa     | 8 Desa      | Beberapa segmen belum sepakat | Mendorong desa menyepakati batas desa |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan           | 2 dokumen   | 2 dokumen   |                               |                                       |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                               |                                       |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                   |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota</b> | <b>422 lembaga kemasyarakatan</b> | <b>422 lembaga kemasyarakatan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat                                                                      | 422 lembaga                       | 422 lembaga                       |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna                                                                                                                                                                                   | 1 laporan                         | 1 laporan                         |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga                                                                                                                                       | 1 dokumen                         | 1 dokumen                         |  |  |  |

Sumber : Dinas PMD Kab. Tanjung Jabung Barat

8. Urusan Perhubungan; Dinas Perhubungan

| <div>Tabel 3.17.</div> <div>Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat</div> <div>Tahun Anggaran 2024</div> <div>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</div> <div>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024</div> |                                             |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |          |           |                   |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Urusan Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                      | OPD Pelaksana                               | Kebijakan                                                                                        | Program/Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                        | Target   | Realisasi | Permasalahan      | Upaya Mengatasi | Tindak Lanjut DPRD |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                  | Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat | Perbub nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Program Penunjang Urusan Pemereintah Daerah Kab/Kota                                 |                                                                                              | 12 Bulan | 12 Bulan  | Tidak Ada Masalah | -               | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                  | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia | 8 Dok    | 8 Dok     | Tidak Ada Masalah | -               | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | 5 Dok    | 5 Dok     | Tidak Ada Masalah | -               | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun                                                  | 3 Dok    | 3 Dok     | Tidak Ada Masalah | -               | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Keuangan OPD                                                                  | 12 Bulan | 12 Bulan  | Tidak Ada Masalah | -               | -                  |

|                                                                  |                                                                       |                 |                 |                   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|---|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN                     | 12 Bulan        | 12 Bulan        | Tidak Ada Masalah | - | - |
| Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium                                 | 1 Dok           | 1 Dok           | Tidak Ada Masalah | - | - |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>Jumlah DOKumen Kartu Inventaris</b>                                | 8 Dok           | 8 Dok           | Tidak Ada Masalah | - | - |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Barang Milik Daerah OPD Yang Diamankan                         | 8 Dok           | 8 Dok           | Tidak Ada Masalah | - | - |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> | <b>130 Stel</b> | <b>130 Stel</b> | Tidak Ada Masalah | - | - |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia Beserta Perlengkapannya            | 127 Stel        | 127 Stel        | Tidak Ada Masalah | - | - |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>     | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> | Tidak Ada Masalah | - | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Penerangan Kantor                                   | 12 Bulan        | 12 Bulan        | Tidak Ada Masalah | - | - |

|  |  |  |                                                          |                                                             |                |                |                                                                                                                                                                         |                             |   |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor              | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | 3 Paket        | 3 Paket        | Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi perkantoran (Kebutuhan Mebeler)    | Penambahan Anggaran Belanja | - |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Bahan Logistik Kantor                                | 1404 Kotak     | 1000 Kotak     | Tidak Ada Masalah                                                                                                                                                       | -                           | - |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah Barang Cetak (Blangko atau Formulir dan Penggandaan) | 12 Bulan       | 12 Bulan       | Tidak Ada Masalah                                                                                                                                                       | -                           | - |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan        | 1500 Eksempler | 1500 Eksempler | Tidak Ada Masalah                                                                                                                                                       | -                           | - |
|  |  |  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah     | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi                      | 12 Bulan       | 12 Bulan       | Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan mengingat banyaknya Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan urusan | Penambahan Anggaran Belanja | - |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                   |           |           |                   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|---|
| <p>Peningkatan aktivitas/konektivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan</p> <p>PERMENHUB NO. 19 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 531, 57 HLM</p> <p>UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan</p> | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)          | Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan                                         | 100%      | 100%      | Tidak Ada Masalah | - | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                   | Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                   | 8 Paket   | 8 Paket   | Tidak Ada Masalah | - | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor        | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Diuji                  | 1210 Unit | 1210 Unit | Tidak Ada Masalah | - | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara | 6 Paket   | 6 Paket   | Tidak Ada Masalah | - | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan     | Persentase Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan     | 100%      | 100%      | Tidak Ada Masalah | - | - |

|                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                  |                  |                                                                                                  |                                    |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>PP Nomor 74<br/>Tahun 2014<br/>Tentang<br/>Angkutan Jalan</b> | Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian                                                                                                                         | 36 Kali          | 36 Kali          | Tidak Ada Masalah                                                                                | -                                  | - |
|                                                                  | <b>Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>Persentase Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>6 Operasi</b> | <b>6 Operasi</b> | Tidak Ada Masalah                                                                                | -                                  | - |
|                                                                  | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | 6 Operasi        | 6 Operasi        | Tidak Ada Masalah                                                                                | -                                  | - |
|                                                                  | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                              | <b>Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                            | 1 Paket          | 1 Paket          | Tidak Ada Masalah                                                                                | -                                  | - |
|                                                                  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                                                                      | 1 Paket          | 1 Paket          | Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung tertib keselamatan | <b>Penambahan Anggaran Belanja</b> | - |

|  |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                               |   |   |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---|---|
|  |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |          |          | pengguna angkutan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas |   |   |
|  |  | Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                                                                                                     | Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran                                                                                                                                                                      | 100%     | 100%     | Tidak Ada Masalah                                             | - | - |
|  |  | PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran                                                                                                      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | Tidak Ada Masalah                                             | - | - |

|  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |          |          |                   |   |   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|---|---|
|  |  |                                                                 | Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota | Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai | 12 Bulan | 12 Bulan | Tidak Ada Masalah | - | - |
|  |  | PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                                                 | Halte Sungai dalam kondisi baik                                     | 4 Unit   | 4 Unit   | Tidak Ada Masalah | - | - |

|  |  |  |                                                           |                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |   |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
|  |  |  | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dalam kondisi baik | 2 Unit | 2 Unit | Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung pengembangan pelabuhan RORO Kuala Tungkal mengingat meningkatnya minat pengguna jasa kepelabuhan (Rehab Ruang Tunggu Penumpang, Rehab Berat Dolphin dan Pengembangan Dermaga dua Pelabuhan RORO Kuala Tungkal) | Penambahan Anggaran Belanja | - |
|  |  |  | Pemeliharaan Dermaga Sngai                                | Jumlah Halte Sungai dalam kondisi baik     | 2 Unit | 2 Unit | Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk menjaga prasarana laut kondisi baik yang menjadi penghubung antar desa ke kota                                                                                                                                           | Penambahan Anggaran Belanja | - |

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

| 9. Urusan Komunikasi dan Informatika; Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                             |                                   |               |           |                                                                                        |           |           |                                                                                       |                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Tabel 3.18.</p> <p>Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024</p> <p>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</p> <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 2024</p> |                                   |               |           |                                                                                        |           |           |                                                                                       |                                                                                                 |                                 |
| No                                                                                                                                                                                                                                                 | Urusan Pemerintahan               | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                  | Target    | Realisasi | Permasalahan                                                                          | Upaya Mengatasi Permasalahan                                                                    | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD* |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | Bidang Komunikasi Dan Informatika | Dinas Kominfo |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN                                       | 100%      | 100%      | Masih ada beberapa jabatan strutural / fungsional di Dinas Kominfo yang masih kosong. | Melaporkan ke BKPSDM untuk pengisian beberapa jabatan struktural / fungsional yang masih kosong |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 5 Laporan | 5 Laporan |                                                                                       |                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |           | Sub Keg. Penyusunan Dokumen                                                            | 2 Dokumen | 2 Dokumen |                                                                                       |                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |           | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 5 Laporan |                                                                                       |                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |           | Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | 4 Laporan | 4 Laporan |                                                                                       |                                                                                                 |                                 |

|  |  |  |  |                                                                                     |                 |                 |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                      | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                      | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Administrasi Pelaksana<br>Tugas ASN                         | 12<br>Dokumen   | 12<br>Dokumen   |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Koordinasi dan<br>Penyusunan                                              | 1 Dokumen       | 1<br>Dokumen    |  |  |  |
|  |  |  |  | Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                                |                 |                 |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | 50 Paket        | 50 Paket        |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                              |                 |                 |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                      | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>undangan | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg.<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD      | 12 Laporan      | 12<br>Laporan   |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>   | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                  | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik      | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub. Keg. Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                        | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Kegiatan Pemeliharaan<br/>Barang</b>                                      | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Daerah</b>               |                 |                 |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                               |                                              |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |                                                                                                             | Sub. Keg. Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                             | 19 Unit                       | 19 Unit                                      |  |  |  |
|  |  |  |                                                                                                             | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                                                             | 22 Unit                       | 22 Unit                                      |  |  |  |
|  |  |  |                                                                                                             | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan/Rehabilit asi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                     | 1 Unit<br>Gedung              | 1 Unit<br>Gedung                             |  |  |  |
|  |  |  |                                                                                                             | <b>PROGRAM APLIKASI<br/>INFORMATIKA</b>                                                                                                                                 | <b>12 Aplikasi<br/>44 OPD</b> | <b>12<br/>Aplikasi<br/>44 OPD<br/>(100%)</b> |  |  |  |
|  |  |  | Membangun<br>saluran<br>komunikasi data<br>antar OPD dalam<br>Kab. Tanjab Barat;                            | <b>Kegiatan: Pengelolaan<br/>Nama Domain yang<br/>telah Ditetapkan oleh<br/>Pemerintah Pusat dan<br/>Sub Domain di<br/>Lingkup Pemerintah<br/>Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>44 OPD</b>                 | <b>44 OPD<br/>100%</b>                       |  |  |  |
|  |  |  | Melaksanakan<br>pengembangan<br>dan pemeliharaan<br>jaringan internet<br>dan intranet Kab.<br>Tanjab Barat; | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan Sistem<br>Jaringan Intra Pemerintah<br>Daerah                                                                                           | 44 OPD                        | 44 OPD<br>100%                               |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | "A. Tersedianya subdomain yang dibutuhkan OPDB. Tersedianya pusat data dan informasi elektronik, aplikasi dan Portal Perangkat DataC.                                                | <b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>12 Aplikasi134Desa/Kelurahan 44 OPD</b> | <b>12 Aplikasi 134Desa/Kelurahan 44 OPD (100%)</b> | Belum adanya dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berpengaruh pada indeks SPBE Pemkab Tanjab Barat                                                                                                        | Mengusulkan dalam Renja dan mengkomunikasikan dengan bidang Data BAPPEDA                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | Tersedianya Portal Perangkat DaerahD. Tersedianya dukungan layanan penggunaan aplikasi SPBE di Lingkungan Pemkab. Tanjab BaratE. Melaksanakan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 5 Aplikasi                                 | 5 Aplikasi                                         | 1. Infrastruktur yang dimiliki Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum memadai secara optimal .<br>2. Perubahan Regulasi menyebabkan perlu dilakukan update aplikasi - aplikasi<br>3. Kekurangan SDM Pengelola Teknologi Informasi | 1. Mengoptimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan satu perangkat untuk Multi Aplikasi<br>2. Melakukan Update aplikasi dengan pemanfaatan source gratis atau adopsi aplikasi<br>3. Memanfaatkan SDM yang tersedia secara optimal |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |               |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Internet<br>Lingkup Pemkab.<br>Tanjab Barat<br>F.<br>Penyelenggaraan<br>Tata<br>Kelola<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik<br>G.<br>Melaksanakan<br>Penyelenggaraan<br>Layanan | Sub Kegiatan<br>Pengembangan dan<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Teknologi<br>Informasi dan<br>Komunikasi Pemerintah<br>Daerah | 10<br>Dokumen | 10<br>Dokumen | 1. Terdapatnya Organisasi<br>Perangkat Daerah yang belum<br>melakukan Update Informasi<br>Terhadap Portal Yang telah<br>disediakan<br>2. Kekurangan SDM Pengelola<br>Teknologi Informasi | 1. Memberikan Konsultasi<br>Langsung kepada Admin - Admin<br>OPD yang telah ditunjuk<br>2. Memberi<br>himbauan kepada<br>OPD untuk<br>melakukan update Informasi |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                     |                                                                                              |                |                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |  |  | Komunikasi Pendukung Penerapan e-Government di Pemkab. Tanjab Barat | Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                         | 12 Dokumen     | 12 Dokumen     | 1. Keterbatasan Anggaran untuk sosialisasi penerapan implementasi SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah yang belum Optimal.2. Pemahaman pemanfaatan teknologi masing - masing organisasi perangkat daerah belum optimal | 1. Memberikan Monitoring langsung dan bersurat terhadap Organisasi Perangkat daerah terhadap penerapan SPBE2. Memberikan konsultasi dan rekomendasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang akan menerapkan pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan Layanan Pemerintah |                                                 |
|  |  |  |                                                                     | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                               | <b>4 Media</b> | <b>4 Media</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|  |  |  |                                                                     | <i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>4 Media</i> | <i>4 Media</i> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penempatan Media Informasi mengenai pembangunan |

|  |  |  |  |                                                   |           |           |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Monitoring opini dan aspirasi publik | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Belum optimalnya pemahaman OPD dalam merespon pengaduan masyarakat | Meningkatkan pengetahuan OPD khususnya operator yang bertugas memantau pengaduan masyarakat melalui sosialisasi dan bimbingan teknis | dan promosi pemerintah kabupaten dengan menggunakan sarana billboard agar dilakukan secara merata dan menjangkau ke wilayah kecamatan-kecamatan dalam kabupaten. Untuk efektivitas dan efisiensi perlu optimalisasi penggunaan media sosial dan media elektronik lainnya. Yang dapat menyasar publik secara cepat dan meluas |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 4 Dokumen | 4 Dokumen |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |  |                                                    |             |             |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pelayanan informasi publik            | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan informasi publik                              | Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasaranalayanan informasi publik                                                      | Untuk sarana billboard sudah diusulkan dalam Renja Dinas Kominfo Tahun 2024, namun dalam implementasi ya belum terlaksana karena prioritas anggaran ke pemenuhan anggaran untuk kerjasama media. |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 500 Dokumen | 500 Dokumen | Kurangnya SDM di Bidang PKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Peningkatan SDM di Bidang PKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan untuk SDM) | Untuk optimalisasi media sosial dan media elektroniknya sudah dilaksanakan dengan memposting setiap kegiatan Pemkab melalui media sosial yang dikelola diskominfo lewat Facebook,                |

|   |                     |  |  |                                                                                                                                                     |               |               |  |  |                                                                                              |
|---|---------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |  |  |                                                                                                                                                     |               |               |  |  | Instagram,<br>Tiktok dan<br>Youtube.<br>Termasuk di<br>website<br>www.tanjabbar<br>kab.go.id |
|   |                     |  |  | Sub Kegiatan Layanan<br>Hubungan Media                                                                                                              | 4 Layanan     | 4<br>Layanan  |  |  |                                                                                              |
|   |                     |  |  | Sub Kegiatan<br>Penyediaan/Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Informasi<br>dan Komunikasi<br>Publik Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota | 3 Unit        | 3 Unit        |  |  |                                                                                              |
| 2 | Bidang<br>Statistik |  |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGAR AAN<br/>STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                                          | <b>44 OPD</b> | <b>44 OPD</b> |  |  |                                                                                              |

|          |                          |  |  |                                                                                                                   |               |               |  |  |  |
|----------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|          |                          |  |  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>44 OPD</b> | <b>44 OPD</b> |  |  |  |
|          |                          |  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>Bidang Persandian</b> |  |  | <b>ROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                               | <b>45%</b>    | <b>45%</b>    |  |  |  |
|          |                          |  |  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>44 OPD</b> | <b>44 OPD</b> |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                       |            |            |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 13 Laporan | 13 Laporan |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat

10. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Perdagangan (Urusan Pemerintahan Pilihan); Dinas Koperasi, UsahaKecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

Tabel 3.19.  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tanjung  
Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                                                        |                                                    |           |                                                                                  |           |           |              |                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| No                                                                    | URUSAN PEMERINTAHAN                                                    | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA              | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                             | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1.                                                                    | Urusan Pemerintahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>              |           |           |              |                              |                                |
|                                                                       |                                                                        |                                                    |           | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |           |           |              |                              |                                |
|                                                                       |                                                                        |                                                    |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | 5 Dokumen | 5 dokumen |              |                              |                                |
|                                                                       |                                                                        |                                                    |           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    |           |           |              |                              |                                |

|  |  |  |  |                                                                           |            |            |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 30 Orang   | 30 Orang   |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                             | 12 Dokumen | 12 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                          |            |            |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                    | 1 Paket    | 1 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 |            |            |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor         | 2 Paket    | 2 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 1 Paket    | 1 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | 12 Paket   | 12 Paket   |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 | 1 Paket    | 1 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | 12 Dokumen | 12 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 12 Laporan | 12 Laporan |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |            |            |  |  |  |

|                                                                                                                    |            |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 1 Unit     | 1 Unit     |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 15 Unit    | 1 Paket    |  |  |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |            |            |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12 Laporan | 12 Laporan |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 Laporan | 12 Laporan |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Laporan | 12 Laporan |  |  |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |            |            |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25 Unit    | 25 Unit    |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | 22 Unit    | 22 Unit    |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1 Unit     | 1 Unit     |  |  |  |

|    |                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |               |               |  |  |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2. | Koperasi dan UMKM | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan Koperasi dan UMKM untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis, atau bidang lainnya baik di sektor hulu maupun hilir</li> <li>-</li> </ul> | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                     |               |               |  |  |  |
|    |                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                          | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |               |               |  |  |  |
|    |                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                          | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                             | 50 unit usaha | 50 unit usaha |  |  |  |
|    |                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                          | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                               | 50 unit usaha | 60 unit usaha |  |  |  |
|    |                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                          | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>                                                                                                      |               |               |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                         |               |               |                                                                                                                    |                                                                                                      |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                        |               |               |                                                                                                                    |                                                                                                      |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 14 Unit Usaha | 14 Unit Usaha | Tidak Adanya fasilitas izin dikarenakan tidak adanya pembinaan dari KSP maupun KC/KCP Simpan Pinjam                |                                                                                                      |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                    |                                                                                                      |  |
|  |  |  | <b>Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                   |               |               |                                                                                                                    |                                                                                                      |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 50 unit usaha | 38 unit usaha | Dalam kegiatan tidak dianggarkan pelaksanaan pembinaan koperasi, penilaian dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan | Melakukan penilaian melalui dokumen laporan koperasi, penilaian dilaksanakan dengan kegiatan lainnya |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                                                                                   |               |               |                                                                                                                    |                                                                                                      |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |               |               |                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                            |               |               |                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           | 35 unit usaha | 35 unit usaha |                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                           |               |               |                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan</b> |               |               |                                                                                         |  |  |
|  |  |  |  | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                               | 10 unit usaha | 3 unit usaha  | Kekurangan Anggaran untuk Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro                    |  |  |
|  |  |  |  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                            | 80 unit usaha | 15 unit usaha | Kekurangan Anggaran untuk pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro |  |  |

|    |                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | 200 unit usaha | 0          | Anggaran untuk pelatihan dan pendampingan memanfaatkan sistem aplikasi membukuaan / mencatatkan keuangan usaha mikro dan usaha kecil di alihkan ke sub kegiatan belanja pakaian adat daerah yang berupa pakaian teluk belango |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                      | 100 orang      | 45 orang   | Usulan untuk proposal hibah tidak berkelompok dan alamat yang mengajukan proposal tidak tertera                                                                                                                               | <p>- Memberi himbauan kepada pelaku usaha yang ingi mengajukan proposal harus memiliki kelompok UMKM</p> <p>- Memberikan Konsultasi bagi yang membuat proposal untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti alamat usaha, izin usaha, NIB, No.HP dan RAB</p> |  |
| 3. | Urusan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Aktivitas perekonomian yang merata dari Desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan</li> <li>- Dengan memanfaatkan letak strategis yaitu</li> </ul> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                         |                |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                 |                |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                               | 10 Dokumen     | 10 Dokumen |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |           |           |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  |  | berbatasan dengan pulau Batam, negara Singapura, dan Malaysia, serta berbatasan secara interregional (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Indragiri Hilir- Provinsi Riau), mendorong peningkatan ekspor dengan mengutamakan hasil produk olahan dan produk unggulan daerah. | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                       | 5 Dokumen | 5 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b> |           |           |  |  |  |



|  |  |  |  |                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> | <p>48 laporan</p> | <p>Kegiatan untuk penangan Inflasi terhadap Kebutuhan Pokok dan barang penting lainnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melihat kondisi dan situasi ekonomi di lapangan, yang mana untuk tahun 2024, inflasi yang terjadi tidak begitu signifikan dan hanya komoditi cabe yang fluktuatif, harga yang turun naik.</li> <li>2. Untuk penyaluran dana subsidi perlu payung hukum berupa Peraturan Bupati dan aturan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 pedoman berupa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok. SK Bupati tentang Penetapan Besaran Harga Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat Pada Pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Koordinasi dan Konsultasi kegiatan juga telah kami laksanakan, sampai akhir Desember 2024 dikarenakan</li> </ol> |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                             |                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |                             | situasi tersebut diatas, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan/laksanakan |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR |                                                                                  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                     |                |                 |                                                                                                                                                              |                     |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                |                 |                                                                                                                                                              |                     |  |
|  |  |  |  | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                | 8 Pelaku Usaha | 17 Pelaku Usaha |                                                                                                                                                              |                     |  |
|  |  |  |  | PROGRAM STANDASISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                      |                |                 |                                                                                                                                                              |                     |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan                                                                                 |                |                 |                                                                                                                                                              |                     |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                                | 950 unit       | 803 unit        | Dalam beberapa tahun ini belum maksimalnya Kegiatan ini dikarnakan Kekurangan nya Pagu Anggaran dan Kurangnya kesadarnya masyarakat untuk menerakan UTTP nya | Kekurangan Anggaran |  |

|    |                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|    |                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal                                              | 125 orang  | 106 orang  | Dalam beberapa tahun ini belum maksimalnya Kegiatan ini dikarenakan kurang pagu Anggaran, Jadi kami sangat kesulitan untuk melaksanakan Penyuluh dan Pengawasan Baik Pengawasan Barang Terbungkus (BDKT) dan Pengawasan tera teraulang yang sudah di tera /belum di tera | Kekurangan Anggaran |  |
| 4. | Urusan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Pembangunan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.</li> <li>- Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri</li> </ul> | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |
|    |                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |
|    |                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          | 40 Dokumen | 40 Dokumen |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |
|    |                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |            |                                         |                                                              |                                                                                          |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | pengolahan dari bahan baku menjadi produk dengan memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, melalui penawaran kelengkapan infrastruktur pendukung, birokrasi yang efektif dan efisien serta situasi yang kondusif. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      | 40 Dokumen | 40 Dokumen                              |                                                              |                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                               | 1 Dokumen  | 1 Naskah Akademik RPIK, 1 Ranperda RPIK | 1 Ranperda RPIK Belum di Sahkan oleh badan legeslatif daerah | Telah mengajukan nota dinas pembahasan ke DPRD Th 2024 sudah di daftarkan di dalam badan |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                                   |            |                                         |                                                              |                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas</b>                                                                                  |            |                                         |                                                              |                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 43 Dokumen | 48 Dokumen                              |                                                              |                                                                                          |  |

|  |  |  |  |                                                                                                  |               |               |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Diseminasi, Publikasi Data<br>Informasi dan Analisa<br>Industri Kabupaten/Kota<br>melalui SIINas | 10<br>Dokumen | 10<br>Dokumen |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tanjung Jabung Barat

| 11. Urusan Penanaman Modal; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                                                  |                        |                                                                                       |                                          |                                                                |                 |                 |              |                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| <p>Tabel 3.20.</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>Tahun Anggaran 2024</p> <p>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</p> |                        |                                                                                       |                                          |                                                                |                 |                 |              |                              |                                |
| DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024                                                                                                    |                        |                                                                                       |                                          |                                                                |                 |                 |              |                              |                                |
| No                                                                                                                                                                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN    | OPD PELAKSANAAN                                                                       | KEBIJAKAN*)                              | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                         | TARGET          | REALISASI       | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1                                                                                                                                                                                                   | Bidang Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota   | 100%            | 99,99%          | -            | -                            | -                              |
|                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                       |                                          | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan      | 10 Laporan      | -            | -                            | -                              |
|                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                       |                                          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | 10 Laporan      | 10 Laporan      | -            | -                            | -                              |
|                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                       |                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                         | 12 Bulan        | 12 Bulan        | -            | -                            | -                              |
|                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                       |                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | 30 Orang/ bulan | 24 Orang/ bulan | -            | -                            | -                              |
|                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                       |                                          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen      | 12 Dokumen      | -            | -                            | -                              |

|  |  |  |                                          |                                                                   |             |             |   |   |   |
|--|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|
|  |  |  |                                          | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                         | 12 Bulan    | 12 Bulan    | - | - | - |
|  |  |  |                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 15 Paket    | 15 Paket    | - | - | - |
|  |  |  |                                          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 50 Paket    | 50 Paket    | - | - | - |
|  |  |  |                                          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 100 Paket   | 100 Paket   | - | - | - |
|  |  |  |                                          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 1000 Paket  | 1000 Paket  | - | - | - |
|  |  |  | Memenuhi kebutuhan sarpras               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | 24 Dokumen  | 24 Dokumen  | - | - | - |
|  |  |  |                                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 500 Laporan | 701 Laporan | - | - | - |
|  |  |  |                                          | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>                  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | - | - | - |
|  |  |  |                                          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | 130 Paket   | 130 Paket   | - | - | - |
|  |  |  |                                          | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</i>                | 12 Bulan    | 12 Bulan    | - | - | - |
|  |  |  |                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 12 Laporan  | 12 Laporan  | - | - | - |
|  |  |  | Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | 12 Laporan  | 12 Laporan  | - | - | - |

|   |  |  |                            |                                                                                                                    |                                                   |                  |                  |   |   |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---|
|   |  |  |                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 100%                                              | 100%             | -                | - | - |
|   |  |  |                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 Unit                                            | 2 Unit           | -                | - | - |
|   |  |  |                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 1 Unit                                            | 1 Unit           | -                | - | - |
|   |  |  |                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 12 Unit                                           | 12 Unit          | -                | - | - |
|   |  |  |                            | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya                                                                   | 1 Unit                                            | 1 Unit           | -                | - | - |
|   |  |  |                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 19 Unit                                           | 19 Unit          | -                | - | - |
|   |  |  |                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 15 Unit                                           | 15 Unit          | -                | - | - |
|   |  |  |                            | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 4 Unit                                            | 4 Unit           | -                | - | - |
| 2 |  |  | Memenuhi kebutuhan sarpras | Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang                                                          | <b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | - | - |

|   |  |                                                                                                     |                                                                                                               |                  |                   |   |   |   |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| 3 |  | investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat                | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen        | 1 Dokumen         | - | - | - |
|   |  |                                                                                                     | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                | 1 Perda          | 1 Perda           | - | - | - |
|   |  | Meningkatkan layanan promosi dan investasi                                                          | <b>Program Promosi Penanaman Modal</b>                                                                        | <b>2</b>         | <b>2</b>          | - | - | - |
|   |  |                                                                                                     | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                        | 2 Calon Investor | 2 Calon Investor  | - | - | - |
|   |  |                                                                                                     | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota                                           | 2 Kegiatan       | 2 Kegiatan        | - | - | - |
|   |  |                                                                                                     | Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota                          | 1 Dokumen        | 1 Dokumen         | - | - | - |
|   |  | Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel | <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>                                                                      | <b>2000 Izin</b> | <b>5.229 Izin</b> | - | - | - |

|   |  |  |                                                  |                                                                                                                                                |                   |                    |                                                                                                  |   |   |
|---|--|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |  |  | untuk mempercepat proses perizinan               | <i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota</i> | 2000 Izin         | 5.229 Izin         | -                                                                                                | - | - |
|   |  |  |                                                  | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 1500 Pelaku Usaha | 4.688 Pelaku Usaha | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha sehingga meningkatnya pelayanan perizinan | - | - |
|   |  |  |                                                  | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                     | 400 Pelaku Usaha  | 541 Pelaku Usaha   | Meningkatnya Pelayanan Perizinan menyebabkan meningkatnya pemantauan Pelaku usaha                | - | - |
|   |  |  |                                                  | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                               | 57 Pelaku Usaha   | 57 Pelaku Usaha    | -                                                                                                | - | - |
|   |  |  |                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah                                                                     | 3 Dokumen         | 3 Dokumen          | -                                                                                                | - | - |
| 5 |  |  | Meningkatkan pemantauan dan pengawasam investasi | <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>                                                                                        | 370 Milyar        | 554,64 Milyar      | -                                                                                                | - | - |

|   |  |  |  |                                                                                                                        |                           |                           |                                                                                                                                       |   |   |
|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |  |  |  | <i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mejadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>                          | 370 Milyar                | 554,64 Milyar             | -                                                                                                                                     | - | - |
|   |  |  |  | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya               | 6 Kegiatan Usaha          | 6 Kegiatan Usaha          | -                                                                                                                                     | - | - |
|   |  |  |  | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                   | 80 Pelaku Usaha           | 240 Pelaku Usaha          | Peningkatan Peserta Bimbingan Teknis dikarenakan meningkatnya minat Pelaku Usaha serta kegiatan ini mendapatkan bantuan pendanaan DAK | - | - |
|   |  |  |  | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                             | 12 Kegiatan Usaha         | 35 Kegiatan Usaha         | Peningkatan Pengawasan Penanaman Modal ditingkatkan untuk peningkatan realisasi investasi                                             | - | - |
| 6 |  |  |  | <b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>                                                   | <b>1 Sistem Informasi</b> | <b>1 Sistem Informasi</b> | -                                                                                                                                     | - | - |
|   |  |  |  | <i>Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i> | <i>1 Sistem Informasi</i> | <i>1 Sistem Informasi</i> | -                                                                                                                                     | - | - |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |           |           |   |   |   |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|
|  |  |  |  | Pengelolaan,<br>Penyajian dan<br>Pemanfaatan Data<br>dan Informasi<br>Perizinan dan Non<br>Perizinan Berbasis<br>Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi secara<br>Elektronik | 1 Laporan | 1 Laporan | - | - | - |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Urusan Pariwisata (Urusan Pemerintahan Pilihan); Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Tabel 3.21.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024  
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN                                                                                                             | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                           | TARGET       | REALISASI     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                   | 3             | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                               | 6            | 7             | 8            | 9                            | 10                             |
| 1  | PARIWISATA          | DISPARPORA    | Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                                      | 60.000 Orang | 444.474 Orang |              |                              |                                |
|    |                     |               |                                                                                                                       | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>                                                                 | 4 Kawasan    | 4 Kawasan     |              |                              |                                |
|    |                     |               |                                                                                                                       | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kabupaten/ Kota | 5 Unit       | 5 Unit        |              |                              |                                |
|    |                     |               |                                                                                                                       | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</b>                                                                        | 1 Lokasi     | 1 Lokasi      |              |                              |                                |
|    |                     |               |                                                                                                                       | Pengembangan Destinasi pariwisata                                                                                               | 1 Lokasi     | 1 Lokasi      |              |                              |                                |

|                                                                                                                                                   |           |            |                                                                                  |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Kabupaten/ Kota                                                                                                                                   |           |            |                                                                                  |                                                     |  |
| <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                                                               | 100%      | 100%       |                                                                                  |                                                     |  |
| <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>                          | 3 Media   | 3 Media    |                                                                                  |                                                     |  |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                                     | 3 Laporan | 3 Laporan  |                                                                                  |                                                     |  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>                                         | 30%       | 13.64%     | Banyak Pelaku Ekraf yang melakukan inovasi dan kreasi namun belum berdaya saing. | Terus melakukan pendampingan terhadap pelaku Ekraf. |  |
| <b>Penyediaan Pasarana (Zona Kreatif/RuangKreatif /Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di</b> | 5 Inovasi | 12 Inovasi |                                                                                  |                                                     |  |

|  |                                    |                   |                                              |                                                                                                                                   |                        |                        |                                                                                                            |                                                                |  |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                    |                   |                                              | <b>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                  |                        |                        |                                                                                                            |                                                                |  |
|  |                                    |                   |                                              | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif                                                                              | 3 Unit                 | 3 Unit                 |                                                                                                            |                                                                |  |
|  |                                    |                   |                                              | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA<br/>PARIWISATA DAN<br/>EKONOMI KREATIF</b>                                            | <b>20 Orang</b>        | <b>21 Orang</b>        |                                                                                                            |                                                                |  |
|  |                                    |                   |                                              | <b>Pelaksanaan<br/>Peningkatan<br/>Kapasitas Sumber<br/>Daya Manusia<br/>Pariwisata dan<br/>Ekonomi Kreatif<br/>Tingkat Dasar</b> | 2 Kegiatan             | 2 Kegiatan             |                                                                                                            |                                                                |  |
|  |                                    |                   |                                              | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, uru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)                                   | 20 Orang               | 30 Orang               |                                                                                                            |                                                                |  |
|  |                                    |                   |                                              | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                                        | 20 Orang               | 21 Orang               |                                                                                                            |                                                                |  |
|  | <b>KEPEMUDAAN<br/>DAN OLAHRAGA</b> | <b>DISPARPORA</b> | Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KAPASITAS DAYA<br/>SAING<br/>KEPEMUDAAN</b>                                                       | <b>6.000<br/>Orang</b> | <b>5.894<br/>Orang</b> | Belum tersusunnya data base kepemudaa, sehingga peningkatan kepemudaan masih terfokus diibukota kecamatan. | Melakukan roadshow dan pendataan pemuda ke desa dan kelurahan. |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |           |           |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</b> | 381 Orang | 390 Orang |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                             | 26 Orang  | 26 Orang  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula                                                                           | 350 Orang | 364 Orang |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                                                                                        | 1 Kwarcab | 1 Kwarcab |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                                                                                                 | 15 Orang  | 107 Orang |  |  |  |
|  |  |  |  | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan                                                                                                                 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |

|                                                         |                                                                                                                              |           |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Perda Nomor 12<br>Tahun 2019<br>Tentang<br>Keolahragaan | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KAPASITAS DAYA<br/>SAING<br/>KEOLAHRAGAAN</b>                                                | 45 Medali | 125 Medali |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |  |
|                                                         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | 75%       | 60.02%     | Meningkatnya antusias atlit muda untuk bergabung kecabang olahraga, namun kegiatan pembinaan olahraga sangat terbatas.                                                             | Koordiansi kepengurus cabang olahraga untuk memaksimalkan pembinaan atlit muda kesekolah- sekolah.           |  |
|                                                         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota                            | 22 Unit   | 22 Unit    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |  |
|                                                         | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                     | 45%       | 20.78%     | Tidak tercapainya target tersebut karena meningkatnya atlit muda yang bergabung pada beberpa cabor, dimana jumlah atlit awal tahun sebanyak 589 orang bertambah menjadi 948 orang. | Terus meningkatkan koordinasi pada setiap cabor untuk meningkatkan kemampuan atlit agar mampu berdaya saing. |  |
|                                                         | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Single Event dan Multi Event Tingkat Kab/ Kota                                            | 4 Dokumen | 5 Dokumen  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |  |
|                                                         | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan                                                                          | 178 Orang | 227 Orang  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |  |

|  |  |  |  |                                                                             |                            |                            |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Kejuaraan                                                                   |                            |                            |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b> | 37 Cabor                   | 40 Cabor                   |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota                | 45 Orang                   | 167 Orang                  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota                              | 80 Orang                   | 132 Orang                  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                         | <b>8 Cabor/ Inorga</b>     | <b>10 Cabor/ Inorga</b>    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi  | 3 Dokumen                  | 7 Dokumen                  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>                | <b>77</b>                  | <b>85.21</b>               |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>40 Dokumen/ laporan</b> | <b>40 Dokumen/ laporan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | 9 Dokumen                  | 9 Dokumen                  |  |  |  |

|                                                                                       |                  |                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan       | 18 Laporan       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 13 Laporan       | 13 Laporan       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>                                         | <b>3 Laporan</b> | <b>2 Laporan</b> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 14 Orang         | 14 Orang         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12 Dokumen       | 12 Dokumen       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                                    | 1 Laporan        | 1 Laporan        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | 1 Laporan        | 1 Laporan        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 1 Laporan        |                  | Dokumen perubahan telah disusun sebelum melakukan laporan Prognosis. Sehingga tidak efisien dan efektif untuk penyusunan laporan prognosis. | Pergeseran pada setiap kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan melakukan reschedule perencanaan, agar anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien. |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>                                      | <b>95%</b>       | <b>95%</b>       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |

|                                                                         |                   |                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | 3 Paket           | 3 Paket           |  |  |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>12 Bulan</b>   | <b>12 Bulan</b>   |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 10 Paket          | 10 Paket          |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 12 Paket          | 12 Paket          |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 12 Paket          | 12 Paket          |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 4 Paket           | 4 Paket           |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | 5 Dokumen         | 6 Dokumen         |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan        | 12 Laporan        |  |  |  |
| <b>Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>19 Unit</b>    | <b>19 Unit</b>    |  |  |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 8 Unit            | 8 Unit            |  |  |  |
| Pengadaan dan Peralatan Mesin lainnya                                   | 11 Unit           | 11 Unit           |  |  |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>36 Laporan</b> | <b>36 Laporan</b> |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                   |                 |                 |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                    | 12 Laporan      | 12 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 Laporan      | 12 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | 12 Laporan      | 12 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                        | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 14 Kendaraan    | 14 Kendaraan    |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | 20 Unit         | 20 Unit         |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 1 Gedung        | 1 Gedung        |  |  |  |

Sumber : Dinas Parpora Kab. Tanjung Jabung Barat

| 13. Urusan Perpustakaan; Urusan Kearsipan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                              |                                                       |                                  |                                                                                                         |                                                                     |        |           |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tabel 3.22.<br>Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Tanjung<br>Jabung Barat Tahun Anggaran 2024<br>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024<br>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                                                       |                                  |                                                                                                         |                                                                     |        |           |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                |
| No                                                                                                                                                                                                                                       | URUSAN PEMERINTAHAN                                   | OPD PELAKSANA                    | KEBIJAKAN                                                                                               | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN                                                                                                          | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                            | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah Perpustakaan dan Kearsipan yang efektif, efisien dan transparan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA         | 100%   | 100%      | Kurang maksimalnya kinerja disebabkan oleh kurangnya SDM yang berkompeten serta support anggaran yang kurang memadai. | Perlu peningkatan kompetensi SDM perencana, SDM perpustakaan, dan SDM kearsipan serta support anggaran. |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                  |                                                                                                         | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%   | 100%      | Tidak adanya pejabat fungsional perencana sehingga kurang optimalnya kinerja dalam kegiatan perencanaan.              | Perlunya penambahan pejabat fungsional perencana yang potensial dan                                     |                                |

|  |  |  |  |                                                                                       |             |             |                                                                                                     |                                                                    |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Dokumen   | 7 Dokumen   |                                                                                                     | berkompeten dibidangnya.                                           |  |
|  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 3 Dokumen   | 3 Dokumen   |                                                                                                     |                                                                    |  |
|  |  |  |  | <b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> | Sumber Daya Manusia yang ada belum mencukupi dan potensial serta support pagu anggaran yang memadai | Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia dan alokasi pagu anggaran. |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 24 OB       | 24 OB       |                                                                                                     |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |                                                                                                     |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |                                                                                                     |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 14 Laporan  | 14 Laporan  |                                                                                                     |                                                                    |  |

|                                                                          |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>3. Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>              | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya             | 55 Paket    | 55 Paket    |
| <b>4. Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik / Penerangan<br>Bangunan Kantor | 4 Paket     | 4 Paket     |
| Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan kantor                          | 4 Paket     | 4 Paket     |
| Penyediaan Bahan Logistik<br>kantor                                      | 4 Paket     | 4 Paket     |
| Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                               | 4 Paket     | 4 Paket     |
| Penyediaan bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan          | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |

|  |  |  |  |                                                                            |             |             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | 12 Laporan  | 12 Laporan  | Masih kurangnya Anggaran perjalanan Dinas.                                                        | Untuk perjalanan Dinas perlu dialokasikan tambahan pagu anggaran dikarenakan seringnya undangan dari Perpusnas dan ANRI yang harus dihadiri terkait Rakor, Bimtek, Sosialisasi dan Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sehingga membutuhkan biaya perjalanan Dinas yang maksimal. |  |
|  |  |  |  | <b>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | 1. Pengadaan sarana/ prasarana perlu perencanaan yang matang serta support anggaran yang memadai. | Meningkatkan SDM pejabat pengelola pengadaan sarana/ prasarana.                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | 15 Unit     | 15 Unit     | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas (usia kendaraan Dinas yang sudah tua dan kondisi fisik kendaraan)    | 2. Alokasi Anggaran Untuk Kendaraan Dinas                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | 15 Unit     | 15 Unit     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Penyediaan Jasa surat menyurat                                                                                     | 12 Laporan  | 12 Laporan  |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik                                                            | 12 Laporan  | 12 Laporan  |
| Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Laporan  | 12 Laporan  |
| <b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 10 Unit     | 10 Unit     |

|  |  |  |  |                                                                                                                  |        |        |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 Unit | 5 Unit |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                         | 5 Unit | 3 Unit |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 2 Unit | 2 Unit |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | 2 Unit | 2 Unit |  |  |

|   |                            |                                  |                                                                                                                                                                              |                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |  |
|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Urusan Bidang Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Peningkatan Pengelolaan, pelayanan, pengembangan otomasi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan yang prima dalam rangka meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat. | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Akreditasi B | Akreditasi C | <p>1. Pada Tahun 2024 Perpustakaan Nasional tidak menganggarkan anggaran untuk akreditasi perpustakaan umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, akreditasi dilaksanakan untuk Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan (Hal ini sesuai dengan Surat Perpustakaan Nasional Nomor :B.2196/4/PPM.02/V.2024 Tanggal 02 Mei 2024 Perihal Akreditasi Perpustakaan.</p> <p>2. Dinas perpustakaan sudah mengajukan anggaran perubahan untuk Re-akreditasi perpustakaan ditahun 2024 (Dilakukan secara mandiri, semua biaya ditanggung oleh Perpustakaan Umum) tetapi tidak disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</p> | Re-akreditasi perpustakaan mandiri akan dilakukan ditahun 2025 dan akan mengajukan kembali anggaran pada APBD-P Tahun 2025. |  |
|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                   |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>1<br/>Perpustakaan</b> | <b>1<br/>Perpustakaan</b> | Anggaran untuk pelaksanaan Akreditasi Mandiri telah diusulkan pada APBD P Tahun 2024 tetapi belum dapat disetujui dan terakomodir ditahun 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | akan diusulkan anggaran untuk Akreditasi Mandiri pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025                                                                                                                              |  |
|  |  |  |  | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik     | 500 Layanan               | 11.407 Layanan            | Pengunjung layanan perpustakaan elektronik telah melebihi target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan 1. Perkembangan dunia teknologi yang disesuaikan dengan perkembangan generasi pengguna(Pemustaka) pada saat ini. 2. Perubahan prilaku masyarakat dan pemustaka sudah melek Literasi Digital hal ini dikarenakan Perpustakaan umum telah melakukan sosialisasi dan Promosi yang efektif. Permasalahan pada kegiatan ini adanya kendala teknis pada server. | Telah dilakukan maintenace setiap tahunnya, dan dilakukan migrasi keserver lainnya dan pengembangan pada layanan perpustakaan elektronik yaitu penambahan fitur yaitu layanan audio book untuk pemustaka disabilitas. |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                      |                    |                    |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 3<br>Perpustakaan  | 3<br>Perpustakaan  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka                                                                           | 1200<br>Eksemplar  | 1434<br>Eksemplar  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b>25 desa/kel</b> | <b>25 desa/kel</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat             | 25 lokus           | 25 lokus           |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 3<br>perpustakaan  | 3<br>perpustakaan  |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                           |                 |                 |                                                                                                                           |                                                                             |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                        | 6 Orang         | 6 Orang         |                                                                                                                           |                                                                             |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                             | 5 Perpustakaan  | 5 Perpustakaan  |                                                                                                                           |                                                                             |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                                               | <b>2 Naskah</b> | <b>1 Naskah</b> |                                                                                                                           |                                                                             |  |
|  |  |  |  | <b>1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             | <b>2 Naskah</b> | <b>2 Naskah</b> |                                                                                                                           |                                                                             |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 5 Orang         | 2 Orang         | kurangnya peranaktif masyarakat yang menyimpan Naskah Kuno untuk melaporkan kepemilikan Naskah Kuno ke Dinas Perpustakaan | Akan disosialisasikan kembali tentang pelestarian naskah kuno di Tahun 2025 |  |

|   |                         |                                  |                                                                            |                                                                                                                             |              |               |                                                                               |                                                                                                                              |  |
|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                         |                                  |                                                                            | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 2 Eksemplar  | 2 Eksemplar   | Akan dilaksanakan pengalihmediaan dan Alih Aksara Naskah Kuno pada Tahun 2025 | Akan disosialisasikan kembali tentang pelestarian naskah kuno di Tahun 2025                                                  |  |
| 3 | Urusan Bidang Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Peningkatan Jumlah Arsip/Dokumen Daerah yang Dilestarikan dan Diselamatkan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                   | 100%         | 353%          |                                                                               | Adanya Peningkatan Pengelolaan Arsip dari OPD, dan sudah mengaplikasikan aplikasi Srikandi di kabupaten Tanjung Jabung Barat |  |
|   |                         |                                  |                                                                            | 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota                                                                         | 2.500 Berkas | 18.191 Berkas |                                                                               |                                                                                                                              |  |
|   |                         |                                  |                                                                            | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                                     | 2.500 Berkas | 18.191 Berkas |                                                                               |                                                                                                                              |  |

|  |  |  |  |                                                                                           |                    |                   |                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                 | 2.500 Berkas       | 18.191 Berkas     |                                                                                                               |  |  |
|  |  |  |  | <b>2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>5.000 Arsip</b> | 8.314 Arsip       |                                                                                                               |  |  |
|  |  |  |  | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                  | 5.000 Arsip        | 8.314 Arsip       | Karena telah dilakukan akusisi dari pencipta arsip                                                            |  |  |
|  |  |  |  | <b>3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b> | <b>1 Aplikasi</b>  | <b>1 Aplikasi</b> |                                                                                                               |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN   | 150 Pengguna       | 500 Pengguna      | Karena telah dilakukan sosialisasi aplikasi SIKN-JIKN sehingga meningkatnya jumlah pengguna yang mengaksesnya |  |  |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat

c. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
1. Urusan Kelautan dan Perikanan; Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.23.  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung  
Jabung BaratTahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM. KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | URUSAN PEMERINTAH      | OPD PELAKSANA   | KEBIAJAKAN                                        | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUPUT)    | CAPAIAN TAHUN 2024 |           | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI MASALAH | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
|    |                        |                 |                                                   |                                                                 |                                                            | TARGET             | REALISASI |              |                         |                               |
| 1  | 2                      | 3               | 4                                                 | 5                                                               | 6                                                          | 8                  | 9         | 10           | 11                      | 12                            |
| I. | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan | Peningkatan Nlai AKIP Organisasi Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor  | 100%               | 100%      |              |                         |                               |
|    |                        |                 |                                                   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perncanaan dan Laporan Kinerja yang disusun | 4 Jenis            | 4 Jenis   |              |                         |                               |

|                                                                                       |                                                                                 |                 |                 |                                                             |                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Renja yang disusun                                               | 4 Dokumen       | 4 Dokumen       |                                                             |                                                                             |  |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Waktu Penyediaan Gaji/Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan</b> | <b>14 Bulan</b> | <b>14 Bulan</b> |                                                             |                                                                             |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji/Tunjangan                                       | 18 Orang        | 17 Orang        | Terjadinya Pengurangan ASN karena adanya Mutasi dan Pensiun | Melakukan upaya Pelaporan dan permohonan penambahan ASN ke BKPSDM Kabupaten |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah ASN yang Menerima Honor Pengelola Keuangan                               | 14 Orang        | 14 Orang        |                                                             |                                                                             |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Pegawai ASN yang disiplin</b>                                     | <b>100%</b>     | <b>100%</b>     |                                                             |                                                                             |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan                                            | 120 stell       | 120 stell       |                                                             |                                                                             |  |

|  |  |  |  |                                                                  |                                                                                |                 |                 |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                    | <b>Jumlah Waktu<br/>Penyediaan Adminsitra<br/>si Umum<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Macam Komponen Listrik yang disediakan sesuai kebutuhan                 | 8 Macam         | 8 Macam         |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Porsi Makanan dan Snack yang disediakan (Kotak)                         | 400 Kotak       | 400 Kotak       |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan   | 7 Macam         | 7 Macam         |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan                                  | 1500 Eksemplar  | 1500 Eksemplar  |  |  |  |



|                                                                                                                    |                                                                                            |                 |                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor                                                           | Jumlah Macam ATK yang disediakan sesuai kebutuhan                                          | 40 Macam        | 40 Macam        |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Macam Alat Kebersihan Kantor yang disediakan                                        | 12 Macam        | 12 Macam        |  |  |  |
| <b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>                                  | <b>Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>12 Bulan</b> | <b>12 Bulan</b> |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Waktu Penyediaan BBM Peralatan Mesin dan Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan | 12 Bulan        | 12 Bulan        |  |  |  |

|     |                        |                 |                                                                                          |                                                       |                                                                       |            |              |                                                                                 |  |  |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                        |                 |                                                                                          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya              | Jumlah Unit Peralatan-mesin gedung kantor yang dipelihara             | 22 Unit    | 22 Unit      |                                                                                 |  |  |
|     |                        |                 |                                                                                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor yang direhabilitasi sesuai dengan kebutuhan | 1 Unit     | 1 Unit       |                                                                                 |  |  |
| II. | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Berkelanjutan | DINAS PERIKANAN                                       | Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)                                    | 113        | 113.50       | Angka sementara                                                                 |  |  |
|     |                        |                 |                                                                                          |                                                       | Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah                                      | 36.15      | 36.2         | Angka sementara                                                                 |  |  |
|     |                        |                 |                                                                                          | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                     | 24.053 Ton | 24053,76 Ton | Data produksi Perikanan Tangkap Belum Validasi Tingkat Provinsi dan Pusat (KKP) |  |  |
|     |                        |                 |                                                                                          |                                                       |                                                                       |            |              | Akan dilakukan Validasi menunggu Jadwal Validasi dari Provinsi dan Pusat (KKP)  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                       |                       |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b><i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b> | <b><i>Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap</i></b>                       | <b><i>6 Jenis</i></b> | <b><i>6 Jenis</i></b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Tangkap yang valid dan terbaru yang disediakan | 1 Dokumen             | 1 Dokumen             |  |  |  |
|  |  |  |  | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                               | Jumlah Alat Tangkap Ramah lingkungan yang disediakan                              | 75 Piece              | 75 Piece              |  |  |  |
|  |  |  |  | <b><i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i></b>                                                                                                 | <b><i>Jumlah Kelompok Nelayan yang Mandiri</i></b>                                | <b><i>4 KUB</i></b>   | <b><i>4 KUB</i></b>   |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                                          |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                         | Jumlah Nelayan yang mendapatkan peningkatan keterampilan, pendampingan Asuransi Nelayan dan kartu KUSUKA | 430 Orang       | 603 Orang         | Peningkatan minat pelaku usaha pada program KUSUKA                                                                                                                                                              |                                                                    |  |
| Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan yang difasilitasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan                                      | 100 Orang       | 100 Orang         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |
| <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                | <b>Jumlah Produski Perikanan Budidaya</b>                                                                | <b>1248 Ton</b> | <b>1137,5 Ton</b> | Harga Pakan ikan terus meningkat sehingga Pembudidaya mengurangi jumlah tebar benih Prasarana pembudidaya yang ada belum dikelola secara optimal. Prasarana pembudidaya yang ada belum dikelola secara optimal. | Meningkatkan akses permodalan dan SDM Kultur bagi pembudidaya ikan |  |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                     |                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bimtek, Pelatihan Budidaya Ikan dan pelatihan Pembuatan pakan ikan                                      | 80 Orang  | 60 Orang  | Budidaya ikan masih menjadi hasil sampingan bagi petani, sehingga minim peminat untuk budidaya ikan | Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang budidaya ikan kepada masyarakat |  |
| <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                             | <b>Persentase Peningkatan Produktifitas Usaha Budidaya</b><br>Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Budidaya yang valid dan terbaru yang disediakan | 2.5       | 2.2       |                                                                                                     |                                                                                |  |
| Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Budidaya yang valid dan terbaru yang disediakan                                                               | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                                                                                                     |                                                                                |  |
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya yang disediakan                                                                                              | 4 Paket   | 4 Paket   |                                                                                                     |                                                                                |  |

|  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                         |                   |                   |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>       | <p>Jumlah sarana perikanan budidaya yang disediakan</p>                                                 | <p>8 jenis</p>    | <p>8 Jenis</p>    |  |  |  |
|  |  |  |  | <p>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>      | <p>Jumlah Bahan peningkatan kualitas air, obat-obatan dan vitamin ikan yang disediakan</p>              | <p>3 Jenis</p>    | <p>3 jenis</p>    |  |  |  |
|  |  |  |  | <p>Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Darat</p> | <p>Jumlah penerima manfaat percontohan budidaya ikan</p>                                                | <p>4 Kelompok</p> | <p>4 Kelompok</p> |  |  |  |
|  |  |  |  | <p><b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b></p>                                 | <p><b>Cakupan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Perundang-Undangan</b></p> | <p>6 Lokasi</p>   | <p>6 Lokasi</p>   |  |  |  |





|  |  |  |  |                                                                                                                         |                                                                                                      |                   |                   |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standard pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah pelaku usaha/masyarakat perikanan yang mendapatkan bimbingan/pelatihan dan pendampingan usaha | 150 Orang         | 150 Orang         |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengenalan Produk Pengolahan Hasil Perikanan</b>                        | <b>5 Kegiatan</b> | <b>5 Kegiatan</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan                                    | 400 Orang         | 400 Orang         |  |  |  |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Pertanian; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 3.24.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN , DAN SUB KEGIATAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NO. | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN                                                         | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                                          | TARGET        | REALISASI     | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Pertanian           | DTPH          | Mewujudkan kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | 100%          | 100%          |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | 12 Bulan      | 12 Bulan      |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah                    | 7 Dok.        | 7 Dok.        |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 5 Dok.        | 5 Dok.        |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1 Laporan     | 1 Laporan     |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 68 Orang      | 68 Orang      |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100%          | 100%          |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                  | 191 Stel      | 191 Stel      |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan      | 12 Bulan      |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan      | 12 Bulan      |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 15 Paket/Buku | 15 Paket/Buku |              |                              |                                |
|     |                     |               |                                                                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 36 Paket/Buku | 36 Paket/Buku |              |                              |                                |

|  |      |                                                                             |                                                                                                                    |                                                                             |                                                                      |                                                                                 |                                                                                                   |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |                                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 167 Kotak                                                                   | 167 Kotak                                                            |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                           | 12 Bulan                                                                    | 12 Bulan                                                             |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 12 Bulan                                                                    | 12 Bulan                                                             |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>12 Bulan</b>                                                             | <b>12 Bulan</b>                                                      |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | 12 Bulan                                                                    | 12 Bulan                                                             |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | 12 Bulan                                                                    | 12 Bulan                                                             |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Bulan                                                                    | 12 Bulan                                                             |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>102 Unit</b>                                                             | <b>102 Unit</b>                                                      |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit                                                                      | 1 Unit                                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 88 Unit                                                                     | 88 Unit                                                              |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 12 Unit                                                                     | 12 Unit                                                              |                                                                                 |                                                                                                   |
|  |      |                                                                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1 Unit                                                                      | 1 Unit                                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
|  | DTPH | Penyediaan, Pengembangan, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian, - | <b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>                                                        | <b>P=1,99%,<br/>J=1,97%,<br/>K.Tnh=3%,<br/>U.Kayu=2%,<br/>U.Jalar=1,88%</b> | <b>P=0,<br/>J=356%,<br/>K.Tnh=0,<br/>U.Kayu=0,<br/>U.Jalar=1688%</b> | Tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan, disebabkan terbatasnya anggaran. | Penambahan Anggaran. Menggalakan para petani untuk serentak melakukan Tanam padi Pada Musim April |

|  |                                        |                                                                                                              |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Peningkatan<br>Penyuluhan<br>Pertanian | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                | 2%                                                                          | -                                                                    | Minimnya petani melakukan Tanam padi Pada Musim April September                                                                                                                         | September                                                                                                                                                            |
|  |                                        | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi      | 1 Laporan                                                                   | 1 Laporan                                                            | Tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan, disebabkan terbatasnya anggaran. Minimnya petani melakukan Tanam padi Pada Musim April September<br><br>Anggaran dan SDM tidak mendukung | Penambahan Anggaran. Menggalakan para petani untuk serentak melakukan Tanam padi Pada Musim April September<br><br>Penambahan Anggaran dan dukungan SDM yang memadai |
|  |                                        | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                           | 1 Laporan                                                                   | 1 Laporan                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|  |                                        | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b> | <b>P=1,99%,<br/>J=1,97%,<br/>K.Tnh=3%,<br/>U.Kayu=2%,<br/>U.Jalar=1,88%</b> | <b>P=0,<br/>J=356%,<br/>K.Tnh=0,<br/>U.Kayu=0,<br/>U.Jalar=1688%</b> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|  |                                        | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                       | 1 VUB                                                                       | -                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|  |                                        | <b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                               | <b>64.45</b>                                                                | <b>64.45</b>                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|  |                                        | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                      | <b>24</b>                                                                   | <b>24</b>                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|  |      |                                                                                   |                                                                                                                       |                            |                           |  |  |  |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|--|
|  |      |                                                                                   | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan | 1 Dokumen                  | 1 Dokumen                 |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                                | <b>40.45</b>               | <b>40.45</b>              |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Pembangunan, Rehabilitas, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                           | 4 Unit                     | 4 Unit                    |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya                      | 5 Unit                     | 5 Unit                    |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                | 15 Unit                    | 15 Unit                   |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani                                                                     | 3 Unit                     | 3 Unit                    |  |  |  |
|  | DTPH | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian | <b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>                                                      | <b>29%</b>                 | <b>29%</b>                |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                               | <b>2</b><br><b>.500 Ha</b> | <b>2.500</b><br><b>Ha</b> |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                         | 1<br>.000 Ha               | 1.000<br>Ha               |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan               | 1<br>.500 Ha               | 1.500<br>Ha               |  |  |  |
|  | DTPH | Peningkatan Penyuluhan Pertanian                                                  | <b>Program Penyuluhan Pertanian</b>                                                                                   | <b>25%</b>                 | <b>25%</b>                |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                                               | <b>13 BPP</b>              | <b>13 BPP</b>             |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                        | 1 Unit                     | 1 Unit                    |  |  |  |
|  |      |                                                                                   | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                  | 1 Unit                     | 1 Unit                    |  |  |  |

Sumber : DTPH Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Urusan Pertanian; Dinas Perternakan dan Perkebunan

| <div>Tabel 3.25.</div> <div>Dinas Perternakan dan Perkebunan</div> <div>Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024</div> <div>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</div> <div>DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</div> |                     |               |            |                                                                  |                |                |              |                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                       | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN* | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                           | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | DISBUNAK      |            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 100%           | 100%           | -            | -                            | -                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | DISBUNAK      |            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 dok         | 13 dok         | -            | -                            | -                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | DISBUNAK      |            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 8 dok          | 8 dok          | -            | -                            | -                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | DISBUNAK      |            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 5 laporan      | 5 laporan      | -            | -                            | -                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | DISBUNAK      |            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1 laporan      | 1 laporan      | -            | -                            | -                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | DISBUNAK      |            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 42 Orang/bulan | 42 Orang/bulan | -            | -                            | -                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | DISBUNAK      |            | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 1 dokumen      | 1 dokumen      | -            | -                            | -                               |

|  |  |          |  |                                                                         |             |             |   |   |   |
|--|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                  | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 1 paket     | 1 paket     | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | 1 dokumen   | 1 dokumen   | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 laporan   | 1 laporan   | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - | - |

|  |  |          |  |                                                                                                                    |             |               |                                                                      |                                                                  |   |
|--|--|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |          |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 2 unit      | 2 unit        |                                                                      |                                                                  |   |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 9 unit      | 9 unit        | -                                                                    | -                                                                | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>100%</b> | <b>100%</b>   | -                                                                    | -                                                                | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1 laporan   | 1 laporan     | -                                                                    | -                                                                | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1 laporan   | 1 laporan     | -                                                                    | -                                                                | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1 laporan   | 1 laporan     | -                                                                    | -                                                                | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>100%</b> | <b>98.80%</b> | Adanya kendaraan dinas yang tidak dioperasikan oleh penanggung jawab | Akan dilakukannya pengalihan penanggung jawab kendaraan tersebut |   |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28 unit     | 27 unit       | Adanya kendaraan dinas yang tidak dioperasikan oleh penanggung jawab | Akan dilakukannya pengalihan penanggung jawab kendaraan tersebut | - |

|  |  |          |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 19 unit                                                                                                                                                                           | 19 unit                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                  | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 26 unit                                                                                                                                                                           | 26 unit                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                  | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 1 unit                                                                                                                                                                            | 1 unit                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                  | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                      | <b>1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit = 1.8 %, Karet = 0.6 %, Kelapa Dalam = 1.0 %, Kopi = 0.6 %, Pinang = 1.2 %</b><br><b>2. Angka Kebuntingan Sapi = 73 %</b> | <b>1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit = 1.7 %, Karet = 0.2 %, Kelapa Dalam = 1.0 %, Kopi = 0.4 %, Pinang = 1,0 %</b><br><b>2. Angka Kebuntingan Sapi = 73 %</b> | Untuk komoditi kelapa sawit sebagian besar sedang melaksanakan Replanting Kelapa Sawit dan mengalami track, untuk komoditi karet berkurang karena luasannya yang berkurang, dan komoditi pinang karena harga turun maka pekebun tidak memanen buah pinang yang sudah kuning/matang dan sebagian besar pekebun melakukan panen pinang muda | Memberikan penyuluhan kepada pekebun agar tetap melaksanakan pemupukan sesuai anjuran teknis dan melaporkan ke dinas atau PPL jika ada terjadi serangan OPT yang bisa mengakibatkan tanaman menjadi rusak dan mati | - |

|  |  |          |  |                                                                                                                        |                             |                           |                                                                                                                                                                                         |   |   |
|--|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                          | <b>100%</b>                 | <b>100%</b>               | -                                                                                                                                                                                       | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                | 1 laporan                   | 1 laporan                 | -                                                                                                                                                                                       | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>           | <b>100%</b>                 | <b>100%</b>               | -                                                                                                                                                                                       | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                                 | 3 VUB                       | 3 VUB                     | -                                                                                                                                                                                       | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                 | 1 dokumen                   | 1 dokumen                 | -                                                                                                                                                                                       | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                          | 1 dokumen                   | 1 dokumen                 | -                                                                                                                                                                                       | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b> | <b>800 ekor dan 0.8 ton</b> | <b>732 ekor dan 9 ton</b> | Menyesuaikan anggaran dinas dan untuk capaian sub kegiatan dari anggaran APBD tercapai 502 ekor dan 230 ekor dari Pokir, Dumisake dan APBDP Prov. Jambi sehingga total realisasi target | - | - |

|  |  |          |  |                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|--|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |  |          |  |                                                                             |          |          | 732 ekor begitu juga dengan pakan ternak dari target 0,8 ton tercapai realisasi sebanyak 9 ton dari dana Pokir, Dumisake dan APBDP Prov. Jambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 502 ekor | 732 ekor | Untuk anggaran APBD target tercapai sebanyak 502 ekor, namun tahun 2024 ini mendapatkan bantuan ternak yang bersumber dari Pokir DPRD Prov. Jambi sebanyak 57 ekor (17 ekor kambing, 40 ekor sapi), Kegiatan Dumisake Prov. Jambi sebanyak 5 ekor sapi, APBDP dari DTPHP sebanyak 21 ekor sapi, CSR PT. Petrochina sebanyak 60 ekor (30 ekor kambing dan 30 ekor domba) dan fasilitasi 20 % dari perusahaan sebanyak 33 ekor sapi dan kambing sebanyak 54 ekor | - | - |

|  |  |          |  |                                                                               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|--|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |  |          |  |                                                                               |            |            | sehingga total keseluruhan sebanyak 732 ekor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 0,25 ton   | 9 ton      | Untuk anggaran APBD target tercapai sebanyak 0,25 ton, namun ditahun 2024 ini juga mendapatkan bantuan pakan ternak dari Pokir DPRD Prov. Jambi sebanyak 4.900 kg, Kegiatan Dumisake Prov. Jambi pakan ternak sebanyak 550 kg, APBDP dari DTPHP Prov. Jambi sebanyak 3.300 kg sehingga total keseluruhan 9.000 kg atau 9 ton | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                | <b>23%</b> | <b>23%</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | - |

|  |  |          |  |                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |   |
|--|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |          |  | Pengembangan Prasarana Pertanian                                       | 1 dokumen | 1 dokumen | -                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                              | - |
|  |  |          |  | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                         | 600 ha    | 587 Ha    | Adanya berkas permohonan dari kelembagaan pekebun yang masuk pada akhir bulan Desember 2024 sehingga tidak cukup waktu untuk di proses penerbitan STDB nya.                                                   | Permohonan akan diproses hingga penerbitan STDB pada tahun anggaran 2025                       | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pembangunan Prasarana Pertanian                                        | 9 unit    | 6 unit    | Anggaran menyesuaikan pagu dinas tahun 2024                                                                                                                                                                   | Akan mengusulkan kegiatan dari sumber pendanaan lainnya seperti APBN dan BPDP                  | - |
|  |  |          |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani            | 2 unit    | 2 unit    | -                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                              | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 4 unit    | 1 unit    | Tidak terlaksananya Pembangunan Olahan Pakan Silase sebanyak 3 unit di karenakan Juknis keluar di Bulan Juni 2024 dan terdapat kesalahan kode rekening belanja sementara tidak cukup waktu untuk melakukan MP | Melakukan koordinasi dengan DTPHP Prov. Jambi dan Kementerian Pertanian terkait dana DAK Fisik | - |

|  |  |          |  |                                                                                                                            |           |           |                                                                                                                                                          |   |   |
|--|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |  |          |  |                                                                                                                            |           |           | karena pembahasan APBD Perubahan (murni) 2024 dipercepat sedangkan pelaksanaan Perubahan APBD 2024 melewati batas akhir kontrak pengadaan (21 Juli 2024) |   |   |
|  |  | DISBUNAK |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                     | 3 unit    | 3 unit    |                                                                                                                                                          | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>                        | 1 laporan | 1 laporan | -                                                                                                                                                        | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                             | 1 laporan | 1 laporan | -                                                                                                                                                        | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                             | 1.5%      | 1.5%      | -                                                                                                                                                        | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | 100%      | 100%      | -                                                                                                                                                        | - | - |

|  |  |          |  |                                                                                                                                                      |                  |                  |   |   |   |
|--|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
|  |  | DISBUNAK |  | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 1 laporan        | 1 laporan        | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                             | <b>1 laporan</b> | <b>1 laporan</b> | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 1 laporan        | 1 laporan        | - | - | - |
|  |  |          |  | <b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>1 laporan</b> | <b>1 laporan</b> | - | - | - |
|  |  |          |  | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                            | 1 laporan        | 1 laporan        | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                                                     | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                                                              | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | - | - | - |

|  |  |          |  |                                                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |   |
|--|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
|  |  | DISBUNAK |  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | 200 ha          | 230 Ha          | Adanya permohonan dari kelompok tani yang melebihi target dan anggaran dinas untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman sementara pekebun sanggup atau bersedia menyediakan bahan-bahan atau obat-obatan sendiri sehingga petugas teknis dinas mengajarkan dan mengedukasi cara penerapan pemakaian obat-obatan sesuai anjuran teknis | -                               | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan | 30 ha           | 30 ha           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                               | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                | <b>750 STDB</b> | <b>605 STDB</b> | Anggaran APBD Tahun 2024 tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan untuk menerbitkan 750 STDB                                                                                                                                                                                                                                         | Mengusulkan penambahan anggaran | - |

|  |  |          |  |                                                                                           |                |                |   |   |   |
|--|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>100%</b>    | <b>80.67%</b>  | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                | 1 dokumen      | 1 dokumen      | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                       | <b>30%</b>     | <b>30%</b>     | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                   | <b>12 unit</b> | <b>12 unit</b> | - | - | - |
|  |  | DISBUNAK |  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                           | 10 unit        | 10 unit        |   |   |   |
|  |  | DISBUNAK |  | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                      | 2 unit         | 2 unit         | - | - | - |

Sumber : Dinas Perternakan dan Perkebunan Kab. Tanjung Jabung Barat

d. URUSAN PENUNJANG  
1. Urusan Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah

Tabel 3.26.  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NO | Urusan Pemerintah           | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana                     | Kebijakan | Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET                                         | REALISASI                                      | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Urusan Penunjang Pemerintah | Sekretariat Daerah<br><br>Bagian Perencanaan dan Keuangan |           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota<br><br>Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><br><i>Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i><br><br><i>Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i><br><br><i>Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | 100%<br><br>4 Dok.<br><br>1 Dok.<br><br>1 Dok. | 100%<br><br>4 Dok.<br><br>1 Dok.<br><br>1 Dok. |              |                              |                                |

|  |  |                                       |  |                                                                                             |                    |                    |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
|  |  |                                       |  | Sub. Keg. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan          | 4 Laporan          |  |  |  |
|  |  |                                       |  | Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 2 Laporan          | 2 Laporan          |  |  |  |
|  |  | Bagian<br>Perencanaan<br>dan Keuangan |  | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        |  |  |  |
|  |  |                                       |  | Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 132<br>Orang/bulan | 132<br>Orang/bulan |  |  |  |
|  |  |                                       |  | Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 1 Dok.             | 1 Dok.             |  |  |  |
|  |  |                                       |  | Sub. Keg. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 1 Dok.             | 1 Dok.             |  |  |  |
|  |  |                                       |  | Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                    | 2 Dok.             | 2 Dok.             |  |  |  |
|  |  | Bagian<br>Perencanaan<br>dan Keuangan |  | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                      | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        |  |  |  |
|  |  |                                       |  | Sub. Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 2 Laporan          | 2 Laporan          |  |  |  |

|  |                                       |                                                                            |             |             |  |  |  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  | Bagian Umum                           | <b>Keg. Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah</b>                       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |                                       | Sub. Keg. Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya          | 5 Paket     | 5 Paket     |  |  |  |
|  |                                       | <i>Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>    | 3 Dok.      | 3 Dok.      |  |  |  |
|  | Bagian Umum                           | <b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                             | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |                                       | Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket     | 1 Paket     |  |  |  |
|  |                                       | Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 2 Paket     | 2 Paket     |  |  |  |
|  |                                       | Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 3 Paket     | 3 Paket     |  |  |  |
|  |                                       | Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 1 Paket     | 1 Paket     |  |  |  |
|  |                                       | Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 2 Paket     | 2 Paket     |  |  |  |
|  |                                       | Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | 2 Laporan   | 2 Laporan   |  |  |  |
|  | Bagian<br>Perencanaan<br>dan Keuangan | Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |

|  |  |             |  |                                                                                  |             |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  | Bagian Umum |  | <b>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |             |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 21 Unit     | 21 Unit     |  |  |  |
|  |  |             |  | Pengadaan Mebel                                                                  | 2 Paket     | 2 Paket     |  |  |  |
|  |  |             |  | Pengadanaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          | 89 unit     | 89 unit     |  |  |  |
|  |  | Bagian Umum |  | <b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |             |  | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 2 Laporan   | 2 Laporan   |  |  |  |
|  |  |             |  | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                   | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |  |
|  |  |             |  | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                               | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |  |
|  |  | Bagian Umum |  | <b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |

|  |                                       |  |                                                                                                                              |                  |                  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|  |                                       |  | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 145 Unit         | 145 Unit         |  |  |  |
|  |                                       |  | Sub. Keg. Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 325 Unit         | 325 Unit         |  |  |  |
|  |                                       |  | Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya                                                                               | 625 Unit         | 625 Unit         |  |  |  |
|  |                                       |  | Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 15 Unit          | 15 Unit          |  |  |  |
|  | Bagian<br>Perencanaan<br>dan Keuangan |  | <b>Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      |  |  |  |
|  |                                       |  | Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | 2<br>Orang/Bulan | 2<br>Orang/Bulan |  |  |  |
|  |                                       |  | Sub. Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                             | 6 Paket          | 6 Paket          |  |  |  |
|  | Bagian Umum                           |  | <b>Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                                                     | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      |  |  |  |
|  |                                       |  | Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    | 3 Paket          | 3 Paket          |  |  |  |

|  |  |                                     |  |                                                                 |             |             |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  | Bagian Organisasi                   |  | Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 3 Paket     | 3 Paket     |  |  |  |
|  |  |                                     |  | Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga Sekretaris Daerah   | 3 Paket     | 3 Paket     |  |  |  |
|  |  |                                     |  | <b>Keg. Penataan Organisasi</b>                                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |                                     |  | Sub Keg. Pengelolaan dan Analisis Jabatan                       | 3 Dok.      | 3 Dok.      |  |  |  |
|  |  |                                     |  | Sub. Keg. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana           | 4 Laporan   | 4 Laporan   |  |  |  |
|  |  | Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan |  | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                     | 2 Dok.      | 2 Dok.      |  |  |  |
|  |  |                                     |  | <b>Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>        | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |                                     |  | Sub. Keg. Fasilitas Keprotokolan                                | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |  |
|  |  |                                     |  | Sub. Keg. Fasilitas Komunikasi Pimpinan                         | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |  |
|  |  |                                     |  | Sub. Keg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan                       | 1 Laporan   | 1 Laporan   |  |  |  |



|  |  |                  |  |                                                                                                 |             |             |  |  |                                                                              |
|--|--|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                  |  | Sub. Keg. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah                                              | 4 Dok.      | 4 Dok.      |  |  |                                                                              |
|  |  |                  |  | Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Hukum                                                               | 2 Kasus     | 2 Kasus     |  |  |                                                                              |
|  |  | -                |  | Sub. Keg. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | 5 Dok.      | 5 Dok.      |  |  |                                                                              |
|  |  | Bagian Kerjasama |  | <b>Keg. Fasilitas Kerjasama Daerah</b>                                                          | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |                                                                              |
|  |  |                  |  | Sub. Keg. Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri                                                      | 3 Dok.      | 3 Dok.      |  |  |                                                                              |
|  |  | -                |  | Sub. Keg. Fasilitas Kerjasama Luar Negeri                                                       | 2 Dok.      | 2 Dok.      |  |  |                                                                              |
|  |  | -                |  | Sub. Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama                                                        | 5 Lap.      | 5 Lap       |  |  |                                                                              |
|  |  |                  |  | <b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>                                                     |             |             |  |  |                                                                              |
|  |  | Bagian Ekonomi   |  | <b>Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |                                                                              |
|  |  |                  |  | Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |  |  | PT. BPR Tanggo Rajo telah melakukan beberapa langkah dalam hal terobosan dan |



|  |  |   |  |                                                                           |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |  |                                                                           |        |        |  |  | <p>OJK, BPR akan berupaya untuk pengadaan ATM atau mobile banking.</p> <p>selanjutnya Pemerintah Daerah akan mendorong BPR untuk pengembangan inovasi dalam pembiayaan kepada UMKM Pemerintah Daerah bersama BPR telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan salah satu direktur, hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian perdamaian pelaksanaan putusan kasasi MA RI nomor 4374 K/Pdt/2023 dimana para pihak telah bersepakat untuk berdamai dan Pemerintah Daerah telah memenuhi dan membayar hak</p> |
|  |  | - |  | Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan BLUD            | 1 Dok. | 1 Dok. |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | - |  | Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 1 Dok. | 1 Dok. |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |  |  |  |  |  |  | yang bersangkutan serta pemulihan kembali jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur sesuai dengan kesepakatan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  | Terdapat peluang besar dalam pengembangan BUMD dan potensi deviden yaitu dengan pengelolaan PI 10% migas, namun berdasarkan ketentuan pengelolaan PI 10% dimaksud melalui BUMD Provinsi Jambi, terkait hal tersebut Pemerintah Daerah bersama JBS selalu intens melakukan koordinasi percepatan kepada Pemerintah dan BUMD Provinsi Jambi dalam rangka percepatan realisasi PI 10% |

|  |  |                                           |                                                                                                              |                     |                     |   |  |           |
|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|-----------|
|  |  |                                           |                                                                                                              |                     |                     |   |  | dimaksud. |
|  |  | Bagian<br>Administrasi<br>Pembangunan     | <b>Keg. Pelaksanaan Administrasi<br/>Pembangunan</b>                                                         | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |   |  |           |
|  |  | -                                         | Sub. Keg. Fasilitas Penyusunan Program<br>Pembangunan                                                        | 1 Dok.              | 1 Dok.              |   |  |           |
|  |  | -                                         | Sub. Keg. Pengendalian dan Evaluasi<br>Program Pembangunan                                                   | 1 Laporan           | 1 Laporan           |   |  |           |
|  |  | -                                         | Sub. Keg. Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                      | 1 Laporan           | 1 Laporan           |   |  |           |
|  |  | Bagian<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa | <b>Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang<br/>dan Jasa</b>                                                        | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |   |  |           |
|  |  | -                                         | Sub. Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                                           | 500 Paket<br>Tender | 500 Paket<br>Tender | - |  |           |
|  |  | -                                         | Sub. Keg. Pengelolaan Pengadaan secara<br>Elektronik                                                         | 2 Server            | 2 Server            | - |  |           |
|  |  | Bagian Sumber<br>Daya Alam                | <b>Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber<br/>Daya Alam</b>                                                        | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |   |  |           |
|  |  | -                                         | Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,<br>Kelautan dan Perikanan | 1 Dok.              | 1 Dok.              |   |  |           |
|  |  | -                                         | Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan<br>Lingkungan Hidup            | 1 Dok.              | 1 Dok.              |   |  |           |

|   |  |   |  |                                                                          |        |        |  |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| . |  | - |  | Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan Air | 1 Dok. | 1 Dok. |  |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD

| Tabel 3.27.<br>Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat<br>Tahun Anggaran 2024<br>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN<br>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024 |               |            |                                                                                       |            |            |              |                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                        | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN* | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD                                            | 100%       | 100%       |              |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 26 Laporan | 26 Laporan | Tidak Ada    |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26 Laporan | 26 Laporan | Tidak Ada    |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 12 Bulan   | 12 Bulan   |              |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 34 Orang   | 34 Orang   | Tidak Ada    |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Tidak Ada    |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 100%       | 100%       |              |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 1 Paket    | 1 Paket    | Tidak Ada    |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 34 Orang   | 34 Orang   | Tidak Ada    |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Set.DPRD      | -          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 100%       | 100%       |              |                              |                                |

|          |   |                                                                                                                    |               |               |           |  |  |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|--|
| Set.DPRD | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 1 Paket       | 1 Paket       | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 1 Paket       | 1 Paket       | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 1 Paket       | 1 Paket       | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 1 Paket       | 1 Paket       | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 12 Laporan    | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |           |  |  |
| Set.DPRD | - | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 2 Unit        | 3 Unit        | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 2 Unit        | 2 Unit        | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya                                                                | 1 Unit        | 1 Unit        | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>12 bln</b> | <b>12 bln</b> |           |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12 Laporan    | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 Laporan    | 12 Lapoaran   | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Laporan    | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |           |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38 Unit       | 38 Unit       | Tidak Ada |  |  |

|          |   |                                                                |               |                  |           |  |  |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--|--|
| Set.DPRD | - | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | 27 Unit       | 27 Unit          | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 14 Unit       | 14 Unit          | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                | 2 Ha          | 2 Ha             | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                 | <b>12 bln</b> | <b>12 bln</b>    |           |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                     | 35 Orang      | 35 Orang         | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                              | 35 Orang      | 35 Orang         | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                               | <b>12 bln</b> | <b>12 bln</b>    |           |  |  |
| Set.DPRD | - | Fasilitasi Fraksi DPRD                                         | 12 Laporan    | 12 Laporan       | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | 12 Laporan    | 12 Laporan       | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | 2 Paket       | 12 Laporan       | Tidak Ada |  |  |
| Set.DPRD | - | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>      |               |                  |           |  |  |
| Set.DPRD | - | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>         | 100%          | <b>2 Dokumen</b> |           |  |  |
| Set.DPRD | - | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 1 Dokumen     | 1 Dokumen        | Tidak Ada |  |  |

|          |   |                                                                      |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Set.DPRD | - | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                | 14 Dokumen  | 9 Dokumen        | Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) Ranperda, 7 (Tujuh) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 (Tiga) Ranperda Inisiatif DPRD, dan hanya 9 (Sembilan) Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi perda, 1 Ranperda akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. | Tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025 |  |
| Set.DPRD | - | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen        | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |  |
| Set.DPRD | - | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | 7 Dokumen   | 3 Dokumen        | Berdasarkan usulan Raperda yang disampaikan oleh Legislatif pada Tahun 2024 hanya 3 Raperda.                                                                                                                                                                                                                                 | Tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2025 |  |
| Set.DPRD | - | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                 | 2 Dokumen   | <b>2 Dokumen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |
| Set.DPRD | - | Pembahasan KUA dan PPAS                                              | 2 Dokumen   | 2 Dokumen        | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |  |
| Set.DPRD | - | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | 2 Dokumen   | 2 Dokumen        | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |  |
| Set.DPRD | - | Pembahasan APBD                                                      | 1 Dokumen   | 1 Dokumen        | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |  |
| Set.DPRD | - | Pembahasan APBD Perubahan                                            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen        | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |  |
| Set.DPRD | - | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen        | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |  |
| Set.DPRD | - | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>                         | <b>100%</b> | <b>100%</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |

|          |   |                                                                |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |  |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Set.DPRD | - | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |  |
| Set.DPRD | - | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                              | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |  |
| Set.DPRD | - | Pendalaman Tugas DPRD                                          | 35 org      | 35 Orang    | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |  |
| Set.DPRD | - | Publikasi dan dokumentasi dewan                                | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |  |
| Set.DPRD | - | Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli                         | 10 Orang    | 10 Orang    | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |  |
| Set.DPRD | - | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>         | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |  |
| Set.DPRD | - | Pelaksanaan Reses                                              | 2 kali      | 2 kali      | hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pada pasal 87 ayat 3 berbunyi Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan. | Tetap dianggarkan 3 kali untuk tahun 2025                                                                 |  |
| Set.DPRD | - | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD</b>               | -           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |  |
| Set.DPRD | - | Penyusunan Kode Etik DPRD                                      | 1 Dokumen   |             | Selama tahun 2024 terkait Penyusunan Kode etik Pimpinan dan Anggota DPRD tidak terjadi Perubahan atau perbaikan kode etik yang memerlukan penyelesaian.                                                                                                                                                                        | Tetap dianggarkan sebagai antisipasi Perubahan atau perbaikan terkait kode etik yang mungkin saja timbul. |  |

|          |   |                                                  |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                                               |  |
|----------|---|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Set.DPRD | - | Pengawasan Kode Etik DPRD                        | 1<br>Laporan |           | Selama tahun 2024 terkait Kode etik Pimpinan dan Anggota DPRD tidak terjadi permasalahan yang menyangkut hal tersebut yang memerlukan penyelesaian. | Tetap dianggarkan sebagai antisipasi permasalahan terkait kode etik yang mungkin saja timbul. |  |
| Set.DPRD | - | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                     | <b>100%</b>  |           |                                                                                                                                                     |                                                                                               |  |
| Set.DPRD | - | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1<br>Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada                                                                                                                                           |                                                                                               |  |
| Set.DPRD | - | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | 1<br>Laporan | 1 Laporan | Tidak Ada                                                                                                                                           |                                                                                               |  |
| Set.DPRD | - | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | 1<br>Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada                                                                                                                                           |                                                                                               |  |

Sumber : Set DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat

e. URUSAN PENDUKUNG  
1. Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.28.  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN                 | OPD PELAKSANA                     | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN                        | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 100%           | 100%           |                                     |                                             |                                |
|    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100%           | 100%           |                                     |                                             |                                |
|    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 11 Dok         | 11 Dok         | Tidak Terdapat Masalah              | -                                           | -                              |
|    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Lap          | 5 Lap          | Tidak Terdapat Masalah              | -                                           | -                              |
|    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 100%           | 100%           |                                     |                                             |                                |
|    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 31 Orang/Bulan | 25 Orang/Bulan | 1. Mutasi ASN<br>2. ASN Purna Tugas | Akan menyesuaikan Kembali dengan jumlah ASN | -                              |

|  |                                           |                                         |  |                                                                        |          |          |                               |                                                  |   |
|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---|
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                       | 1 Dok    | 1 Dok    | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran   | 2 Dok    | 2 Dok    | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | 100%     | 100%     |                               |                                                  |   |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | 170      | 76       | Menggunakan<br>Target Renstra | Akan<br>menyesuaikan<br>Kembali Target di<br>DPA | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                  | 100%     | 100%     |                               |                                                  |   |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Paket | 12 Paket | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | 12 Paket | 12 Paket | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | 12 Paket | 12 Paket | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             | 12 Paket | 12 Paket | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan        | 12 Dok   | 12 Dok   | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN                 | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung          |  | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi                     | 12 Lap   | 12 Lap   | Tidak Terdapat<br>Masalah     | -                                                | - |

|  |                                     |                                   |  |                                                                                                                    |          |          |                        |   |   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|
|  | PEMERINTAHAN                        | Barat                             |  | SKPD                                                                                                               |          |          |                        |   |   |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 100%     | 100%     |                        |   |   |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                | 1 Unit   | 1 Unit   | Tidak Terdapat Masalah |   |   |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 100%     | 100%     |                        |   |   |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 Lap   | 12 Lap   | Tidak Terdapat Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Lap   | 12 Lap   | Tidak Terdapat Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 100%     | 100%     |                        |   |   |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30 Unit  | 33 Unit  | Tidak Terdapat Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 150 Unit | 150 Unit | Tidak Terdapat Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1 Unit   | 1 Unit   | Tidak Terdapat Masalah | - | - |

|    |                                           |                                         |  |                                                                                                    |                   |                   |                           |   |   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|---|
| 2. | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | PROGRAM PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI PEMBANGUNAN<br>DAERAH                         | 100%              | 100%              |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penyusunan Perencanaan<br>dan Pendanaan                                                            | 100%              | 100%              |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Pelaksanaan Konsultasi<br>Publik                                                                   | 2 Berita<br>Acara | 2 Berita<br>Acara | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Pelaksanaan<br>Forum SKPD/Lintas SKPD                                                   | 1 Berita<br>Acara | 1 Berita<br>Acara | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                           | 2 Berita<br>Acara | 2 Berita<br>Acara | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Penyusunan dan<br>Penetapan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota | 319<br>Dokumen    | 319<br>Dokumen    | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Pengendalian, Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah                | 100%              | 100%              |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Monitoring, Evaluasi dan<br>Penyusunan Laporan Berkala<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Daerah        | 1 Laporan         | 1 Laporan         | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Implementasi Sistem<br>Informasi Pemerintahan<br>Daerah di Bidang<br>Pembangunan Daerah            | 100%              | 100%              |                           |   |   |

|    |                                           |                                         |  |                                                                                                                             |           |           |                           |   |   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---|---|
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penerapan Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan Daerah                                           | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
| 3. | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | PROGRAM KOORDINASI<br>DAN SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH                                                 | 100%      | 100%      |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Perencanaan<br>Bidang Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia                                                    | 92%       | 92%       |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pemerintahan (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)        | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Perencanaan<br>Bidang Perekonomian dan<br>SDA (Sumber Daya Alam)                                                 | 92%       | 92%       |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Perekonomian (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)        | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |

|  |                                           |                                         |  |                                                                                                                       |           |           |                           |   |   |
|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---|---|
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Perekonomian         | 2 Laporan | 2 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>SDA (RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)           | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Perencanaan<br>Bidang Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                     | 92%       | 92%       |                           |   |   |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Infrastruktur (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Kewilayahan (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)   | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
|  | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Kewilayahan                  | 6 Laporan | 6 Laporan | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |

|    |                                           |                                         |  |                                                                                                      |           |           |                           |   |   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---|---|
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur  | 2 Laporan | 2 Laporan | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |
| 4. | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | PROGRAM PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH                                                     | Inovatif  | Inovatif  |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Penelitian dan<br>Pengembangan Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan Pengkajian<br>Peraturan | 20 >      | 20 >      |                           |   |   |
|    | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | BAPPEDA Kab.<br>Tanjung Jabung<br>Barat |  | Pengelolaan Data Kelitbangan<br>dan Peraturan                                                        | 1 Laporan | 1 Laporan | Tidak Terdapat<br>Masalah | - | - |

Sumber : Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Urusan Keuangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.29.  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung BaratTahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                                     |                                                          |           |                                                                                       |            |            |              |                              |                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| NO                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN                 | OPD PELAKSANA                                            | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1                                                             | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |           | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten                                  | 100%       | 94.81%     |              |                              |                                |
|                                                               |                                     |                                                          |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100%       | 100%       |              |                              |                                |
|                                                               |                                     |                                                          |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 9 Dokumen  | 9 Dokumen  |              |                              |                                |
|                                                               |                                     |                                                          |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan  | 7 Laporan  |              |                              |                                |
|                                                               |                                     |                                                          |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 100%       | 100%       |              |                              |                                |
|                                                               |                                     |                                                          |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 41 Orang   | 41 Orang   |              |                              |                                |
|                                                               |                                     |                                                          |           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12 Dokumen | 12 Dokumen |              |                              |                                |

|  |  |  |  |                                                                  |            |            |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100%       | 100%       |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100%       | 100%       |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | 90 Paket   | 90 Paket   |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100%       | 113.65%    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2 Paket    | 2 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 3 Paket    | 3 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 2 Paket    | 2 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 1 Paket    | 1 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 12 Dokumen | 12 Dokumen |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                       |             |             |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 424 Laporan | 441 Laporan | Pada sub kegiatan ini laporan perjalanan dinas melebihi dari target kinerja tahun 2024                             |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100%        | 100.00%     |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | 2 Unit      | 2 Unit      |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 20 Unit     | 20 Unit     |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100%        | 86.54%      |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 20 Laporan  | 20 Laporan  |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 12 Laporan  | 8 Dokumen   | Pada sub kegiatan ini untuk belanja bahan bakar minyak genset dan belanja tagihan air tidak dapat terealisasi 100% | Kegiatan ini bersifat rutin menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak diperlukan penyelesaian masalah |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 4 Laporan   | 4 Laporan   |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100%        | 75.96%      |                                                                                                                    |                                                                                                          |  |

|  |  |  |                                             |                                                                                                                    |             |            |                                                                                                                                                        |                                                                                                          |  |
|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25 Unit     | 25 Unit    |                                                                                                                                                        |                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 93 Unit     | 62 unit    | Pada sub kegiatan ini untuk pemeliharaan peralatan dan mesin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan saja sehingga terjadinya efesiensi anggaran kegiatan | Kegiatan ini bersifat rutin menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak diperlukan penyelesaian masalah |  |
|  |  |  |                                             | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                       | 1 Unit      | 1 Unit     |                                                                                                                                                        |                                                                                                          |  |
|  |  |  | Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         | <b>100%</b> | <b>95%</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                             | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                  | 100%        | 100%       |                                                                                                                                                        |                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                             | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | 2 Dokumen   | 2 Dokumen  |                                                                                                                                                        |                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         | 2 Dokumen   | 2 Dokumen  |                                                                                                                                                        |                                                                                                          |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |            |            |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                               | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                           | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                          | 100%       | 100%       |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                     | 44 Dokumen | 44 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                   | 44 Dokumen | 44 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                           | 44 Dokumen | 44 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga | 44 Laporan | 44 Laporan |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                   |            |            |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 44 Dokumen | 44 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                | 44 Dokumen | 44 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                | 100%       | 100%       |  |  |  |
|  |  |  |  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                    | 24 Dokumen | 24 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                    | 4 Laporan  | 4 Laporan  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                           | 100%       | 80%        |  |  |  |
|  |  |  |  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                              | 4 Laporan  | 4 Laporan  |  |  |  |

|  |  |  |                                         |                                                      |             |             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                         | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                | 2 Laporan   | -           | Tidak adanya pengeluaran untuk keadaan darurat dan mendesak yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya | Terkait dengan pengeluaran Bantuan Tidak Terduga harus dilakukan inventarisir kriteria darurat dan mendesak yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan bupati tentang pengelolaan belanja tidak terduga yang saat ini sedang berproses di OPD terkait. |  |
|  |  |  |                                         | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota           | 4 Laporan   | 4 Laporan   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | Profesionalisme pengelolaan Aset daerah | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  |                                         | Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | 100%        | 100%        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  |                                         | Penyusunan Standar Harga                             | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  |                                         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  |                                         | Penatausahaan Barang Milik Daerah                    | 44 Laporan  | 44 Laporan  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  |                                         | Pengamanan Barang Milik Daerah                       | 10 Laporan  | 10 Laporan  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  |                                         | Penilaian Barang Milik Daerah                        | 1 Laporan   | 1 Laporan   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |  |  |  |                                                                                                         |            |            |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 6 Dokumen  | 6 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 44 Laporan | 44 Laporan |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 2 Laporan  | 2 Laporan  |  |  |  |

Sumber : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Urusan Keuangan; Badan Pendapatan Daerah

Tabel 3.30.  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat Tahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

| BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                     |                         |                                                                                     |                                                                                       |            |            |              |                              |                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| No                                                     | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA           | KEBIJAKAN                                                                           | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1                                                      | Keuangan            | Badan Pendapatan Daerah | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | 100%       | 100.00%    |              |                              |                                |
|                                                        |                     |                         |                                                                                     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | 5 Dokumen  | 5 Dokumen  |              |                              |                                |
|                                                        |                     |                         |                                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4 Dokumen  | 4 Dokumen  |              |                              |                                |
|                                                        |                     |                         |                                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan |              |                              |                                |
|                                                        |                     |                         |                                                                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |              |                              |                                |

|  |  |  |                                                                               |                   |                   |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 45 Orang/Bulan    | 45 Orang/Bulan    |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         |  |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 12 Laporan        | 12 Laporan        |  |  |  |
|  |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>12 Laporan</b> | <b>12 Laporan</b> |  |  |  |
|  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 12 Laporan        | 12 Laporan        |  |  |  |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>1 Dokumen</b>  | <b>1 Dokumen</b>  |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 2 Paket           | 2 Paket           |  |  |  |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>12 Laporan</b> | <b>12 Laporan</b> |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor             | 1 Paket           | 1 Paket           |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 6 Paket           | 6 Paket           |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | 2 Paket           | 2 Paket           |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                         | 3 Paket           | 3 Paket           |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 12 Dokumen        | 12 Dokumen        |  |  |  |

|                                                                                                                    |                   |                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 12 Laporan        | 12 Laporan        |  |  |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |  |  |  |
| Pengadaan Mebel                                                                                                    | 52 Unit           | 52 Unit           |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 11 Unit           | 11 Unit           |  |  |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>12 Laporan</b> | <b>12 Laporan</b> |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12 Laporan        | 12 Laporan        |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 Laporan        | 12 Laporan        |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Laporan        | 12 Laporan        |  |  |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>100%</b>       | <b>100.00%</b>    |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit            | 1 Unit            |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 40 Unit           | 40 Unit           |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                            |                           |                           |                                                                                             |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 91 Unit                   | 91 Unit                   |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | 2 Unit                    | 2 Unit                    |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                               | <b>8.16%</b>              | <b>11.40%</b>             |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                              | <b>111,945,600,000.00</b> | <b>141,768,284,928.34</b> |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                       | 2 Dokumen                 | 2 Dokumen                 |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah                                              | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                       | 3 Laporan                 | 3 Laporan                 |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah                                                                    | 1 Unit                    | 1 Unit                    |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                               | 11 Laporan                | 11 Laporan                |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                             | 4 Laporan                 | 4 Laporan                 |                                                                                             |  |  |
|  |  |  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 2500 Obyek Pajak          | 2.936 Obyek Pajak         | Adanya program PTSL oleh Pemerintah Pusat sehingga terjadi kenaikan jumlah permohonan BPHTB |  |  |

|  |  |  |  |                                                       |            |            |                                                                 |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                          | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  |                                                                 |  |  |
|  |  |  |  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | 60 Layanan | 66 Layanan | Terjadinya kenaikan jumlah permohonan kepengurusan pajak daerah |  |  |
|  |  |  |  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 8 Dokumen  | 8 Dokumen  |                                                                 |  |  |
|  |  |  |  | Penagihan Pajak Daerah                                | 10 Dokumen | 10 Dokumen |                                                                 |  |  |
|  |  |  |  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   | 35 Dokumen | 35 Dokumen |                                                                 |  |  |
|  |  |  |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 11 Dokumen | 11 Dokumen |                                                                 |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 16 Laporan | 16 Laporan |                                                                 |  |  |

Sumber : Bapenda Kab. Tanjung Jabung Barat

4. Urusan Kepegawaian; Urusan Pendidikan dan Pelatihan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tabel 3.31.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahKabupaten Tanjung

Jabung Barat

Tahun Anggaran 2024

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                                 | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | KEPEGAWAIAN         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                          | 100%       | 100%       |              |                              |                               |
|    |                     |                                               |           | Nilai Sakip OPD                                                                       | 62         | 70.1       |              |                              |                               |
|    |                     |                                               |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | 82         | 85.7       |              |                              |                               |
|    |                     |                                               |           | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 100%       | 100%       |              |                              |                               |
|    |                     |                                               |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 Laporan | 15 Laporan |              |                              |                               |
|    |                     |                                               |           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 5 Laporan  | 5 Laporan  |              |                              |                               |
|    |                     |                                               |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 18 Dokumen | 18 Dokumen |              |                              |                               |
|    |                     |                                               |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 100%       | 100%       |              |                              |                               |

|  |  |  |  |                                                                                |             |             |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 27 Orang    | 27 Orang    |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |  |  |  |
|  |  |  |  | Koorrdinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 18 Laporan  | 18 Laporan  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                         | 56 Paket    | 56 Paket    |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor              | 160 Paket   | 160 Paket   |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 3020 Paket  | 3020 Paket  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 800 Paket   | 800 Paket   |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 50643 Paket | 50643 Paket |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                    |                |                |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1 Laporan      | 1 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1 Laporan      | 1 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1 Laporan      | 1 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1 Laporan      | 1 Laporan      |  |  |  |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>63 Unit</b> | <b>63 Unit</b> |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21 Unit        | 21 Unit        |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 40 Unit        | 40 Unit        |  |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | 2 Unit         | 2 Unit         |  |  |  |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>40 Unit</b> | <b>40 Unit</b> |  |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 33 Unit        | 33 Unit        |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7 Unit | 7 Unit |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                 |        |        |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Indeks Profesionalitas ASN                                        | 73     | N/A    | Belum Final Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari BKN terkait Indikator dalam penilaian                                                                             | Berkoordinasi dengan BKN terkait penilaian Indeks Profesionalitas ASN                 |  |
|  |  |  |  | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal     | 10.3   | 13.9   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | 9.7    | 32.8   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Persentase Jabatan Sesuai Kompetensi                              | 92     | 82.9   | Tidak terpenuhinya persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yaitu: Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Cultral | Mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan |  |
|  |  |  |  | Rasio Pejabat Fungsional Tertentu                                 | 80     | 80.8   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin                            | 25     | 75     |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |

|  |  |  |  |                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 162 Dok   | 171 Dok   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  |  | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian               | 5 Dokumen | 4 Dokumen | Dikarenakan Proses Pengadaan ASN dan PPPK tahun 2024 masih tahap proses pelaksanaan hingga tahun 2025, sehingga perencanaan kebutuhan pengadaan untuk tahun 2025 belum diusulkan. | Melakukan rapar Intern terkait perencanaan kebutuhan pengadaan tahun 2025 berdasarkan formasi yang belum terisi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK       | 9 Dokumen | 9 dokumen |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan Penerimaan CPNSD sebanyak 230 orang dan PPPK sebanyak 550 orang sesuai dengan petunjuk dan arahan Kepempan-RB dan BKN, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menganggarkan gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses |

|  |  |  |  |                                                   |             |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                   |             |             |  |  | seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga diminta untuk menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu diluar Belanja Pegawai.                                                                                |
|  |  |  |  |                                                   |             |             |  |  | Tahun 2024 Pelaksanaan Penerimaan Formasi Guru hanya bisa dilaksanakan melalui mekanisme PPPK sebanyak 150 orang, sesuai petunjuk dari Kemenpan-RB dan BKN. Saat ini PBPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk formasi guru sebanyak 1.303 Orang. |
|  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 148 Dokumen | 157 Dokumen |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |                                  |                |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>    | <b>525 Dok</b> | <b>538 Dok</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  |  | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 500 Dokumen    | 508 Dokumen    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  |  | Pengelolaan Mutasi AS            | 5 Dokumen      | 5 Dokumen      |  |  | Melakukan mutasi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, berdasarkan formasi/lowongan kebutuhan yang tersedia dan sesuai kompetensi serta melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja (TPK) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.                        |
|  |  |  |  | Pengelolaan Promosi ASN          | 20 Dokumen     | 25 Dokumen     |  |  | Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi PPPK sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2025, besaran TPP menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah |

|  |  |  |  |                                                                   |                          |                          |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                | <b>2 Dok<br/>243 Org</b> | <b>2 Dok<br/>367 Org</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                 | 70 Orang                 | 126 Orang                |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN               | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                               | 11 Orang                 | 11 Orang                 |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | 87 Orang                 | 148 Orang                |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional            | 75 Orang                 | 82 Orang                 |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                    | <b>4 Dok<br/>102 Org</b> | <b>4 Dok<br/>192 Org</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                          | 4 Dokumen                | 4 Dokumen                |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                               | 100 Orang                | 190 Orang                |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Disiplin ASN                                            | 2 Orang                  | 2 Orang                  |  |  |  |

Sumber : BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat

f. URUSAN PENGAWASAN  
1. Urusan Pengawasan; Inspektorat

Tabel 3.32.  
Inspektorat  
Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun Anggaran 2024  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

| INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 2024 |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                  |        |           |              |                              |                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| NO                                              | URUSAN PEMERINTAHAN                                 | OPD PELAKSANA      | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                          | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                          | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|                                                 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Inspektorat Daerah | Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 163/Kep.Bup/Isp/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 100 %  | 100%      |              |                              |                                |
|                                                 |                                                     |                    | Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 232/Kep.Bup/Isp/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  | 100 %     |              |                              |                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                   |                   |                                                                                       |                                                                      |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Republik Indonesia<br>dan Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan<br>Aparat Pengawasan<br>Intern Pemerintah<br>Kabupaten Tanjung<br>Jabung Barat Tahun<br>Anggaran 2024                                                                                 |                                                                                                   |                   |                   |                                                                                       |                                                                      |  |
|  |  |  | Keputusan Bupati<br>Tanjung Jabung Barat<br>Nomor :<br>263/Kep.Bup/Isp/2024<br>tanggal 28 Mei 2024<br>tentang<br>Pembangunan Zona<br>Integritas Menuju<br>Wilayah Bebas Dari<br>Korupsi dan Wilayah<br>Birokrasi Bersih dan<br>Melayani Tahun 2024 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 5 Laporan         | 5 Laporan         |                                                                                       |                                                                      |  |
|  |  |  | Keputusan Bupati<br>Tanjung Jabung Barat<br>Nomor :<br>275/Kep.Bup/Isp/2024<br>tanggal 31 Mei 2024<br>tentang Satuan Tugas<br>Sapu Bersih<br>Pungutan Liar<br>Kabupaten Tanjung<br>Jabung Barat                                                    | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | 12 Bulan          | 12 Bulan          |                                                                                       |                                                                      |  |
|  |  |  | Peraturan Bupati<br>Tanjung Jabung Barat<br>Nomor 8 Tahun 2024<br>Tanggal 04 Juli 2024<br>tentang Pedoman<br>Rencana<br>Pengendalian<br>Kecurangan di                                                                                              | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                              | 39<br>Orang/bulan | 32<br>Orang/bulan | terjadi pengurangan<br>Asn pada Inspektorat<br>Daerah dikarenakan<br>ada yang pensiun | rekrutmen ASN di<br>Tahun 2025 ada<br>Penambahan 13 PNS<br>dan 4 P3K |  |

|  |  |  |                                                               |                                                                           |            |            |                                                         |                                                      |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Lingkungan<br>Pemerintah<br>Kabupaten Tanjung<br>Jabung Barat |                                                                           |            |            |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                    | 12 Dokumen | 12 Dokumen |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | 100 %      | 84%        |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya              | 116 Paket  | 143 Paket  |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | 134 Orang  | 67 Orang   | Jadwal diklat<br>bersamaan dengan<br>jadwal pemeriksaan | melakukan perekrutan<br>ASN ke Inspektorat<br>Daerah |  |
|  |  |  |                                                               | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 100 %      | 100 %      |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | 8 Paket    | 8 Paket    |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | 54 Paket   | 54 Paket   |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | 3 Paket    | 3 Paket    |                                                         |                                                      |  |
|  |  |  |                                                               | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | 13 Paket   | 13 Paket   |                                                         |                                                      |  |

|  |  |  |  |                                                                  |            |            |                                                                                            |                                                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 12 Laporan | 12 Laporan |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %      | 100 %      |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 7 Unit     | 8 Unit     |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 36 Unit    | 101 Unit   |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 2 Unit     | 5 Unit     | dikarnakan terjadinya perpindahan ke gedung bbangunan baru yang fasilitasnya belum memadai | pemenuhan secepatnya fasilitas untuk penunjang kegiatan pengawasan |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %      | 100 %      |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 12 Laporan | 12 Laporan |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 12 Laporan | 12 Laporan |                                                                                            |                                                                    |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 12 Laporan | 12 Laporan |                                                                                            |                                                                    |  |

|  |                                    |  |  |                                                                                                                     |            |             |                                     |                                                                  |  |
|--|------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                    |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 100 %      | 66%         |                                     |                                                                  |  |
|  |                                    |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26 Unit    | 24 Unit     | 2 (Dua) motor rusak berat           | diperlukan penghapusan Aset tersebut                             |  |
|  |                                    |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 3 Unit     | 3 Unit      |                                     |                                                                  |  |
|  |                                    |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 63 Unit    | 34 Unit     | Peralatan masih dalam kondisi prima | hanya perawatan yang memang dibutuhkan untuk dilakukan perawatan |  |
|  | Program Penyelenggaraan Pengawasan |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                  | 80 %       | 80 %        |                                     |                                                                  |  |
|  |                                    |  |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                 | 193 LHP    | 333 Laporan |                                     |                                                                  |  |
|  |                                    |  |  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | 44 Laporan | 63 Laporan  |                                     |                                                                  |  |
|  |                                    |  |  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               | 56 Laporan | 88 Laporan  |                                     |                                                                  |  |
|  |                                    |  |  | Reviu Laporan Kinerja                                                                                               | 1 Laporan  | 126 Laporan |                                     |                                                                  |  |
|  |                                    |  |  | Reviu Laporan Keuangan                                                                                              | 1 Laporan  | 18 Laporan  |                                     |                                                                  |  |

|  |                                                 |  |  |                                                                                                         |                 |                 |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  |                                                 |  |  | Pengawasan Desa                                                                                         | 65 Laporan      | 38 Laporan      |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 8 Dokumen       | 8 Dokumen       |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | 100 %           | 100 %           |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 8 Laporan       | 8 Laporan       |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 10 Laporan      | 13 Laporan      |  |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |  |  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | 100 %           | 100 %           |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | 100 %           | 100 %           |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | 505 Rekomendasi | 567 Rekomendasi |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | 100 %           | 100%            |  |  |  |
|  |                                                 |  |  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 17 Kegiatan     | 25 Kegiatan     |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                   |                        |                           |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Pendampingan,<br>Asistensi dan Verifikasi<br>Penegakan Integritas | 10 perangkat<br>daerah | 44<br>Perangkat<br>Daerah |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat

g. **URUSAN KEWILAYAHAN**  
1. **Kecamatan Bram Itam**

Tabel 3.33.  
Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024

KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA              | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET   | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1  | KEWILAYAHAN         | KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | 100%     | 100%      |              |                              |                                 |
|    |                     | KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | 100%     | 100%      |              |                              |                                 |
|    |                     | KANTOR KECAMATAN BRAM ITAM |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | 22 Orang | 22 Orang  |              |                              |                                 |

|  |  |                                           |  |                                                                             |             |               |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                      | 12 Dokumen  | 12<br>Dokumen |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>perangkat Daerah</b>                    | 100%        | 100%          |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                | 47 Paket    | 44 Paket      |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik / Penerangan<br>Bangunan Kantor | 10 Paket    | 10 Paket      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                          | 12 Pakert   | 12 Pakert     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                         | 12 Paket    | 12 Paket      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                             | 12 paket    | 12 paket      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan          | 12 Dokumen  | 12<br>Dokumen |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                  | 12 laporan  | 12 laporan    |  |  |  |
|  |  |                                           |  |                                                                             |             |               |  |  |  |

|  |  |                                           |  |                                                                                                                                      |                              |                               |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>                                                                    | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                    | 220 Laporan                  | 220<br>Laporan                |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>daya air, dan Listrik                                                                       | 12 Laporan                   | 12 Laporan                    |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                          | 12 Laporan                   | 12 Laporan                    |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>                                               | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | 8 Unit                       | 8 Unit                        |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                       | 15 unit                      | 15 unit                       |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Pemeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung<br>Kantor/Bangunan<br>Lainnya                                                                   | 2 unit                       | 2 unit                        |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                                                                                  | <b>70,5 Mutu<br/>Layanan</b> | <b>77,63 Mutu<br/>Layanan</b> |  |  |  |

|  |  |                                           |  |                                                                                                                                                 |                |                |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  |  |                                           |  | <b>DAN PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                                                                                 |                |                |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>Koordinasi<br/>Penyelenggaraan<br/>Kegiatan<br/>Pemerintahan di<br/>Tingkat Kecamatan</b>                                                    | <b>3 Kali</b>  | <b>3 Kali</b>  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah<br>dan Instansi Vertikal<br>Terkait | 12 Laporan     | 12 Laporan     |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>Pelaksanaan Urusan<br/>Pemerintahan yang<br/>Dilimpahkan kepada<br/>Camat</b>                                                                | <b>3 Kali</b>  | <b>3 Kali</b>  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM          |  | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait Dengan<br>Pelayanan Perizinan<br>Non Usaha                                                   | 2 Dokumen      | 2 Dokumen      |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                                                       | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |  |  |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>BRAM ITAM</b> |  | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>                                                                                                | <b>10 Kali</b> | <b>10 Kali</b> |  |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                  |            |            |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM      |  | Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan        | 8 Laporan  | 8 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM      |  | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                            | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KELURAHAN<br>BRAM ITAM KIRI |  | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                                                 | 5 Unit     | 5 Unit     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM      |  | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                       | 10 Pokmas  | 10 Pokmas  |  |  |  |
|  |  |                                       |  |                                                                                                  |            |            |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM      |  | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                   | 100%       | 100%       |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM      |  | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | 9 Desa     | 9 Desa     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BRAM ITAM      |  | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa                                             | 9 Dokumen  | 9 Dokumen  |  |  |  |
|  |  |                                       |  |                                                                                                  |            |            |  |  |  |

Sumber : Kecamatan Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Kecamatan Kuala Betara

Tabel 3.34.

Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| No  | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG                                                                       | TARGET     | REALISAS I | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                           | (3)                                   | (4)       |                                                                                       | (6)        | (7)        | (8)          | (9)                          | (10)                    |
| 1   | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA         |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                          | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|     |                               | KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA         |           | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|     |                               | KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA         |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | Tidak Ada    |                              |                         |
|     |                               | KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA         |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Tidak Ada    |                              |                         |
|     |                               | KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA         |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 100%       | 100%       |              |                              |                         |

|  |  |                                     |  |                                                                             |                   |                   |                                                          |                                                                |  |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                        | 24<br>orang/bulan | 16<br>orang/bulan | Masih ada Jabatan<br>yang belum terisi,<br>kurangnya ASN | Penambahan ASN<br>terutama Staf untuk<br>membantu para<br>KASI |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                      | 12 Dokumen        | 12<br>Dokumen     | Tidak Ada                                                |                                                                |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                    | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |                                                          |                                                                |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Perlengkapannya               | 33 Paket          | 31 Paket          | Adanya ASN yang<br>memasuki Purna<br>Tugas               | Untuk tahun<br>berikutnya tetap<br>dianggarkan                 |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |                                                          |                                                                |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik / Penerangan<br>Bangunan Kantor | 10 Paket          | 10 paket          | Tidak Ada                                                |                                                                |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                          | 24 Paket          | 24 Paket          | Tidak Ada                                                |                                                                |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                         | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada                                                |                                                                |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                             | 5 Paket           | 5 Paket           | Tidak Ada                                                |                                                                |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan              | 12 Dokumen        | 12<br>Dokumen     | Tidak Ada                                                |                                                                |  |

|  |  |                                     |  |                                                                                        |             |               |           |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                             | 12 Laporan  | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan             | 1 unit      | 1 unit        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                               | 3 unit      | 3 unit        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                    | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                      | 12 Laporan  | 12<br>Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air, dan Listrik                         | 12 Laporan  | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                            | 12 Laporan  | 12<br>Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |           |  |  |

|  |  |                                     |  |                                                                                                                                                               |                              |                               |           |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan                          | 9 unit                       | 9 unit                        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                                                | 6 unit                       | 6 unit                        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Pemeliharaan/Rehabili<br>tasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya                                                                                           | 2 unit                       | 2 unit                        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAN PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                                              | <b>70,9 Mutu<br/>Layanan</b> | <b>83,01 Mutu<br/>Layanan</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Koordinasi/Sinergi<br/>Perencanaan dan<br/>pelaksanaan<br/>kegiatan<br/>Pemerintahan<br/>dengan Perangkat<br/>Daerah dan Instansi<br/>Vertikal terkait</b> | 3 Kali                       | 3 Kali                        |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>pelaksanaan kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal terkait                     | 3 Laporan                    | 3 Laporan                     | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                     |  |                                                                                   |                   |                   |           |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>              | 12 bulan          | 12 bulan          |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 12 Dokumen        | 12 Dokumen        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                         | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                      | 10 Kali           | 10 Kali           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     | 8 Laporan         | 8 Laporan         | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                            | <b>2 Kegiatan</b> | <b>2 Kegiatan</b> |           |  |  |

|  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |             |             |           |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | KELURAHAN<br>BETARA KIRI,<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA | - Permendagri<br>Nomor 130 Tahun<br>2018<br>'- Peraturan<br>Gubernur Jambi<br>No. 17 Tahun<br>2024 tentang Tata<br>Cara Pemberian<br>Bantuan<br>Keuangan Bersifat<br>Khusus Provinsi ke<br>Kabupaten/Kota<br>untuk Kelurahan<br>dan Kecamatan | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                             | 3 Unit      | 3 Unit      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KELURAHAN<br>BETARA KIRI,<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA | Peraturan<br>Gubernur Jambi<br>No. 17 Tahun<br>2024 tentang Tata<br>Cara Pemberian<br>Bantuan<br>Keuangan Bersifat<br>Khusus Provinsi ke<br>Kabupaten/Kota<br>untuk Kelurahan<br>dan Kecamatan                                                | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                   | 12 Pokmas   | 12 Pokmas   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA                    |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA                    |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomendasi dan<br/>Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b> | 9 Desa      | 9 Desa      |           |  |  |

|  |                                     |  |                                                     |           |           |           |  |  |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>KUALA BETARA |  | Fasilitas Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|

Sumber : Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Kecamatan Betara

Tabel 3.35.  
 Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
 Tahun Anggaran 2024  
 CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| KECAMATAN BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                               |                         |           |                                                                                       |                |                |                                                    |                              |                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| NO                                              | URUSAN PEMERINTAHAN           | OPD PELAKSANA           | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGATAN                                                 | TARGET         | REALISASI      | PERMASALAHAN                                       | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI |
| 1                                               | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KANTOR KECAMATAN BETARA |           | <b>PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                               | 100%           | 100%           |                                                    |                              |                           |
|                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BETARA |           | <b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                |                |                                                    |                              |                           |
|                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BETARA |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Dokumen      | 8 Dokumen      | Tidak Ada                                          |                              |                           |
|                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BETARA |           | <b>Administrasi Keuanga Perangkat Daerah</b>                                          |                |                |                                                    |                              |                           |
|                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BETARA |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 19 Orang/Bulan | 17 Orang/Bulan | Telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun 2024 |                              |                           |
|                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BETARA |           | Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                           | 12 Dokumen     | 12 Dokumen     | Tidak Ada                                          |                              |                           |

|  |  |                               |  |                                                                                     |            |               |           |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                            |            |               |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                        | -          | -             |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       | 100%       | 100%          |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor          | 12 Paket   | 12 Paket      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                  | 12 Paket   | 12 Paket      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                 | 12 Paket   | 12 Paket      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | 12 Paket   | 12 Paket      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                      | 12 Dokumen | 12<br>Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | 12 Laporan | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | 100%       | 100%          |           |  |  |

|  |  |                               |  |                                                                                                                                     |            |            |           |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atas<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan                                                          | 0 Unit     | 0 Unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  |                               |  | Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                                            | 2 Unit     | 2 Unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Penyedia Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemeintah Daerah</b>                                                                      |            |            |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                   | 1 Laporan  | 1 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                       | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyedia Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>                                              |            |            |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Penyedia Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>Atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | 6 Unit     | 6 Unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                      | 15 Unit    | 15 Unit    | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                               |  |                                                                                                                                              |           |           |           |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Pemeliharaan/Rehabili<br>tasi gedung kantor dan<br>bangunan lainnya                                                                          | 1 Unit    | 1 Unit    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAN PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                             |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Koordinasi<br/>Penyelenggaraan<br/>Kegiatan<br/>Pemerintahan di<br/>Tingkat Kecamatan</b>                                                 |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>Terkait | 1 Laporan | 1 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                                                                        |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>                                                                                             |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                    | 8 Laporan | 8 Laporan | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |           |           |           |  |  |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>   |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA | - Permendagri Nomor<br>130 Tahun 2018<br>'- Peraturan Gubernur<br>Jambi No. 17 Tahun<br>2024 tentang Tata Cara<br>Pemberian Bantuan<br>Keuangan Bersifat<br>Khusus Provinsi ke<br>Kabupaten/Kota untuk<br>Kelurahan dan<br>Kecamatan | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan | 3 Paket   | 3 Paket   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA | Peraturan Gubernur<br>Jambi No. 17 Tahun<br>2024 tentang Tata Cara<br>Pemberian Bantuan<br>Keuangan Bersifat<br>Khusus Provinsi ke<br>Kabupaten/Kota untuk<br>Kelurahan dan<br>Kecamatan                                             | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan       | 15 Pokmas | 15 Pokmas |           |  |  |

|  |  |                               |  |                                                                                                               |           |           |           |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                     |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | <b>Faasilitasi,<br/>Rekomendasi dan<br/>Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b> |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BETARA |  | Fasilitas Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa                                                           | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada |  |  |

Sumber : Kecamatan Betara Kab. Tanjung Jabung Barat

4. Kecamatan Pengabuan

Tabel 3.36.  
Kecamatan Pengabuan  
Kabupaten Jabung BaratTahun Anggaran 2024  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

| KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                     |                            |           |                                                                  |           |           |              |                              |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| NO                                                 | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA              | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
| 1                                                  | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                | 6         | 7         | 8            | 9                            | 10                              |
|                                                    | KEWILAYAHAN         | KANTOR KECAMATAN PENGABUAN |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA      | 100%      | 100%      |              |                              |                                 |
|                                                    |                     | KANTOR KECAMATAN PENGABUAN |           | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%      | 100%      |              |                              |                                 |
|                                                    |                     | KANTOR KECAMATAN PENGABUAN |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 8 DOKUMEN | 8 DOKUMEN |              |                              |                                 |
|                                                    |                     | KANTOR KECAMATAN PENGABUAN |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100%      | 100%      |              |                              |                                 |

|  |  |                                  |  |                                                                             |             |               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                        | 22 Orang    | 13 Orang      | Adanya mutasi<br>pegawai sehingga<br>realisasi gaji tidak<br>terrealisasi 100% dan<br>adanya kekosongan<br>jabatan di<br>Kecamatan dan<br>Kelurahan | Melaksanakan<br>Infentarisir Jumlah<br>Pegawai di<br>Kecamatan<br>Pengabuan dan<br>melaksanakan<br>pelaporan adanya<br>kekosongan jabatan |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                      | 12 Dokumen  | 12<br>Dokumen |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                    | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Perlengkapannya               | 29 Stel     | 29 Stel       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik / Penerangan<br>Bangunan Kantor | 15 Paket    | 15 Paket      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                          | 20 Paket    | 20 Paket      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                         | 12 Paket    | 12 Paket      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                             | 5 Paket     | 5 Paket       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |

|  |  |                                  |  |                                                                                        |             |             |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                             | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Pengadaan Mebeler                                                                      | 22 Unit     | 22 Unit     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                               | 2 Unit      | 2 Unit      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                      | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>daya air, dan Listrik                         | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                            | 12 Laporan  | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |

|  |  |                                  |  |                                                                                                                                              |             |             |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan         | 8 unit      | 8 unit      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                               | 15 unit     | 15 unit     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAN PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                             | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Koordinasi<br/>Penyelenggaraan<br/>Kegiatan<br/>Pemerintahan di<br/>Tingkat Kecamatan.</b>                                                | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>Terkait | 2 Laporan   | 2 Laporan   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                                                                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |

|  |  |                                  |  |                                                                                                              |             |               |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>                                                             | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                    | 8 Laporan   | 8 Laporan     |  |  |  |
|  |  |                                  |  | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>                                                               | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                             | 7 Unit      | 7 Unit        |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                   | 37 Pokmas   | 37 Pokmas     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomendasi dan<br/>Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>PENGABUAN |  | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa                                                         | 12 Dokumen  | 12<br>Dokumen |  |  |  |
|  |  |                                  |  |                                                                                                              |             |               |  |  |  |

Sumber : Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Kecamatan Senyerang

Tabel 3.37.  
Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

| KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                               |                                       |                                                                                              |                                                             |              |              |                            |                              |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| No                                                 | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN                                                                                    | URAIAN PROG/KEG                                             | TARGET       | REALISASI    | PERMASALAHAN               | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1                                                  | 2                             | 3                                     | 4                                                                                            | 5                                                           | 6            | 7            | 8                          | 9                            | 10                      |
| 1                                                  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KANTOR KECAMATAN SENYERANG            |                                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |              |              |                            |                              |                         |
|                                                    |                               |                                       | Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |              |              |                            |                              |                         |
|                                                    |                               |                                       |                                                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | 12 bulan     | 12 bulan     | Pejabatnya tidak terpenuhi |                              |                         |
|                                                    |                               |                                       |                                                                                              | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | 12 bulan     | 12 bulan     |                            |                              |                         |
|                                                    |                               |                                       |                                                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |              |              |                            |                              |                         |
|                                                    |                               |                                       |                                                                                              | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                     | 21 stell PDH | 21 stell PDH |                            |                              |                         |

|  |  |  |  |                                                                                        |                                 |                                 |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | Perengkapannya                                                                         | 6 Stell<br>Pakaian<br>Olah Raga | 6 Stell<br>Pakaian<br>Olah Raga |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                          |                                 |                                 |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                     | 12 bulan                        | 12 bulan                        |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                    | 12 bulan                        | 12 bulan                        |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                        | 12 bulan                        | 12 bulan                        |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                             | 12 bulan                        | 12 bulan                        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                    |                                 |                                 |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                      | 300 lembar<br>Materai           | 83 lembar<br>Materai            |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air, dan Listrik                         | 12 bulan                        | 12 bulan                        |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                            | 12 bulan                        | 12 bulan                        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> |                                 |                                 |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                |                                |                                          |                                                    |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | 9 unit                         | 6 unit                         | 2 Unit Rusak Berat dan Satu Rusak Ringan | Di usulkan Lelang ke BKAD Kab. Tanjung JabungBarat |  |
|  |  |  |                                                                                               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             | 8 unit                         | 8 unit                         |                                          |                                                    |  |
|  |  |  |                                                                                               | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                            |                                |                                |                                          |                                                    |  |
|  |  |  |                                                                                               | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                         |                                |                                |                                          |                                                    |  |
|  |  |  | Mempermudah Pendataan Penerima Bantuan Sosial serta monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 9 Desa / 1 kelurahan           | 9 Desa / 1 kelurahan           |                                          |                                                    |  |
|  |  |  | Membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan Perempuan                          | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | 9 Desa / 1 Kelurahan           | 9 Desa / 1 Kelurahan           |                                          |                                                    |  |
|  |  |  |                                                                                               | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                               |                                |                                |                                          |                                                    |  |
|  |  |  | Pemerataan Pembangunan di Kelurahan                                                           | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           | 4 Kegiatan Belanja Modal Jalan | 4 Kegiatan Belanja Modal Jalan | Dana APBD                                |                                                    |  |

|  |  |  |  |                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                      |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |                                                                                                              | Desktop All<br>in One<br><br>Printer                          | Desktop All in<br>One<br><br>Printer                          | Dana BKBK<br>Kelurahan<br><br>Dana BKBK<br>Kelurahan |  |  |
|  |  |  |  | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                   | 19 Orang<br>RT di Kel.<br>Senyerang<br>Honorarium<br>12 Bulan | 19 Orang RT<br>di Kel.<br>Senyerang<br>Honorarium<br>12 Bulan |                                                      |  |  |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                            |                                                               |                                                               |                                                      |  |  |
|  |  |  |  | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomendasi dan<br/>Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b> |                                                               |                                                               |                                                      |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa                   | 9 Desa / 1<br>Kelurahan                                       | 9 Desa / 1<br>Kelurahan                                       |                                                      |  |  |

Sumber : Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat

6. Kecamatan Seberang Kota

Tabel 3.38.  
Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024  
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

| KECAMATAN SEBERANG KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                               |                               |           |                                                                  |               |            |        |               |            |           |               |                                |                                |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| NO.                                                    | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISAS I PERANGKA T DAERAH | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN                                        | TARGET        |            |        | REALISASI     |            |           | PERMAS ALAHAN | UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |  |
| 1                                                      | 2                             | 3                             | 4         | 5                                                                | K             | Rp         | Target | K             | Rp         | Realisasi |               |                                |                                |  |
| 1                                                      | Penunjang Urusan Pemerintahan | Kecamatan Seberang Kota       |           | 2                                                                | 3             | 4          | 5      | 6             | 7          | 8         | 9             | 10                             | 11                             |  |
|                                                        |                               |                               |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                     | 2,302,097,992 |            | 100%   | 1,626,283,261 |            | 71        | %             |                                |                                |  |
|                                                        |                               |                               |           | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |               | 18,032,000 | 100%   |               | 18,032,000 | 100       | %             |                                |                                |  |
|                                                        |                               |                               |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 7 Dokumen     | 1,552,000  |        | 7 Dokumen     | 1,552,000  | 100       | %             |                                |                                |  |
|                                                        |                               |                               |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja                | 14 laporan    | 16,480,000 |        | 14 laporan    | 16,480,000 | 100       | %             |                                |                                |  |

|                                                                    |          |                      |             |          |                      |              |          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|--------------|----------|--|--|--|
| dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                |          |                      |             |          |                      |              |          |  |  |  |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      |          | <b>1,880,292,142</b> | <b>100%</b> |          | <b>1,263,291,962</b> | <b>67.19</b> | <b>%</b> |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 12 Bulan | 1,799,192,142        |             | 12 Bulan | 1,187,471,962        | 66.00        | %        |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | 12 Bulan | 81,100,000           |             | 12 Bulan | 75,820,000           | 93.49        | %        |  |  |  |
|                                                                    |          |                      |             |          |                      |              |          |  |  |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   |          | <b>15,262,500</b>    | <b>100%</b> |          | <b>11,000,000</b>    | <b>72.07</b> | <b>%</b> |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya            | 38 paket | 15,262,500           |             | 38 paket | 11,000,000           | 72.07        | %        |  |  |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          |          | <b>185,914,400</b>   | <b>100%</b> |          | <b>142,755,300</b>   | <b>76.79</b> | <b>%</b> |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 2,750,000            |             | 12 bulan | 2,750,000            | 100          | %        |  |  |  |

|                                                                                                                                 |          |             |      |          |            |     |   |                                                   |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|----------|------------|-----|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 12 bulan | 39,059,500  |      | 12 bulan | 39,009,000 | 100 | % |                                                   |                                                              |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                | 12 bulan | 21,025,000  |      | 12 bulan | 21,000,000 | 100 | % |                                                   |                                                              |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         | 12 bulan | 10,300,000  |      | 12 bulan | 10,300,000 | 100 | % |                                                   |                                                              |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 12 bulan | 5,600,000   |      | 12 bulan | 5,600,000  | 100 | % |                                                   |                                                              |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br><b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | 12 bulan | 107,179,900 |      | 12 bulan | 64,096,300 | 60  | % |                                                   |                                                              |  |
|                                                                                                                                 |          | 37,024,000  | 100% |          | 37,024,000 | 100 | % |                                                   |                                                              |  |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                               |          | -           |      | -        | -          | -   | % | 1 pompong lama sudah diajukan lelang (belum dapat | untuk pengadaan pompong baru sebaiknya menunggu Pompong lama |  |

|                                                             |          |                    |             |          |                    |           |          |                                                                                             |                                |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|----------|--------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                             |          |                    |             |          |                    |           |          | terhapus dari daftar aset), 1 pompong lagi tahun pembuatan 2020 juga mengalami rusak berat, | terhapus dulu dari daftar aset |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | 2 unit   | 37,024,000         |             | 2 unit   | 37,024,000         | 100       | %        |                                                                                             |                                |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |          | <b>108,920,000</b> | <b>100%</b> |          | <b>102,139,999</b> | <b>94</b> | <b>%</b> |                                                                                             |                                |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | 12 bulan | 1,940,000          |             | 12 bulan | 1,940,000          | 100       | %        |                                                                                             |                                |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik    | 12 bulan | 12,500,000         |             | 12 bulan | 12,500,000         | 100       | %        |                                                                                             |                                |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | 12 bulan | 94,480,000         |             | 12 bulan | 87,699,999         | 93        | %        |                                                                                             |                                |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>    |          | <b>56,652,950</b>  | <b>100%</b> |          | <b>52,040,000</b>  | <b>92</b> | <b>%</b> |                                                                                             |                                |  |

|                                                                                                                    |         |            |  |         |            |    |   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|---------|------------|----|---|--|--|--|
| <b>Pemerintah Daerah</b>                                                                                           |         |            |  |         |            |    |   |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 14 unit | 51,532,950 |  | 14 unit | 46,960,000 | 91 | % |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | 4 unit  | 5,120,000  |  | 4 unit  | 5,080,000  | 99 | % |  |  |  |
| Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | -       | -          |  | -       | -          | -  | % |  |  |  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                   |         |            |  |         | -          | -  | % |  |  |  |
| <b>Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                      |         |            |  |         | -          | -  | % |  |  |  |

|                                                                                                                             |           |                      |             |           |                      |              |          |                                                                                                 |                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | -         |                      |             | -         | -                    | -            | %        |                                                                                                 |                                                                                                                                   |  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                   |           | <b>2,301,391,522</b> | <b>100%</b> |           | <b>2,138,864,600</b> | <b>92.94</b> | <b>%</b> |                                                                                                 |                                                                                                                                   |  |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                       |           | <b>1,230,510,800</b> | <b>100%</b> |           | <b>1,218,260,800</b> | <b>99</b>    | <b>%</b> |                                                                                                 |                                                                                                                                   |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                               | 5 Laporan | 1,230,510,800        |             | 5 Laporan | 1,218,260,800        | 99.00        | %        | Pada Tahun 2024 Triwulan III Kecamatan Seberang Kota ditunjuk oleh Dinas P3AP2KB untuk meresmik | Dapat menginput kegiatan Sekolah Lansia ini pada Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah |  |

|                                 |  |               |      |  |             |    |   |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|---------------------------------|--|---------------|------|--|-------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                 |  |               |      |  |             |    |   | an Sekolah Lansia "Selatang", Sekolah Lansia Tangguh, diharapkan pada Tahun 2025 ada pembiayaan pada kegiatan ini melalui sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Keg. Pemberdayaan Masy. di wilayah Kecamatan. | Kecamatan |  |
|                                 |  |               |      |  |             |    |   |                                                                                                                                                                                                              |           |  |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  | 1,070,880,722 | 100% |  | 920,603,800 | 86 | % |                                                                                                                                                                                                              |           |  |



|                                                                                                                                                              |              |                   |             |              |                   |               |          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|----------|--|--|--|
| <b>PROGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN<br/>DAN<br/>KETERTIBAN<br/>UMUM</b>                                                                                |              | <b>13,890,000</b> | <b>100%</b> |              | <b>13,890,000</b> | <b>100</b>    | <b>%</b> |  |  |  |
| <b>Koordinasi<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketentraman<br/>dan Ketertiban<br/>Umum</b>                                                                            |              | 13,890,000        | <b>100%</b> |              | 13,890,000        | 100           | %        |  |  |  |
| Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia ,<br>Tentara<br>Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan | 2<br>Laporan | 9,500,000         |             | 2<br>Laporan | 9,500,000         | 100           | %        |  |  |  |
| Harmonisasi<br>Hubungan<br>dengan Tokoh<br>Agama dan<br>Tokoh<br>Masyarakat                                                                                  | 2<br>Laporan | 4,390,000         |             | 2<br>Laporan | 4,390,000         | 100           | %        |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |              |                   |             |              |                   |               |          |  |  |  |
| <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN<br/>DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                                                                |              | <b>7,300,000</b>  | <b>100%</b> |              | <b>7,300,000</b>  | <b>100.00</b> | <b>%</b> |  |  |  |







339

|  |  |  |  |                                                                                              |   |                   |  |   |                   |    |   |  |                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--|---|-------------------|----|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                              |   |                   |  |   |                   |    |   |  | Desa,Keuan<br>gan, dan<br>Aset Desa.<br>Kemudian<br>segala<br>bentuk<br>Laporan<br>yang dibuat<br>oleh Desa<br>disampaikan<br>bukan hanya<br>kepada<br>Dinas terkait<br>tetapi juga<br>kepada<br>Camat |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Program dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa | - | -                 |  | - | -                 | -  | % |  |                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |  |  | TOTAL                                                                                        |   | 4,624,679,<br>514 |  |   | 3,786,3<br>37,861 | 82 | % |  |                                                                                                                                                                                                        |  |

Sumber : Kecamatan Seberang Kota Kab. Tanjung Jabung Barat

7. Kecamatan Tungkal Ilir

Tabel 3.39.

Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun Anggaran 2024

| No  | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG                                                                  | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                           | (3)                                   | (4)       | (5)                                                                              | (6)        | (7)        | (8)          | (9)                          | (10)                    |
| 1   | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KECAMATAN TUNGKAL ILIR                |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                     | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|     |                               | KECAMATAN TUNGKAL ILIR                |           | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|     |                               | KECAMATAN TUNGKAL ILIR                |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | Tidak Ada    |                              |                         |
|     |                               | KECAMATAN TUNGKAL ILIR                |           | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja | 14 Laporan | 14 Laporan | Tidak Ada    |                              |                         |

|  |  |                              |  |                                                                                   |                   |                   |                                                                             |                                     |  |
|--|--|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |  |                              |  | SKPD                                                                              |                   |                   |                                                                             |                                     |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                         | <b>100%</b>       | <b>73%</b>        |                                                                             |                                     |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                           | 73<br>orang/bulan | 68<br>orang/bulan | Ada nya jabatan<br>yang kosong dan<br>ada ASN yg<br>pensiun serta<br>Mutasi | Tetap di anggarkan di Tahun<br>2025 |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                            | 19<br>Dokumen     | 19 Dokumen        | Tidak Ada                                                                   |                                     |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                      | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |                                                                             |                                     |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Perlengkapannya                  | 168 stel          | 168 stel          | Tidak Ada                                                                   |                                     |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Administrasi<br/>Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                             | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |                                                                             |                                     |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | 20 Paket          | 20 Paket          | Tidak Ada                                                                   |                                     |  |

|  |  |                              |  |                                                                                                 |               |             |           |  |  |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                           | 20 Paket      | 20 Paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                                          | 800<br>Paket  | 800 Paket   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                                              | 8 Paket       | 8 Paket     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Penyelenggaraa<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                               | 80<br>Laporan | 80 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan                | 1 unit        | 1 Unit      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     | 8 unit        | 8 unit      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Penyediaan<br/>Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan</b>                                             | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |

|  |  |                        |  |                                                                                                                    |             |             |           |  |  |
|--|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  |                        |  | <b>Pemerintahan Daerah</b>                                                                                         |             |             |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN TUNGKAL ILIR |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2 Laporan   | 2 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN TUNGKAL ILIR |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                           | 2 Laporan   | 2 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN TUNGKAL ILIR |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 Laporan  | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN TUNGKAL ILIR |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN TUNGKAL ILIR |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39 unit     | 39 unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN TUNGKAL ILIR |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 32 unit     | 32 unit     | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                |                                  |                               |           |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Pemeliharaan/R<br>ehabilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                                                                      | 9 unit                           | 9 unit                        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGG<br/>ARAAN<br/>PEMERINTAH<br/>N DAN<br/>PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                                                      | <b>70,5<br/>Mutu<br/>Layanan</b> | <b>82,96 Mutu<br/>Layanan</b> |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Koordinasi/Sin<br/>ergi<br/>Perencanaan<br/>dan<br/>pelaksanaan<br/>kegiatan<br/>Pemerintahan<br/>dengan<br/>Perangkat<br/>Daerah dan<br/>Instansi<br/>Vertikal terkait</b> | 3 Kali                           | 3 Kali                        |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Koordinasi/Siner<br>gi Perencanaan<br>dan<br>pelaksanaan<br>kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan<br>Perangkat<br>Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>terkait                      | 3<br>Laporan                     | 3 Laporan                     | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                              |  |                                                                                                                |                                    |                                 |           |  |  |
|--|--|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>yang<br/>Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>                       | 12 bulan                           | 12 bulan                        |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang Terkait<br>Dengan<br>Pelayanan<br>Perizinan Non<br>Usaha         | 12<br>Dokumen                      | 12 Dokumen                      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYA<br/>AN<br/>MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                 | <b>100%</b>                        | <b>100%</b>                     |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                                       | 10 Kali                            | 10 Kali                         |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Peningkatan<br>partisipasi<br>amsyarakat<br>dalam forum<br>Musyawarah<br>perencanaan<br>pembangunan di<br>desa | 5<br>lembaga<br>kemasyar<br>akatan | 5 lembaga<br>kemasyarak<br>atan | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                       |                   |           |  |  |
|--|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|--|
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |                                                                                                                                                                                                                  | Sinkronisasi<br>program kerja<br>dan kegiatan<br>pemberdayaan<br>masyarkat yang<br>dilakukan oleh<br>pemerintah dan<br>swasta diwilayah<br>kerja kecamatan | 12<br>Dokumen         | 12 Dokumen        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |                                                                                                                                                                                                                  | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                                            | 7<br>Laporan          | 7 Laporan         | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>                                                                                                             | <b>2<br/>Kegiatan</b> | <b>2 Kegiatan</b> |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR | -<br>Permendagri<br>Nomor 130<br>Tahun 2018<br>'- Peraturan<br>Gubernur<br>Jambi No. 10<br>Tahun 2023<br>tentang<br>Pedoman<br>Umum<br>Bantuan<br>Keuangan<br>Khusus ke<br>Kabupaten/K<br>ota untuk<br>Kelurahan | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                                        | 32 Unit               | 32 Unit           | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |            |           |  |  |
|--|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--|--|
|  |  |                              | dan<br>Kecamatan                                                                                                                                                                   |                                                                   |               |            |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR | Peraturan<br>Gubernur<br>Jambi No. 10<br>Tahun 2023<br>tentang<br>Pedoman<br>Umum<br>Bantuan<br>Keuangan<br>Khusus ke<br>Kabupaten/K<br>ota untuk<br>Kelurahan<br>dan<br>Kecamatan | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                        | 167<br>Pokmas | 167 Pokmas | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |                                                                                                                                                                                    | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM | 100%          | 100%       |           |  |  |

|  |  |                              |  |                                                                                                                                                             |              |           |           |  |  |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Koordinasi<br>Upaya<br>Penyelenggaraa<br>n Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                                                                           |              |           |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia,<br>Tentara<br>Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan | 1<br>Laporan | 1 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Harmonisasi<br>Hubungan<br>dengan Tokoh<br>Agama dan<br>Tokoh<br>Masyarakat                                                                                 | 4<br>Laporan | 4 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN<br/>DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                                                               | 100%         | 80%       |           |  |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Fasilitasi,<br>Rekomendasi<br>dan Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                         | 2<br>Dokumen | 2 Dokumen |           |  |  |

|  |  |                              |  |                                                                                                                                |              |           |                                                                        |                                       |  |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Fasilitas<br>Administrasi<br>Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                      | 2<br>Dokumen | 2 Dokumen | Tidak Ada                                                              |                                       |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Fasilitas<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Des                                 | 2<br>Dokumen | 2 Dokumen | Tidak Ada                                                              |                                       |  |
|  |  | KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ILIR |  | Fasilitas<br>Penataan,<br>Pemanfaatan,<br>dan<br>Pendayagunaan<br>Ruang Desa<br>serta Penetapan<br>dan Penegasan<br>Batas Desa | 2<br>Dokumen | 0         | Kegiatan ini tidak<br>di Kecamatan<br>Tetapi di Pem otda<br>dan di PMD | Tidak di Anggarkan lagi Tahun<br>2025 |  |

Sumber : Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat

| 8. Kecamatan Merlung                                                                                              |                     |                          |           |                                                                                  |           |           |              |                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| <div>Tabel 3.40.</div> <div>Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat</div> <div>Tahun Anggaran 2024</div> |                     |                          |           |                                                                                  |           |           |              |                              |                                 |
| Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2024                           |                     |                          |           |                                                                                  |           |           |              |                              |                                 |
| KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT                                                                  |                     |                          |           |                                                                                  |           |           |              |                              |                                 |
| NO                                                                                                                | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA            | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
| 1                                                                                                                 | KEWILAYAHAN         | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA                      | 100%      | 100%      |              |                              |                                 |
|                                                                                                                   |                     | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | 100%      | 100%      |              |                              |                                 |
|                                                                                                                   |                     | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | 4 Dokumen | 4 Dokumen |              |                              |                                 |
|                                                                                                                   |                     | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 5 Laporan | 5 Laporan |              |                              |                                 |

|  |  |                                |  |                                                                                   |               |               |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  |  |                                |  | SKPD                                                                              |               |               |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                         | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                           | 25 orang      | 21 orang      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                            | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                      | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Perlengkapannya                  | 60 Paket      | 60 Paket      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Administrasi<br/>Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                             | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | 12 Paket      | 12 Paket      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN            |  | Penyediaan<br>Peralatan dan                                                       | 12 Paket      | 12 Paket      |  |  |  |

|  |  |                          |  |                                                                         |             |             |  |  |  |
|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  | MERLUNG                  |  | Perlengkapan Kantor                                                     |             |             |  |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 12 Paket    | 12 Paket    |  |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | 12 Paket    | 12 Paket    |  |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |  |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |  | Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 laporan  | 12 laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 6 unit      | 6 unit      |  |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MERLUNG |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |

|  |  |                                |  |                                                                                                                                                  |               |             |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                             | 12<br>Laporan | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber daya<br>air, dan Listrik                                                                             | 12<br>Laporan | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                      | 12<br>Laporan | 12 Laporan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>                                               | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan | 10 Unit       | 10 Unit     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                   | 13 Unit       | 13 Unit     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Pemeliharaan/R<br>ehabilitasi<br>Gedung<br>Kantor/Banguna                                                                                        | 2 Unit        | 2 Unit      |  |  |  |

|  |  |                                |  |                                                                                                        |              |           |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|
|  |  |                                |  | n Lainnya                                                                                              |              |           |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGG<br/>ARAAN<br/>PEMERINTAHA<br/>N DAN<br/>PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>             | 74           | 74        |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>yang<br/>Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>               | 1 Urusan     | 1 Urusan  |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang Terkait<br>Dengan<br>Pelayanan<br>Perizinan Non<br>Usaha | 2<br>Dokumen | 2 Dokumen |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYA<br/>AN<br/>MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                         | 100%         | 100%      |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                               | 100%         | 100%      |  |  |  |

|  |  |                                |  |                                                                                                 |                           |                           |                                                      |                                                                                            |  |
|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan | 8 Laporan                 | 8 Laporan                 |                                                      |                                                                                            |  |
|  |  |                                |  | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>                                                  | 100%                      | 100%                      |                                                      |                                                                                            |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                             | 8 Unit                    | 7 Unit                    | pemotongan dana<br>BKBK dari provinsi<br>sebesar 70% | Kordinasi dengan OPD terkait<br>agar Dana BKBK bisa<br>disesuaikan di awal<br>penganggaran |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                      | 9 Pokmas                  | 9 Pokmas                  |                                                      |                                                                                            |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>PROGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTRAMA<br/>N DAN<br/>KETERTIBAN<br/>UMUM</b>                  | <b>6 Berita<br/>Acara</b> | <b>6 Berita<br/>Acara</b> |                                                      |                                                                                            |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Koordinasi<br/>Upaya<br/>Penyelenggara<br/>an Ketentraman<br/>dan Ketertiban<br/>Umum</b>    | <b>3 laporan</b>          | <b>3 laporan</b>          |                                                      |                                                                                            |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia,<br>Tentara<br>Nasional      | 6 kali                    | 6 kali                    |                                                      |                                                                                            |  |

|  |  |                                |  |                                                                                                                  |             |             |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |  |                                |  | Indonesia dan<br>Instansi Vertikal<br>Lainnya                                                                    |             |             |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN<br/>DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomendasi<br/>dan Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan<br/>Desa</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Fasilitasi<br>Administrasi<br>Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                       | 10 Desa     | 10 Desa     |  |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MERLUNG |  | Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa                 | 10 desa     | 10 desa     |  |  |  |
|  |  |                                |  |                                                                                                                  |             |             |  |  |  |

Sumber : Kecamatan Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat

9. Kecamatan Tungkal Ulu

Tabel 3.41.  
Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
TAHUN 2024

| No | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG                                                    | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU          |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                       | 100%      | 100%      |              |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU          |           | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100%      | 100%      |              |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU          |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Tidak Ada    |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU          |           | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 6 Laporan | Tidak Ada    |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN TUNGKAL              |           | Administrasi Keuangan Perangkat                                    | 100%      | 100%      |              |                              |                         |

|  |  |                                       |  |                                                                                |                    |                    |                                                                                              |                                                              |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|  |  | ULU                                   |  | <b>Daerah</b>                                                                  |                    |                    |                                                                                              |                                                              |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                        | 20 orang/<br>bulan | 14 orang/<br>bulan | Adanya ASN yang<br>pensiun dan<br>banyak jabatan di<br>kecamatan yang<br>kosong              | Diperlukannya penambahan atau<br>pemerataan ASN di kecamatan |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                         | 12<br>Dokumen      | 12 Dokumen         | Tidak Ada                                                                                    |                                                              |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                   | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        |                                                                                              |                                                              |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Perlengkapannya               | 71 Paket           | 71 Paket           | Tidak Ada                                                                                    |                                                              |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan        | 2 orang            | 1 orang            | Waktu<br>pelaksanaan<br>bimtek/diklat tidak<br>pas dengan<br>kesiapan ASN<br>untuk berangkat | Mencari bimtek/diklat dengan<br>jadwal yang sesuai           |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Administrasi<br/>Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                          | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        |                                                                                              |                                                              |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Paket           | 12 Paket           | Tidak Ada                                                                                    |                                                              |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL        |  | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan                                    | 12 Paket           | 12 Paket           | Tidak Ada                                                                                    |                                                              |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                 |               |             |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | ULU                                   |  | Kantor                                                                                          |               |             |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                                          | 12 Paket      | 12 Paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                                              | 12 Paket      | 12 Paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                   | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan                | -             | -           | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Pengadaan<br>Mebel                                                                              | -             | -           | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     | -             | -           | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN                   |  | <b>Penyediaan<br/>Jasa Penunjang</b>                                                            | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                               |               |             |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | TUNGKAL<br>ULU                        |  | <b>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                                                                                     |               |             |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                             | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air,<br>dan Listrik                                                                             | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                   | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>                                            | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan | 12 unit       | 12 unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                | 20 unit       | 20 unit     | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                                                            |                                   |                               |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya                                                                                                  | 2 unit                            | 2 unit                        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGA<br/>RAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN<br/>PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                                                      | <b>70,90<br/>Mutu<br/>Layanan</b> | <b>82,82 Mutu<br/>Layanan</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Koordinasi/Siner<br/>gi Perencanaan<br/>dan<br/>pelaksanaan<br/>kegiatan<br/>Pemerintahan<br/>dengan<br/>Perangkat<br/>Daerah dan<br/>Instansi Vertikal<br/>terkait</b> | 3 Kali                            | 3 Kali                        |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Koordinasi/Sinerg<br>i Perencanaan<br>dan pelaksanaan<br>kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan<br>Perangkat<br>Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>terkait                     | 12<br>Laporan                     | 12 Laporan                    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>yang</b>                                                                                                                    | 7 urusan                          | 7 urusan                      |           |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                 |                       |                   |                                                                                                    |                                                                 |  |
|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                       |  | <b>Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>                                                             |                       |                   |                                                                                                    |                                                                 |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang Terkait<br>Dengan<br>Pelayanan<br>Nonperizinan    | 2 laporan             | -                 | Tidak terlaksana<br>karena Perjanjian<br>Kerja Sama<br>dengan<br>Ombudsman tidak<br>jadi dilakukan | Perlunya koordinasi lebih lanjut<br>mengenai kerja sama terkait |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAA<br/>N<br/>MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                  | <b>100%</b>           | <b>100%</b>       |                                                                                                    |                                                                 |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                        | 10 Kali               | 10 Kali           |                                                                                                    |                                                                 |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan | 8<br>Laporan          | 8 Laporan         | Tidak Ada                                                                                          |                                                                 |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>                                                  | <b>2<br/>Kegiatan</b> | <b>2 Kegiatan</b> |                                                                                                    |                                                                 |  |

|  |  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | KELURAHAN<br>TUNGKAL<br>ULU,<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU | 1)<br>Permendagri<br>Nomor 130<br>Tahun 2018<br>2) Peraturan<br>Gubernur<br>Jambi No. 17<br>Tahun 2024<br>tentang Tata<br>Cara<br>Pemberian<br>Bantuan<br>Keuangan<br>Bersifat<br>Khusus<br>Provinsi ke<br>Kabupaten/K<br>ota<br>untuk<br>Kelurahan<br>dan<br>Kecamatan | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan | 4 Unit       | 2 Unit    | - Pembangunan di<br>RT 08 tidak<br>terlaksana karena<br>tidak mendapatkan<br>hibah tanah<br>- Terjadinya<br>perubahan cuaca<br>yang<br>tidak terduga di<br>lokasi sehingga<br>tanah menjadi<br>becek dan tidak<br>bisa dilakukan<br>pengerjaan | Segera mencari solusi lain yang<br>bisa diambil, misalnya dengan<br>mengajukan<br>perubahan lokasi dengan pagu<br>yang sama. |  |
|  |  | KELURAHAN<br>TUNGKAL<br>ULU,<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU | Peraturan<br>Gubernur<br>Jambi No.<br>17 Tahun<br>2024 tentang<br>Tata<br>Cara<br>Pemberian<br>Bantuan<br>Keuangan<br>Bersifat<br>Khusus<br>Provinsi ke<br>Kabupaten/K<br>ota                                                                                           | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan          | 12<br>Pokmas | 12 Pokmas | Tidak Ada                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |  |

|  |  |                                       |                                        |                                                                                                                                                                     |              |           |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  |                                       | untuk<br>Kelurahan<br>dan<br>Kecamatan |                                                                                                                                                                     |              |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |                                        | <b>POGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN<br/>DAN<br/>KETERTIBAN<br/>UMUM</b>                                                                                        | 6            | 6         |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |                                        | <b>Koordinasi<br/>Upaya<br/>Penyelenggaraa<br/>n Ketentraman<br/>Dan Ketertiban<br/>Umum</b>                                                                        | 7 kali       | 7 kali    |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |                                        | Sinergitas<br>Dengan<br>Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia Dan<br>Instansi vertikal<br>Terkait Di<br>wilayah<br>Kecamatan | 3<br>Laporan | 3 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |                                        | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN<br/>DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHA<br/>N DESA</b>                                                                                      | 100%         | 100%      |           |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                     |              |           |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Fasilitasi,<br>Rekomendasi<br>dan Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa | 9 Desa       | 9 Desa    |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TUNGKAL<br>ULU |  | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                             | 9<br>Dokumen | 9 Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  |                                       |  |                                                                                                     |              |           |           |  |  |

Sumber : Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat

10. Kecamatan Muara Papalik

Tabel 3.42.  
Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024  
KECAMATAN MUARA PAPALIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                  | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1  | KEWILAYAHAN         | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA      | 100%       | 100%       |              |                              |                                 |
|    |                     | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |           | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%       | 100%       |              |                              |                                 |
|    |                     | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | tidak ada    |                              |                                 |
|    |                     | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan            | 14 Laporan | 14 Laporan | tidak ada    |                              |                                 |

|  |  |                                |  |                                                                    |                |                |           |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|--|
|  |  |                                |  | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                    |                |                |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 100%           | 100%           |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 19 Orang/Bulan | 14 Orang/Bulan |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | 12 Dokumen     | 12 Dokumen     | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | 100%           | 100%           |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya            | 70 Paket       | 70 Paket       | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 100%           | 100%           |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 6 Paket        | 6 Paket        | tidak ada |  |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                    |               |            |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                              | 30 Paket      | 30 Paket   | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                             | 12 Paket      | 12 Paket   | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                                 | 5 Paket       | 5 Paket    | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan              | 12<br>Dokumen | 12 Dokumen | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                      | 12<br>Laporan | 12 Laporan | tidak ada |  |  |
|  |  |                                         |  |                                                                                    |               |            |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | 100%          | 100%       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan   |               |            |           |  |  |

|  |  |                                                   |  |                                                                                                    |               |             |                                                                               |                                                                        |  |
|--|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK           |  | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                        | 5 unit        | 4 unit      | Dikarenakan<br>adanya selisih<br>harga di toko<br>denga SSH yang<br>di input. | kedepannya harus di<br>koordinasikan harga di toko-toko<br>Elektronik. |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>MUARA<br/>PAPALIK</b> |  | <b>Penyediaan<br/>Jasa Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>                          | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |                                                                               |                                                                        |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK           |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                  | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | <b>tidak ada</b>                                                              |                                                                        |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK           |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber daya air,<br>dan Listrik                                  | 12<br>Laporan | 12 bulan    | <b>tidak ada</b>                                                              |                                                                        |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK           |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                        | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | <b>tidak ada</b>                                                              |                                                                        |  |
|  |  | <b>KANTOR<br/>KECAMATAN<br/>MUARA<br/>PAPALIK</b> |  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |                                                                               |                                                                        |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK           |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan                                          | 9 unit        | 9 unit      | <b>tidak ada</b>                                                              |                                                                        |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                                                        |                         |                      |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--|--|
|  |  |                                         |  | dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan                                       |                         |                      |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                         | 9 Unit                  | 9 Unit               | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Gedung<br>Kantor/Bangunan<br>Lainnya                                                     |                         |                      |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | PROGRAM<br>PENYELENGGA<br>RAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK                                              | 70,5<br>Mutu<br>Layanan | 70,5 Mutu<br>Layanan |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Koordinasi<br>Penyelenggaraa<br>n Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat<br>Kecamatan                                  | 10 Kali                 | 10 Kali              |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Koordinasi/Sinerg<br>i Perencanaan<br>dan Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan<br>Perangkat<br>Daerah dan | 2<br>Laporan            | 2 Laporan            | tidak ada |  |  |

|  |  |                                         |                                      |                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |
|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                         |                                      | Instansi Vertikal<br>Terkait<br>(KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK)                                                    |              |           |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |                                      | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada Camat                                       | 34<br>urusan | 34 urusan |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK | Meningkatkan<br>Pelayanan<br>Publik  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang terkait<br>dengan<br>Nonperizinan<br>(KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK) | 2<br>Laporan |           | Layanan non<br>Perizinan<br>Kecamatan Seperti<br>Pengurusan Ktp,<br>KK, Akte dan<br>Lainya<br>Dilaksanakan oleh<br>Dinas Capil, tidak<br>lagi dilaksanakan<br>oleh Kecamatan. | Kegiatan ini tidak dimasukkan lagi<br>dalam renja kecamatan Tahun<br>2025 dan 2026 dst. |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |                                      | PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                 | 100%         | 100%      |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |                                      | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                     | 10 Kali      | 10 Kali   |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA            | Mempermudah<br>Pendataan<br>Penerima | Sinkronisasi<br>Program Kerja<br>dan Kegiatan                                                                      | 2<br>Dokumen | 2 Dokumen | tidak ada                                                                                                                                                                     |                                                                                         |  |

|  |  |                                |                                                                      |                                                                                              |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | PAPALIK                        | Bantuan Sosial serta monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan       | Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK | Membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan Perempuan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                | 8 Laporan        | 8 Laporan        | tidak ada                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |                                                                      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                              | 2 Kegiatan       | 2 Kegiatan       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK | Pemerataan Pembangunan di Kelurahan                                  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                   | 6 Unit           | 2 Unit           | Penyerapan Dana BKBK baru dilaksanakan setelah APBDP bulan November (waktu pelaksanaan terlalu mepet) meyebabkan rendahnya persentase realisasi pelaksanaan | Kabag Pemerintahan dan BKAD agar membantu pelaporan ke Kabag Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga BKBK Prov. Jambi bisa dilaksanakan di APBD Murni atau dari awal tahun |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK |                                                                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                         | 20 Pokmas/ Ormas | 20 Pokmas/Or mas | tidak ada                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                                                                                          |              |           |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                        | 6            | 6         |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Koordinasi<br>Upaya<br>Penyelenggaraa<br>n Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                                                                        | 6<br>Laporan | 6 Laporan |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan | 3<br>Laporan | 3 Laporan | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Harmonisasi<br>Hubungan<br>Dengan Tokoh<br>Agama dan<br>Tokoh<br>Masyarakat                                                                              | 4<br>Laporan | 4 Laporan | tidak ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHA<br>N DESA                                                                                       | 100%         | 100%      |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN                     |  | Fasilitasi,<br>Rekomendasi                                                                                                                               | 9 Desa       | 9 Desa    |           |  |  |

|  |  |                                         |  |                                                                       |              |           |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | MUARA<br>PAPALIK                        |  | dan Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |              |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>MUARA<br>PAPALIK |  | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa               | 9<br>Dokumen | 9 Dokumen | tidak ada |  |  |
|  |  |                                         |  |                                                                       |              |           |           |  |  |

Sumber : Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat

11. Kecamatan Tebing Tinggi

Tabel 3.43.  
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| No | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG                                                    | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI        |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                       | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI        |           | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI        |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | Tidak Ada    |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI        |           | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 14 Laporan | 14 Laporan | Tidak Ada    |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN                      |           | Administrasi Keuangan                                              | 100%       | 100%       |              |                              |                         |

|  |  |                                         |  |                                                                                |                       |                   |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|--|
|  |  | TEBING<br>TINGGI                        |  | <b>Perangkat<br/>Daerah</b>                                                    |                       |                   |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                        | 11<br>orang/bul<br>an | 11<br>orang/bulan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                         | 12<br>Dokumen         | 12 Dokumen        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Perlengkapannya               | 22 Paket              | 22 Paket          | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>Administrasi<br/>Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                          | <b>100%</b>           | <b>100%</b>       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | 6 Paket               | 6 Paket           | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                          | 24 Paket              | 24 Paket          | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                         | 12 Paket              | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                                 |               |               |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                                              | 5 Paket       | 5 Paket       | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                           | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                   | 12<br>Laporan | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan                | -             | -             | -         |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Pengadaan<br>Mebel                                                                              | -             | -             | -         |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     | 5 Unit        | 5 Unit        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN                     |  | <b>Penyediaan<br/>Jasa Penunjang</b>                                                            | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |           |  |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                                                                               |               |             |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | TEBING<br>TINGGI                        |  | <b>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                                                                                     |               |             |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                             | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air,<br>dan Listrik                                                                             | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                   | 12<br>Laporan | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>                                            | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan | 4 unit        | 1 unit      | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                | 7 unit        | 7 unit      | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                                                                                                            |                                   |                               |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya                                                                                                  | 1 unit                            | 1 unit                        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGA<br/>RAAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAN<br/>PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                                                  | <b>70,90<br/>Mutu<br/>Layanan</b> | <b>86,48 Mutu<br/>Layanan</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>Koordinasi/Siner<br/>gi Perencanaan<br/>dan<br/>pelaksanaan<br/>kegiatan<br/>Pemerintahan<br/>dengan<br/>Perangkat<br/>Daerah dan<br/>Instansi Vertikal<br/>terkait</b> | 3 Kali                            | 3 Kali                        |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Koordinasi/Sinerg<br>i Perencanaan<br>dan pelaksanaan<br>kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan<br>Perangkat<br>Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>terkait                     | 4<br>Laporan                      | 4 Laporan                     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING           |  | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan</b>                                                                                                                             | 12 bulan                          | 12 bulan                      |           |  |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                                                |               |             |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | TINGGI                                  |  | yang<br>Dilimpahkan<br>kepada Camat                                                                            |               |             |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang Terkait<br>Dengan<br>Pelayanan<br>Perizinan Non<br>Usaha         | 12<br>Dokumen | 12 Dokumen  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAA<br/>N<br/>MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                 | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                                       | 10 Kali       | 10 Kali     |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat<br>Dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan Di<br>Desa | 3<br>Laporan  | 3 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                | 8<br>Laporan  | 8 Laporan   | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                       |                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>       | <b>2<br/>Kegiatan</b> | <b>2 Kegiatan</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  | KELURAHAN<br>TEBING<br>TINGGI,<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI | - Permendagri<br>Nomor 130<br>Tahun 2018<br>'- Peraturan<br>Gubernur Jambi<br>No. 10 Tahun<br>2023 tentang<br>Pedoman<br>Umum Bantuan<br>Keuangan<br>Khusus ke<br>Kabupaten/Kota<br>untuk<br>Kelurahan dan<br>Kecamatan | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan  | 5 Unit                | 3 Unit            | Penyerapan Dana<br>BKBK baru<br>dilaksanakan<br>setelah APBDP<br>bulan November<br>(waktu<br>pelaksanaan<br>terlalu mepet)<br>meyebabkan<br>rendahnya<br>persentase<br>realisasi<br>pelaksanaan | Kabag Pemerintahan dan BKAD<br>agar membantu pelaporan ke<br>Kabag Pemerintahan Provinsi<br>Jambi sehingga BKBK Prov.<br>Jambi bisa dilaksanakan di<br>APBD Murni atau dari awal tahun |  |
|  |  | KELURAHAN<br>TEBING<br>TINGGI,<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI | Peraturan<br>Gubernur Jambi<br>No. 10 Tahun<br>2023 tentang<br>Pedoman<br>Umum Bantuan<br>Keuangan<br>Khusus ke<br>Kabupaten/Kota<br>untuk<br>Kelurahan dan<br>Kecamatan                                                | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan           | 39<br>Pokmas          | 39 Pokmas         | Tidak Ada                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>POGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN<br/>DAN</b> | <b>6</b>              | <b>6</b>          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |  |

|  |  |                                |  |                                                                                                                                       |           |           |           |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|  |  |                                |  | <b>KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                                |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI |  | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>                                                              | 6 Dokumen | 6 Dokumen |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI |  | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi vertikal Terkait Di wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 2 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat                                                                          | 1 Laporan | 1 Laporan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH N DESA</b>                                                                             | 100%      | 100%      |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>                                                                | 9 Desa    | 9 Desa    |           |  |  |

|  |  |                                         |  |                                                                                                  |              |           |           |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  |                                         |  | Pemerintahan<br>Desa                                                                             |              |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                          | 9<br>Dokumen | 9 Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>Dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                  | 9<br>Dokumen | 9 Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>TEBING<br>TINGGI |  | Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Dengan<br>Pembangunan<br>Desa | 9<br>Dokumen | 9 Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  |                                         |  |                                                                                                  |              |           |           |  |  |

Sumber : Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat

12. Kecamatan Renah Mendaluh

Tabel 3.44.  
Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
KECAMATAN RENAH MENDALUH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| No | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG                                                    | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH       |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                       | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH       |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH       |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | Tidak Ada    |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH       |           | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 14 Laporan | 14 Laporan | Tidak Ada    |                              |                         |
|    |                               | KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH       |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 100%       | 100%       |              |                              |                         |

|                                          |  |                                                                                |                   |                   |           |  |  |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|--|
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                        | 19<br>Orang/Bulan | 16<br>Orang/Bulan | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                         | 12<br>Dokumen     | 12<br>Dokumen     | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                   | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Perlengkapannya               | 37 Paket          | 37 Paket          | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                              | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                          | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                            | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                  | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |

|                                          |  |                                                                                                 |               |               |           |  |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|--|
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                           | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                   | 12 Laporan    | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                   | -             | -             | -         |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pengadaan Mebel                                                                                 | 2 Paket       | 2 Paket       | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     | 5 Unit        | 5 Unit        | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                     | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH             |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                               | 12 Laporan    | 12 Laporan    | Tidak Ada |  |  |

|                                          |  |                                                                                                                                         |                   |                   |           |  |  |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|--|
| MENDALUH                                 |  |                                                                                                                                         |                   |                   |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air,<br>dan Listrik                                                                       | 12 Laporan        | 12 Laporan        | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                             | 12 Laporan        | 12 Laporan        | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>                                      | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | 12 unit           | 12 unit           | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                          | 10 unit           | 10 unit           | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                  | 2 unit            | 2 unit            | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGAR<br/>AAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                                                                                | <b>70,90 Mutu</b> | <b>79,20 Mutu</b> |           |  |  |

|                                 |  |                                                                                                                                   |            |            |           |  |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|
|                                 |  | <b>DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                       |            |            |           |  |  |
| KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH |  | <b>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait</b> | 11 Kali    | 11 Kali    |           |  |  |
| KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait        | 12 Laporan | 12 Laporan | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                              | 34 Urusan  | 34 Urusan  |           |  |  |
| KANTOR KECAMATAN RENAH MENDALUH |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                 | 2 Laporan  | 2 Laporan  | Tidak Ada |  |  |

|                                          |  |                                                                                                                                                              |                  |                  |           |  |  |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--|--|
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAA<br/>N MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                                                                   | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                                                                                     | 11 Kali          | 11 Kali          |           |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat Dalam<br>Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan Di<br>Desa                                               | 5 Lembaga        | 5 Lembaga        | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Sinkronisasi<br>Program Kerja dan<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Yang<br>Dilakukan Oleh<br>Pemerintah dan<br>Swasta di Wilayah<br>Kerja Kecamatan | 2 Dokumen        | 2 Dokumen        | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                                              | 8 Laporan        | 8 Laporan        | Tidak Ada |  |  |
| KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>                                                                                                               | <b>5 Program</b> | <b>5 Program</b> |           |  |  |

|  |  |                                          |  |                                                                                                                                                               |             |             |           |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan                                                                                                           | 11 Unit     | 11 Unit     |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                    | 17 Pokmas   | 17 Pokmas   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>POGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN<br/>DAN<br/>KETERTIBAN<br/>UMUM</b>                                                                                  | <b>6</b>    | <b>6</b>    |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Koordinasi<br/>Upaya<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketentraman Dan<br/>Ketertiban<br/>Umum</b>                                                                   | 6 Kali      | 6 Kali      |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Sinergitas Dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional<br>Indonesia Dan<br>Instansi vertikal<br>Terkait Di wilayah<br>Kecamatan | 3 Laporan   | 3 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Harmonisasi<br>Hubungan Dengan<br>Tokoh Agama Dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                                         | 4 Laporan   | 4 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN<br/>DAN<br/>PENGAWASAN</b>                                                                                                           | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |

|  |  |                                          |  |                                                                                                                                               |               |               |           |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|--|
|  |  |                                          |  | <b>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                                                                                                  |               |               |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomendasi<br/>dan Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan<br/>Desa</b>                              | 10 Desa       | 10 Desa       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                       | 10<br>Dokumen | 10<br>Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>Dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                               | 10<br>Dokumen | 10<br>Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan<br>Ruang Desa serta<br>Penetapan dan<br>Penegasan Batas<br>Desa | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>RENAH<br>MENDALUH |  | Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Dengan<br>Pembangunan<br>Desa                                              | 10<br>Dokumen | 10<br>Dokumen | Tidak Ada |  |  |

| 13. Kecamatan Batang Asam                                                                                                                                                                                                       |                               |                                       |           |                                                                    |            |            |              |                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| <p>Tabel 3.45.</p> <p>Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>Tahun Anggaran 2024</p> <p>CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</p> <p>KECAMATAN BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</p> |                               |                                       |           |                                                                    |            |            |              |                              |                         |
| No                                                                                                                                                                                                                              | URUSAN PEMERINTAHAN           | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG                                                    | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM          |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                       | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM          |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100%       | 100%       |              |                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM          |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | Tidak Ada    |                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                               | KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM          |           | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 14 Laporan | 14 Laporan | Tidak Ada    |                              |                         |

|  |  |                                       |  |                                                                                |                   |                   |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                      | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                        | 19<br>Orang/Bulan | 16<br>Orang/Bulan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                         | 12<br>Dokumen     | 12 Dokumen        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                   | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Perlengkapannya               | 55 Paket          | 37 Paket          | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                              | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                          | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG         |  | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                         | 12 Paket          | 12 Paket          | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                 |               |             |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | ASAM                                  |  |                                                                                                 |               |             |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                 | 12 Paket      | 12 Paket    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                           | 12<br>Dokumen | 12 Dokumen  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                   | 12 Laporan    | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                   | -             | -           | -         |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Pengadaan Mebel                                                                                 | 2 Paket       | 2 Paket     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     | 5 Unit        | 5 Unit      | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                         |             |             |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                                             | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                       | 12 Laporan  | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air,<br>dan Listrik                                                                       | 12 Laporan  | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                             | 12 Laporan  | 12 Laporan  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | 12 unit     | 12 unit     | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                          | 10 unit     | 10 unit     | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                                                        |                               |                               |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                                 | 2 unit                        | 2 unit                        | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGA<br/>RAAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAN<br/>PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>                                                                              | <b>70,90 Mutu<br/>Layanan</b> | <b>79,20 Mutu<br/>Layanan</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Koordinasi/Siner<br/>gi Perencanaan<br/>dan pelaksanaan<br/>kegiatan<br/>Pemerintahan<br/>dengan<br/>Perangkat<br/>Daerah dan<br/>Instansi Vertikal<br/>terkait</b> | 11 Kali                       | 11 Kali                       |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>pelaksanaan<br>kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan<br>Instansi Vertikal<br>terkait                     | 12<br>Laporan                 | 12 Laporan                    | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>yang<br/>Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>                                                                               | 34 Urusan                     | 34 Urusan                     |           |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                                              |                                 |                                 |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang Terkait<br>Dengan<br>Pelayanan<br>Perizinan Non<br>Usaha                                                       | 2 Laporan                       | 2 Laporan                       | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAA<br/>N MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                                                                   | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>                     |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                                                                                     | 11 Kali                         | 11 Kali                         |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat Dalam<br>Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan Di<br>Desa                                               | 5 Lembaga<br>Kemasyara<br>katan | 5 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Sinkronisasi<br>Program Kerja<br>dan Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Yang<br>Dilakukan Oleh<br>Pemerintah dan<br>Swasta di Wilayah<br>Kerja Kecamatan | 2 Dokumen                       | 2 Dokumen                       | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN                   |  | Peningkatan<br>Efektifitas                                                                                                                                   | 8 Laporan                       | 8 Laporan                       | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | BATANG<br>ASAM                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan |                  |                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>                    | <b>5 Program</b> | <b>5 Program</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM | Permendagri<br>Nomor 130<br>Tahun 2018<br>Tentang<br>Kegiatan<br>Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Keliurtahan serta<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan,<br>Perbup Nomor<br>30 Tahun 2020<br>Tentang<br>Petunjuk<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan,<br>Peraturan<br>Gubernur Jambi | Pembangunan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan               | 11 Unit          | 11 Unit          | Penyerapan Dana<br>BKBK baru<br>dilaksanakan<br>setelah APBDP<br>bulan November<br>(waktu<br>pelaksanaan<br>terlalu mepet)<br>meyebabkan<br>rendahnya<br>persentase<br>realisasi<br>pelaksanaan | Kabag Pemerintahan dan BKAD<br>agar membantu pelaporan ke<br>Biro Pemerintahan Provinsi<br>Jambi sehingga BKBK Provinsi<br>Jambi bisa dilaksanakan di<br>APBD Murni atau dari awal tahun |  |

|  |  |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                         |           |           |           |  |  |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|  |  |                              | No. 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kotan Untuk Kelurahan dan Kecamatan.                         |                                                                         |           |           |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM | Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kotan Untuk Kelurahan dan Kecamatan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                    | 17 Pokmas | 17 Pokmas | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM |                                                                                                                                                                   | <b>POGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                | 6         | 6         |           |  |  |
|  |  | KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM |                                                                                                                                                                   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b> | 6 Kali    | 6 Kali    |           |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                                               |               |             |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Sinergitas Dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional<br>Indonesia Dan<br>Instansi vertikal<br>Terkait Di wilayah<br>Kecamatan | 3 Laporan     | 3 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Harmonisasi<br>Hubungan<br>Dengan Tokoh<br>Agama Dan Tokoh<br>Masyarakat                                                                                      | 4 Laporan     | 4 Laporan   | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN<br/>DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                                                                 | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomendasi<br/>dan Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan<br/>Desa</b>                                              | 10 Desa       | 10 Desa     |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                       | 10<br>Dokumen | 10 Dokumen  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>Dan<br>Pendayagunaan                                                                                            | 10<br>Dokumen | 10 Dokumen  | Tidak Ada |  |  |

|  |  |                                       |  |                                                                                                                                              |               |            |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--|--|
|  |  |                                       |  | Aset Desa                                                                                                                                    |               |            |           |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Terlaksananya<br>Fasilitas<br>Penataan,<br>Pemanfaatan, dan<br>Pendayagunaan<br>Ruang Desa serta<br>Penetapan dan<br>Penegasan Batas<br>Desa | 2 Dokumen     | 2 Dokumen  | Tidak Ada |  |  |
|  |  | KANTOR<br>KECAMATAN<br>BATANG<br>ASAM |  | Fasilitas<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Dengan<br>Pembangunan<br>Desa                                              | 10<br>Dokumen | 10 Dokumen | Tidak Ada |  |  |
|  |  |                                       |  |                                                                                                                                              |               |            |           |  |  |

Sumber : Kecamatan Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat

h. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
1. Urusan Pemerintahan Umum; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Tabel 3.46.  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN     | OPD PELAKSANA                     | KEBIJAKAN *                                                                                                                                                                                                            | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD* |
|----|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| I  | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Perda Kab. Tanjab Barat No 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tanggal 29 Desember 2023) Noreg Peraturan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | 100%   | 100%      | -            | -                            |                                 |
|    |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD    | 100%   | 100%      | -            | -                            |                                 |
|    |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 5 Dok  | 5 Dok     | -            | -                            |                                 |
|    |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | 4 Lap  | 4 Lap     | -            | -                            |                                 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             |             |   |   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|
|  |  |  | Kabupaten<br>Tanjung Jabung<br>Barat : (4-<br>49/2023)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |             |             |   |   |
|  |  |  | Perbup Kab.<br>Tanjung Barat<br>No. 39 Tahun<br>2023 tentang<br>Penjabaran<br>Anggaran<br>Pendapatan<br>dan Belanja<br>Daerah Tahun<br>Anggaran 2024<br>( Berita Daerah<br>Kabupaten<br>Tanjung Jabung<br>Barat Tahun<br>2023 Nomor 39<br>Tanggal 29<br>Desember<br>2023) | <b>Adminitrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                 | 30 Orang    | 30 Orang    |   |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN               | 6 Dok       | 6 Dok       | - | - |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | 2 Lap       | 2 Lap       |   |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>             | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>perlengkapannya        | 1 Paket     | 1 Paket     | - | - |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai            | 6 Dok       | 6 Dok       |   |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             |             |   |   |

|  |  |  |  |                                                                         |             |             |   |   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|
|  |  |  |  |                                                                         |             |             |   |   |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor       | 6 Paket     | 6 Paket     | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 4 Paket     | 4 Paket     | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 12 Paket    | 12 Paket    | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | 6 Dok       | 6 Dok       | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | 24 Dok      | 24 Dok      |   |   |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 6 Lap       | 6 Lap       | - | - |
|  |  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |   |   |
|  |  |  |  | Pengadaan Aset Tetap lainnya                                            | 2 Unit      | 2 Unit      |   |   |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - |

Dalam Rangka Meningkatkan Kehidupan Demokratis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Perangkat Daerah terkait melakukan Kajian Pemberian Bantuan Dana Bagi Partai Politik disesuaikan dengan Kondisi Kekinian dan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud

1. Melaksanakan Studi Tiru tentang Tata cara

|  |  |  |  |                                                                                                                     |             |             |   |   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|
|  |  |  |  | <b>Daerah</b>                                                                                                       |             |             |   |   |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6 Lap       | 6 Lap       | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                             | 6 Lap       | 6 Lap       | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 6 Lap       | 6 Lap       | - | - |
|  |  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15 Unit     | 15 Unit     | - | - |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 1 Unit      | 1 Unit      |   |   |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap lainnya                                                                                     | 6 Unit      | 6 Unit      |   |   |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 1 Unit      | 1 Unit      | - | - |

Penambahan Nilai Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dan serta koordinasi mengenai percepatan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Terkait kenaikan Penambahan Nilai Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik bahwa usulan kenaikan di mulai dari Pengajuan anggota DPRD ke Kepala Daerah selanjutnya di Proses di Badan Kesbangpol dan Badan Kesbangpol membentuk Tim Kenaikan Bantuan Hibah kepada Partai Politik, selanjutnya Tim Kenaikan Bantuan Hibah kepada Partai Politik bekerja dengan Tim TPAD dengan Syarat melihat kemampuan keuangan Daerah

3. Karena Kemampuan daerah masih belum mampu, maka nilai bantuan hibah keuangan kepada Partai Politik masih sama dengan tahun sebelumnya.

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |      |      |   |   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|
|  |  | Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 170/Kep.Bup./Kesbangpol/2024 tentang Penyelenggara Pelatihan/TC Kegiatan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2024 | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                            | 100% | 100% | - | - |
|  |  |                                                                                                                                                                                                        | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> | 100% | 100% | - | - |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |           |           |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
|  |  | <p>Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 190/Kep.Bup/ /Kesbangpol/ 2024 tentang Penyelenggaraa n Kegiatan Rekrutmen Awal dan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jambi dan Tanjung Jabung Barat serta Kegiatan Trainin g Centre dan Pengiriman Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024</p> <p>Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 267/Kep.Bup/Ke</p> | <p>Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara , Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> | 200 Orang | 200 Orang |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |   |   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|
|  |  |  | <p>sbangpol/ 2021<br/>tentang Forum<br/>Pembauran<br/>Kebangsaan<br/>dan Dewan<br/>Pembina Forum<br/>Pembauran<br/>Kebangsaan<br/>Kab. Tanjab<br/>Barat periode<br/>2021-2024</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |   |   |
|  |  |  | <p>Surat<br/>Keputusan<br/>Bupati Tanjung<br/>Jabung Barat<br/>No<br/>507/Kep.Bup/<br/>/Kesbangpol/20<br/>24 tentang<br/>Penyelenggara<br/>Pelatihan/TC<br/>Paskibraka<br/>Kegiatan<br/>Pengibaran<br/>danPenurunan</p> | <p>Pelaksanaan<br/>Monitoring, Evaluasi<br/>dan Pelaporan di<br/>bidang Ideologi<br/>Wawasan<br/>Kebangsaan, Bela<br/>Negara , Karakter<br/>Bangsa , Pembauran<br/>Kebangsaan, Bhineka<br/>Tunggal Ika dan<br/>Sejarah Kebangsaan</p> | <p>4 Lap</p> | <p>4 Lap</p> | - | - |

|  |  |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      |      |   |   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|
|  |  |  | Bendera Merah Putih dan Penyelenggara Kegiatan Apel Kehormatan dan Renungan Suci Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79 Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2024 |                                                                                                                                                                      |      |      |   |   |
|  |  |  | Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 273/Kep.Bup/Ke sbangpol/ 2024 Tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Kab. Tanjab Barat TA 2024         | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                               | 100% | 100% | - | - |
|  |  |  | Keputusan Bupati Tanjab Barat No 241/Kep.Bup/Ke sbangpol/ 2024 tentang Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik                                      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | 100% | 100% | - | - |

|  |  |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |   |   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|
|  |  |  | Kab.Tanjab<br>Barat Untuk<br>Masa Bakti<br>2019-2024<br>Tahun<br>Anggaran 2024                                                                                            | <b>Perwakilan dan<br/>Partai Politik,<br/>Pemilihan Umum /<br/>Pemilihan Umum<br/>Kepala Daerah,<br/>serta Pemantauan<br/>Situasi Politik</b>                                                                                                                                                              |           |           |   |   |
|  |  |  | Keputusan<br>Bupati Tanjab<br>Barat No<br>239/Kep.Bup/<br>Kesbangpol/202<br>4 tentang Tim<br>Pemantauan<br>Perkembangan<br>Politik Daerah<br>Kab. Tanjab<br>Barat TA 2024 | Pelaksanaan<br>Kebijakan di bidang<br>pendidikan politik ,<br>etika budaya politik,<br>peningkatan<br>demokrasi, fasilitasi<br>kelembagaan<br>pemerintahan,<br>perwakilan dan partai<br>politik, pemilihan<br>umum / pemilihan<br>umum Kepala Daerah<br>serta pemantauan<br>situasi politik di<br>daerah . | 650 Orang | 650 Orang | - | - |
|  |  |  |                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan<br>Koordinasi di bidang<br>pendidikan politik,<br>etika budaya politik,<br>peningkatan<br>demokrasi , fasilitasi<br>kelembagaan<br>pemerintahan,<br>perwakilan dan partai<br>politik, pemilihan<br>umum / Pemilihan                                                                            | 30 Orang  | 30 Orang  |   |   |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
|  |  |  |  | Umum Kepala<br>Daraeh , serta<br>pemantauan situasi<br>politik di daerah                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |   |   |
|  |  |  |  | Pelaksanaan<br>Monitoring Evaluasi<br>dan Pelaporan di<br>bidang pendidikan<br>politik, etika budaya<br>politik, peningkatan<br>demokrasi , fasilitasi<br>kelembagaan<br>pemerintahan,<br>perwakilan dan partai<br>politik, pemilihan<br>umum / Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah , serta<br>pemantauan situasi<br>politik di daerah | 4 Lap | 4 Lap | - | - |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>DAN PENGAWASAN<br/>ORGANISASI<br/>KEMASYARAKATA<br/>N</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 100%  | 100%  | - | - |
|  |  |  |  | <b>Perumusan<br/>Kebijakan Teknis<br/>dan Pemantapan<br/>Pelaksanaan Bidang<br/>Pemberdayaan dan<br/>Pengawasan</b>                                                                                                                                                                                                                   | 100%  | 100%  | - | - |

|  |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |         |         |   |   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|  |  |  |                                                                              | <b>Organisasi<br/>Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                          |         |         |   |   |
|  |  |  |                                                                              | Pelaksanaan<br>Kebijakan dibidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi dan<br>Mediasi, sengketa<br>Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di daerah                                | 100 Org | 100 Org |   |   |
|  |  |  |                                                                              | Pelaksanaan<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Pelaporan<br>dibidang Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi dan<br>Mediasi, sengketa<br>Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di daerah | 4 Lap   | 4 Lap   | - | - |
|  |  |  | Surat<br>Keputusan<br>Bupati Tanjung<br>Jabung Barat<br>No<br>651/Kep.Bup/Ke | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN DAN<br/>PENGEMBANGAN<br/>KETAHANAN<br/>EKONOMI, SOSIAL<br/>DAN BUDAYA</b>                                                                                                            | 100%    | 100%    | - | - |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |         |         |   |   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|  |  | <p>sbangpol/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No/348/Kep.Bup/Kesbangpol/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Kab. Tanjab Barat periode tahun 2021-2026</p> <p>Surat Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 258/Kep.Bup/Ke sbangpol/2024 Tentang Pemberian Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Kab. Tanjab Barat TA 2024</p> | <p><b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b></p>                                                                                   | 100%    | 100%    | - | - |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah</p> | 455 Org | 455 Org | - | - |

|  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |   |   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|
|  |  | Surat Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 418/Kep.Bup/Ke sbangpol/2024 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika TA 2024 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah | 4 Lap       | 4 Lap       |   |   |
|  |  |                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - |
|  |  | Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 249/Kep.Bup/Ke sbangpol/2024 tentang Tim                                                                                                             | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | - | - |

|  |  |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |   |   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|  |  |  | Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelijen, pemantauan orang asing , tenaga kerja asing dan lembaga, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik di daerah                          | 300 Org | 300 Org | - | - |
|  |  |  |                                                                                                                                    | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah | 4 Lap   | 4 Lap   | - | - |
|  |  |  | Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No 203/Kep.Bup/Kesbangpol                                                              | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    | 10 Dok  | 10 Dok  |   |   |

|  |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | /2024 tentang<br>Tim Terpadu<br>Penanganan<br>Konflik Sosial di<br>Kab. Tanjab<br>Barat |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran Ditahun 2023 ini, terdapat beberapa perangkat daerah yang melakukan kebijakan strategis didasarkan keputusan kepala daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati atau Surat Edaran dan Instruksi Bupati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dari kebijakan stategis ini, gambaran terkait hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel.3.47 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

| NO | PERANGKAT DAERAH | KEBIJAKAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                  | DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | BAKESBANGPOL     | 1. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 267/Kep.Bup/Kesbangpol/2021 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanjung Jabung Barat 2021-2024 | 1. Permendagri no 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;                                                                                                                                                                                                                             | 1. Pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan Program pembauran kebangsaan Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                      | 2. Peraturan Gubernur Jambi no 129 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Provinsi Jambi;                                                                                                                                                                                                    | 2. Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah                                    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                      | 3. Peraturan Bupati Tanjab Barat No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kab. Tanjab Barat                                                                                                                                                                                               | 3. Pelaksanaan koordinasi, fsailitasi dan perumusan bahan kebijakan di Bidang Pembauran kebangsaan              |
|    |                  | 2. Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 166/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah Keuangan Partai Politik Kab. Tanjung Jabung Barat TA 2023                                    | 1. UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Dukungan Kegiatan Pendidikan Politik dan operasional Sekretariat partai politik                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                      | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Peningkatan Demokrasi                                                                                        |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                      | 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan | 3. Meningkatkan indeks Partisipasi Politik                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                   | keuangan partai politik                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |                                                                                                                                                                                                   | 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 3. Keputusan Bupati Tanjab Barat No 171/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kab. Tanjung Jabung Barat untuk Masa Bakti 2019-2024 TA 2023         | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 61 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah                                                                                                         | 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah<br>2. Pelaksanaan koordinasi, Fasilitas dan Perumusan bahan Kebijakan terkait situasi politik di daerah<br>3. Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula |
|  |  | 4. Keputusan Bupati Tanjab Barat No 151/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2023                                         | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2011 Pedoman, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah                                                                                                              | 1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah.<br>2. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas dan Perumusan bahan Kebijakan terkait situasi Politik di daerah                                              |
|  |  | 5. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 348/Kep.Bup/Kesbangpol/ 2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Kab. Tanjab Barat periode Tahun 2021-2026 | 1. Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah         | 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta<br>2. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan bahan kebijakan di bidang kerukunan umat beragama                                                                  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                   | 2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi |                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 6. Surat Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 358/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Pemberian Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tanjab Barat TA 2023                                                                    | 1. Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah | 1. Peningkatan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama                                                                                                                               |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | 7. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 204/Kep.Bup/Kesbangpol/ 2023 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2023                                                  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Pedoman Pemantauan Orang Asing di Daerah                                                                                                                                                                                                     | 1. Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah                                                                                                                                                                                      | 2. Pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi dan Perumusan bahan Kebijakan di Bidang Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di Kab. Tanjab Barat                                                                                     |
|  |  | 8. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 208/Kep.Bup/Kesbangpol/ 2023 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kab. Tanjung Jabung Barat TA 2023 | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika                                                                                                                         | 1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah.<br>2. Pemasarakatan wawasan kebangsaan.<br>3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan bahan kebijakan terkait fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika |
|  |  | 9. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 203/Kep.Bup/Kesbangpol/2023 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Tanjung Jabung Barat TA 2023                                                                       | 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                                                                              | 2. Koordinasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |                                                                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 3. Perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi terkait dengan upaya penanganan dan penyelesaian konflik sosial |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2023 telah disampaikan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dimana terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi, yaitu:

1. BADAN KPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NO | REKOMENDASI DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                                                                                 | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN                                 | TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara, menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas PNS dan PPPK yang memiliki Hak dan Kewajiban yang sama termasuk dalam pemberian tunjangan dan fasilitas dalam hal ini Tambahan Penghasilan Pegawai. untuk itu kiranya dilakukan pengkajian dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Peawai bagi PPPK sebagaimana yang telah diterima PNS selama ini. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan keadilan dan meningkatkan motivasi kinerja pegawai dimaksud. | Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi PPPK sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2025, besaran TPP menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah | Program: Kepegawaian/ Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN | Meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga dapat meningkatkan motivasi kinerja bagi Pegawai |
| 2. | dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif di tiap-tiap perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Melakukan mutasi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, berdasarkan formasi kebutuhan yang                                                | Program: Kepegawaian                                   | Penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Kompetensi dan sesuai Kebutuhan                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | terkait mutasi pegawai ASN agar kepala BKPSDM selaku leading sektor Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dapat memberikan saran dan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tersedia dan sesuai kompetensi serta melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja (TPK) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN                                                   | Organisasi sehingga dapat meningkatkan Kinerja, Produktivitas dan Prestasi Kerja serta dapat memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan karir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sampai saat ini masih membutuhkan peran Pegawai Non ASN pada Tiap-tiap Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerja antara Pegawai Non PNS dengan Kepala OPD, dalam rangka mewujudkan keadilan agar dilakukan pemberlakuan yang sama dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai Non PNS dimaksud untuk Tiap-tiap Perangkat Daerah.                                                                                                                                                                                     | Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan Penerimaan CPNSD sebanyak 230 orang dan PPPK sebanyak 550 orang sesuai dengan petunjuk dan arahan Kepempan-RB dan BKN, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menganggarkan gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga diminta untuk menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu diluar Belanja Pegawai. | Program: Kepegawaian<br>Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Pegawai Non ASN yang tidak lulus seleksi CPNSD/ PPPK tahap 1 tetap bekerja seperti biasa, dan OPD tetap membuat perjanjian kerja. dan telah dianggarkan Gaji Non ASN tahun 2025 di setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | dikarenakan Jumlah Pendidik dari Tahun ke Tahun semakin berkurang salah satunya, banyak yang memasuki usia pensiun sehingga dapat mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar disekolah. Dalam rangka mengatasi hal tersebut dapat dilakukan perekrutan guru melalui jalur penerimaan PPPK sebagaimana yang telah dilakukan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. untuk itu pemerintah kabupaten segera melakukan percepatan perekrutan guru melalui jalur penerimaan PPPK maupun PNS secara transparan dan berkeadilan, mengutamakan guru yang selama ini telah mengabdikan dan berstatus guru tetap (GTT) yang telah terdaftar dalam | Tahun 2024 Pelaksanaan Penerimaan Formasi Guru hanya bisa dilaksanakan melalui mekanisme PPPK sebanyak 150 orang, sesuai petunjuk dari Kemenpan-RB dan BKN. Saat ini BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerima PPPK untuk formasi guru sebanyak 1.303 Orang.                                                                                                                                                                                                                | Program: Kepegawaian<br>Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Berdasarkan pengumuman Setda Nomor: 800.1.2.2/1913/BKPSDM/2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 saat ini BKPSDM masih proses penerimaan PPPK tahap 2:1. Untuk Non ASN Kab. Tanjab Barat yang (Tidak Lulus pendaftaran CPNSD/ PPPK tahap 1)2. Non ASN yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun di Instansi Pemerintah.3. PPG yang terdata pada Dapodik, karena pada formasi guru tahap 2 masih ada 92 formasi yang kosong |

|           |                         |                                    |                     |                                          |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|           | Dapodik.                |                                    |                     |                                          |
| <b>NO</b> | <b>PERANGKAT DAERAH</b> | <b>REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022</b> | <b>TINDA LANJUT</b> | <b>TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN</b> |
| 1.        | BKPSDM                  | <i>Evaluasi Umum</i>               |                     |                                          |